



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 memuat arahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 terdiri dari:
 - a. Buku I : tentang kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan;
 - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2016 periode tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Lampung dan Program Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016;
 - b. Acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2016; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Lampung tahun 2016.

Pasal 3

Dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh satuan kerja.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-6 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2015**

DAFTAR ISI

	halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKP	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP	
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.3 Kondisi Geologi	II-4
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	II-7
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-8
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-8
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.4 Kondisi Demografi	II-16
2.1.4.1 Jumlah Penduduk	II-16
2.1.4.2 Ketenagakerjaan	II-18
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKP	II-19
Sampai Dengan Tahun 2013 Dan Realisasi RPJMD	
2.2.1 Avaluasi Indikator Kinerja Utama	II-19
Pembangunan Daerah	
2.2.2 Aspek Daya Saing	II-24
2.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-24
2.2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah	II-26
2.2.2.3 Fokus Iklim Investasi	II-28
2.2.2.4 Fokus Sumberdaya Manusia	II-29
2.2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-30
2.2.3.1 Fokus Pemerataan Ekonomi Daerah	II-30
2.2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-33
2.2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-39
2.2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-39
2.2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-79

BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Lampung	III-5
3.1.2	Kinerja Sosial Ekonomi Provinsi Lampung	III-14
3.1.2.1	Pengangguran	III-14
3.1.2.2	Persentase Penduduk Miskin	III-16
3.1.2.3	Indeks Wiliamson	III-19
3.1.2.4	Indeks Gini	III-21
3.1.2.5	Indeks Pembangunan Manusia	III-22
3.1.3	Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017	III-23
3.1.3.1	Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional dan Global	III-23
3.1.3.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Lampung	III-29
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-41
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-42
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-51
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-51
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-53
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Tinjauan Kebijakan Nasional	IV-1
4.1.1	Visi dan Misi RPJMN 2015-2019	IV-1
4.1.2	Strategi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015- 2019	IV-2
4.1.3	Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019	IV-6
4.1.4	Arah Kebijakan Umum RPJMN 2015-2019	IV-7
4.1.5	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Pertama RPJMN 2015-2019	IV-10
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019	IV-12
4.2.1	Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2015- 2019	IV-12
4.2.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019	IV-19
4.3	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016	IV-23
4.4	Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung	IV-63
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
5.1	Program Prioritas Berdasarkan Urusan	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. 1	Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I-5
Gambar	2. 1	Peta Administrasi Provinsi Lampung	II-3
Gambar	2.2	Kondisi Eksisting Infrastruktur Provinsi Lampung	II-52
Gambar	4. 1	Strategi Pembangunan Nasional	IV-5
Gambar	4. 2	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung	IV-65

DAFTAR TABEL

Tabel	2. 1	Sebaran Penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	II-17
Tabel	2. 2	Kinerja pembangunan Provinsi Lampung tahun 2014	II-19
Tabel	2. 3	Struktur Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2011-2014	II-29
Tabel	2. 4	Tabel Gini Rasio Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	II-32
Tabel	2. 5	Data Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012-2014	II-37
Tabel	2. 6	Tingkat Ketidakterataan (Ketimpangan) Pendapatan Penduduk Lampung Tahun 2010-2014	II-37
Tabel	2. 7	Angka Provinsi Partisipasi Kasar di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013	II-40
Tabel	2. 8	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung	II-41
Tabel	2. 9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Provinsi Lampung	II-43
Tabel	2. 10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Siswa Pendidikan Dasar Provinsi Lampung	II-44
Tabel	2. 11	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Provinsi Lampung	II-45
Tabel	2. 12	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Provinsi Lampung	II-46
Tabel	2. 13	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	II-46
Tabel	2. 14	Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah	II-46
Tabel	2. 15	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Provinsi Lampung	II-48
Tabel	2. 16	Jumlah RS, TT RS dan Rasio TT/Penduduk Provinsi Lampung	II-48
Tabel	2. 17	Kinerja Jalan di Provinsi Lampung 2010 – 2014	II-51
Tabel	2. 18	Desa Rawan Air Menurut Stastus Kekeringan Provinsi Lampung	II-55
Tabel	2. 19	Capaian Program Air Minum Provinsi Lampung	II-55
Tabel	2. 20	Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Lampung sampai tahun 2015	II-56
Tabel	2. 21	Capaian Sektor Sanitasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	II-57
Tabel	2. 22	Daerah Rawan Sanitasi Menurut Tingkat Resiko dan Status Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Lampung	II-58
Tabel	2. 23	Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung Tahun 2014 (Ha)	II-59
Tabel	2. 24	Legalisasi Peraturan Penataan Ruang	II-60

		Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	
Tabel	2. 25	Jumlah Pesawat, Penumpang, Bagasi dan Kargo Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	II-64
Tabel	2. 26	Perkembangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Lampung Tahun 2012-2014	II-66
Tabel	2. 27	Jumlah Kesertaan Ber-KB Provinsi Lampung. Tahun 2013 dan 2014	II-67
Tabel	2. 28	Tahapan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2014	II-68
Tabel	2. 29	Jumlah PMKS se-Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai 2014	II-69
Tabel	2. 30	Penanganan Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) Dan Penyerapan Tenaga Kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2014	II-70
Tabel	2. 31	Total Realisasi Investasi Yang Masuk Ke Provinsi Lampung	II-72
Tabel	2. 32	Jumlah Lapangan Olahraga Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	II-74
Tabel	2. 33	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2013	II-76
Tabel	2. 34	Data Jumlah Media Massa Dan Media Elektronik Pada Tahun 2014	II-76
Tabel	2. 35	Jumlah Koleksi Deposit	II-77
Tabel	2. 36	Jumlah Koleksi Buku	II-77
Tabel	2. 37	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014	II-78
Tabel	2. 38	Progress Kegiatan HKm di Provinsi Lampung	II-82
Tabel	2. 39	Konflik Kawasan Hutan di Provinsi Lampung	II-83
Tabel	2. 40	Data Pengiriman Transmigrasi Dari Provinsi Lampung Ke Kalimantan Dan Sulawesi Tahun 2010 – 2014	II-87
Tabel	3. 1	PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014	III-5
Tabel	3. 2	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-6
Tabel	3. 3	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Th 2009-2014 Menurut Penggunaan ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-7
Tabel	3. 4	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-8
Tabel	3. 5	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2000	III-9
Tabel	3. 6	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Penggunaan ADH Konstan Tahun	III-10

		2000	
Tabel	3. 7	Rasio PMTB Terhadap PDRB dan Perkembangan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	III-11
Tabel	3. 8	PDRB Perkapita Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2010-2014	III-12
Tabel	3. 9	Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-13
Tabel	3. 10	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-15
Tabel	3. 11	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-17
Tabel	3. 12	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)	III-18
Tabel	3. 13	Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi Nasional	III-25
Tabel	3. 14	Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi Provinsi Lampung	III-31
Tabel	3. 15	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2012 s.d Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)	III-43
Tabel	3. 16	Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2015 (Juta Rupiah)	III-50
Tabel	3. 17	Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015	III-53
Tabel	4. 1	Sasaran Makro RKP 2016 dalam RPJMN	IV-11
Tabel	4. 2	Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Provinsi Lampung 2015-2019	IV-20
Tabel	4. 3	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Infrastruktur Tahun 2016	IV-26
Tabel	4. 4	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Investasi Tahun 2016	IV-35
Tabel	4. 5	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Reformasi Birokrasi	IV-37
Tabel	4. 6	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Pertanian	IV-45
Tabel	4. 7	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Kesehatan	IV-55
Tabel	4. 8	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Pendidikan	IV-58
Tabel	4. 9	Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Merespon Program MDGs	IV-61
Tabel	4. 10	Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Mendukung SPM	IV-63
Tabel	5. 1	Urusan Wajib Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani	V-2
Tabel	5. 2	Urusan Pilihan Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani	V-9
Tabel	5. 3	Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah	V-11

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Indeks Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	II-34
Grafik 2. 2	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung Tahun 2011-2013	II-35
Grafik 2. 3	Tingkat Ketidakmerataan (Ketimpangan) Pendapatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	II-38
Grafik 2. 4	Angka Kesembuhan (Cure Rate) TB Paru Provinsi Lampung	II-47
Grafik 2. 5	Jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2009	II-49
Grafik 2. 6	Jumlah Puskesmas Pembantu Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai 2014	II-50
Grafik 2. 7	Target dan Realisasi Jumlah Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Lampung	II-50
Grafik 2. 8	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	II-51
Grafik 2. 9	Kinerja Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014	II-53
Grafik 2. 10	Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Th. 2010 s/d Desember 2014	II-71
Grafik 2. 11	Perkembangan UMKM Tahun 2010 - 2014	II-71
Grafik 2. 12	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	II-78
Grafik 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009–2014	III-8
Grafik 3. 2	PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-12
Grafik 3. 3	Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-14
Grafik 3. 4	TingkatPengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-15
Grafik 3. 5	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-17
Grafik 3. 6	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)	III-19
Grafik 3. 7	Indeks Wiliamson Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2013	III-20
Grafik 3. 8	Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2013	III-21
Grafik 3. 9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia.III–23	III-23
Grafik 3. 10	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Periode 2015-2017	III-32
Grafik 3. 11	Proyeksi Pendapatan perKapita Penduduk Lampung Periode 2015-2017	III-34
Grafik 3. 12	Proyeksi NTP Provinsi Lampung Periode 2015-2017	III-35
Grafik 3. 13	Realisasi Belanja Tak Langsung, Belanja Langsung	III-51

dan Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 (Persen)

DAFTAR ISI

	halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.3 Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	II-5
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-6
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	II-7
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.4 Kondisi Demografi	II-13
2.1.4.1 Jumlah Penduduk	II-13
2.1.4.2 Ketenagakerjaan	II-14
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2013 Dan Realisasi RPJMD	II-15
2.2.1 Avaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah	II-15
2.2.2 Aspek Daya Saing	II-19
2.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-19
2.2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah	II-20
2.2.2.3 Fokus Iklim Investasi	II-22
2.2.2.4 Fokus Sumberdaya Manusia	II-22
2.2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.2.3.1 Fokus Pemerataan Ekonomi Daerah	II-23
2.2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-26
2.2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-31
2.2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-67

BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Lampung	III-5
3.1.2	Kinerja Sosial Ekonomi Provinsi Lampung	III-14
3.1.2.1	Pengangguran	III-14
3.1.2.2	Persentase Penduduk Miskin	III-16
3.1.2.3	Indeks Wiliamson	III-19
3.1.2.4	Indeks Gini	III-21
3.1.2.5	Indeks Pembangunan Manusia	III-22
3.1.3	Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017	III-23
3.1.3.1	Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional dan Global	III-23
3.1.3.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Lampung	III-29
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-41
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-42
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-51
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-51
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-53
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Tinjauan Kebijakan Nasional	IV-1
4.1.1	Visi dan Misi RPJMN 2015-2019	IV-1
4.1.2	Strategi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019	IV-2
4.1.3	Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019	IV-6
4.1.4	Arah Kebijakan Umum RPJMN 2015-2019	IV-7
4.1.5	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Pertama RPJMN 2015-2019	IV-10
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019	IV-12
4.2.1	Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019	IV-12
4.2.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019	IV-19
4.3	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016	IV-23
4.4	Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung	IV-63
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
5.1	Program Prioritas Berdasarkan Urusan	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. 1	Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	I-5
Gambar	2. 1	Kondisi Eksisting Infrastruktur Provinsi Lampung	II-43
Gambar	4. 1	Strategi Pembangunan Nasional	IV-5
Gambar	4. 2	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung	IV-65

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Capaian Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Tahun 2009- 2013 Dan Proyeksi 2014	II-2
Tabel	2.2	Capaian Prioritas Nasional Pendidikan Tahun 2009-2013 Dan Proyeksi	II-3
Tabel	2.3	Capaian Prioritas Nasional kesehatan Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014.	II-11
Tabel	2.4	Capaian Prioritas Nasiona Penanggulangan Kemiskinan Tahun2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-14
Tabel	2.5	Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-20
Tabel	2.6	Capaian Prioritas Nasional Infrastruktur Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-24
Tabel	2.7	Capaian Prioritas Nasional Energi tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun	II-31
Tabel	2.8	Capaian Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tahun 2009-2013 dan Proyeksi tahun 2014	II-33
Tabel	2.9	Capaian Prioritas Nasional Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca Konflik Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-35
Tabel	2.10	Capaian Prioritas Nasional Kebudayaan, kreatifitas, Inovasi dan Teknologi	II-36
Tabel	2.11	Capaian Prioritas Nasional Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-39
Tabel	2.12	Capaian Prioritas Nasional Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-41
Tabel	2.13	Capaian Prioritas Nasional Perekonomian Lainnya Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Tahun 2014	II-44
Tabel	3.1	PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014	III-5
Tabel	3.2	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-6
Tabel	3.3	Distribusi PDRB Provinsi Lampung Th 2009-2014Menurut Penggunaan ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-7
Tabel	3.4	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-8
Tabel	3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2000	III-9
Tabel	3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 Menurut Penggunaan ADH Konstan Tahun 2000	III-10
Tabel	3.7	Rasio PMTB Terhadap PDRB dan Perkembangan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	III-11
Tabel	3.8	PDRB Perkapita Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2010-2014	III-12
Tabel	3.9	Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-13
Tabel	3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-15

Tabel	3. 11	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-17
Tabel	3. 12	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)	III-18
Tabel	3. 13	Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi Nasional	III-25
Tabel	3. 14	Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi Provinsi Lampung	III-31
Tabel	3. 15	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2012 s.d Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)	III-43
Tabel	3. 16	Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2015 (Juta Rupiah)	III-50
Tabel	3. 17	Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015	III-53
Tabel	4. 1	Sasaran Makro RKP 2016 dalam RPJMN	IV-11
Tabel	4. 2	Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Provinsi Lampung 2015-2019	IV-20
Tabel	4. 3	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Infrastruktur Tahun 2016	IV-26
Tabel	4. 4	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Investasi Tahun 2016	IV-35
Tabel	4. 5	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Reformasi Birokrasi	IV-37
Tabel	4. 6	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Pertanian	IV-45
Tabel	4. 7	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Kesehatan	IV-55
Tabel	4. 8	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Bidang Pendidikan	IV-58
Tabel	4. 9	Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Merespon Program MDGs	IV-61
Tabel	4. 10	Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Mendukung SPM	IV-63
Tabel	5. 1	Urusan Wajib Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani	V-2
Tabel	5. 2	Urusan Pilihan Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani	V-9
Tabel	5. 3	Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah	V-11

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2. 1	Indeks Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	II-26
Grafik	2. 2	Indeks Pembangunan ender Provinsi Lampung Tahun 2011-2013	II-28
Grafik	2. 3	Tingkat Ketidakmerataan (Ketimpangan) Pendapatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2014	II-30
Grafik	2. 4	Angka Kesembuhan (Cure Rate) TB Paru Provinsi Lampung	II-38
Grafik	2. 5	Jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2009	II-40
Grafik	2. 6	Jumlah Puskesmas Pembantu Provini Lampung Tahun 2009 Sampai 2014	II-41
Grafik	2. 7	Target dan Realisasi Jumlah Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Lampung	II-41
Grafik	2. 8	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	II-42
Grafik	2. 9	Kinerja Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014	II-44
Grafik	2. 10	Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Th. 2010 s/d Desember 2014	II-60
Grafik	2. 11	Perkembangan UMKM Tahun 2010 - 2014	II-60
Grafik	2. 12	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	II-66
Grafik	3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009–2014	III-8
Grafik	3. 2	PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014ADH Berlaku (Juta Rupiah)	III-12
Grafik	3. 3	Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2014	III-14
Grafik	3. 4	TingkatPengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-15
Grafik	3. 5	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014	III-17
Grafik	3. 6	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribu jiwa)	II-19
Grafik	3. 7	Indeks Wiliamson Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2013	II-20
Grafik	3. 8	Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2009-2013	II-21
Grafik	3. 9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia.III–23	II-23
Grafik	3. 10	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Periode 2015-2017	II-32
Grafik	3. 11	Proyeksi Pendapatan perKapita Penduduk Lampung Periode 2015-2017	II-34
Grafik	3. 12	Proyeksi NTP Provinsi Lampung Periode 2015-2017	II-35
Grafik	3. 13	Realisasi Belanja Tak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 (Persen)	II-51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun ;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) ;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-

masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD ; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan mencermati capaian pembangunan yang diperoleh pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016, yang disajikan dalam Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN 2015-2019 menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergitas capaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 diarahkan pada : Pemantapan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah ; Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional ; Peningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan ; Peningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ; Pemantapan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur ; Dukungan terhadap stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan

perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ; Pengembangan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM ; serta pementapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

1.2 DASAR HUKUM

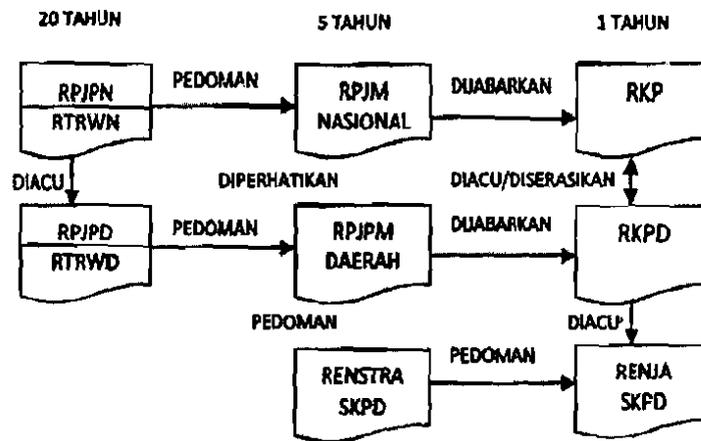
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 - Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1. 1
Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



1.4 Maksud Dan Tujuan

Secara substansi, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang akan dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2015-2019.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah :

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2016.
- 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016

1.5. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang data capaian target pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 serta persandingan pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2015, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2016 dan 2017

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2016

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan

4.2 Prioritas Pembangunan

Menjelaskan prioritas program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2016, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan.

PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang pelaksanaan RKPD Tahun 2016

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada $103^{\circ} 40' - 105^{\circ} 50'$ Bujur Timur; serta antara $6^{\circ} 45' - 3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan.

Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

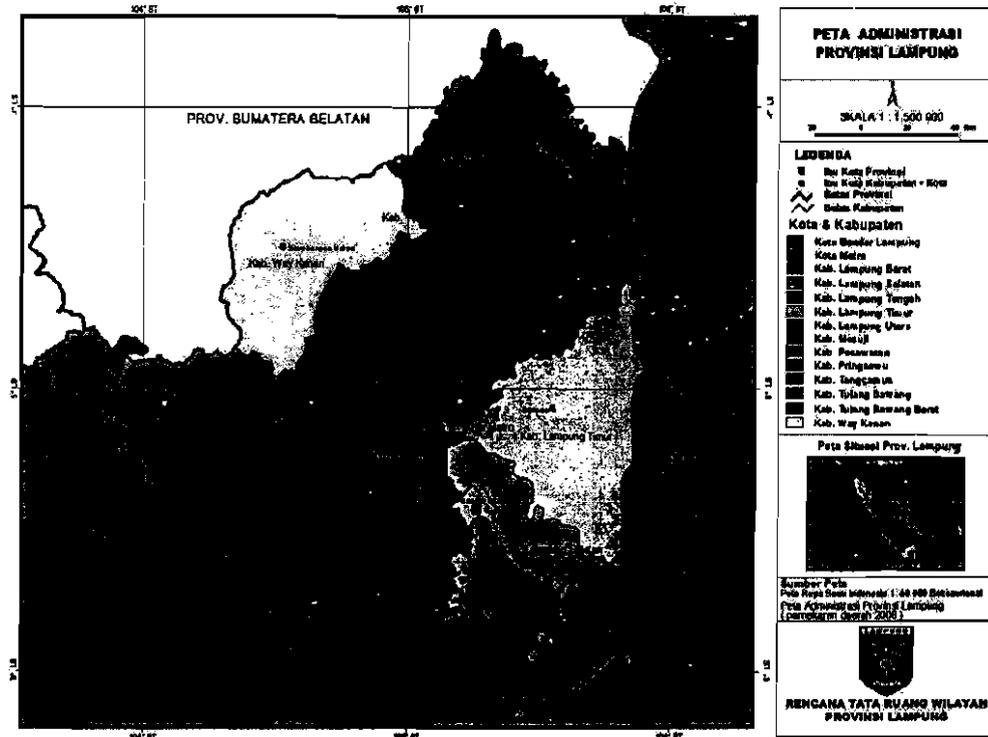
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Provinsi Lampung



2.1.1.2. Kondisi Topografi

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu:

1. Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
2. Daerah Berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter d.p.l. Kawasan ini meliputi wilayah Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter d.p.l., dengan kemiringan 0% hingga 3%.
4. Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter d.p.l.
5. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka, dan Way Jepara.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam *kompleks Gunungkasih (Ptgm)*. Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra - Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batupasir dan batulempung dengan sisipan rijang dan batugamping dikenal dengan nama *Formasi Menanga (Km)*. Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukkan umur bagian tersebut tersingkap di jalur bukit barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik, diterobos oleh batuan *granitoid/batuan terobosan Mosozoik akhir* yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan.

Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai *Formasi Sabu (Tpos)* dan *Formasi Campang (Tpoc)*. Umur kedua formasi ini belum diketahui, berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal. Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih,

kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 -1.500 meter. Diendapkan di lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api. Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250 - 700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan termasuk satuan gunung berapi efusiva.

Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekalkan kuat dipetakan sebagai *Formasi Tarahan (Tpot)*, diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah - Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tuffit. Diendapkan dilingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penunjaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Ditafsirkan sebagai sisa busur gunung api paleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman disepanjang parit sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di jalur Bukit Barisan. Batuan Granit - granodiorit yang menerobos batuan granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 - 34,57 juta tahun (Eosen - Oligosen).

Penunjaman-penunjaman yang terjadi telah menjadikan wilayah Kota Bandar Lampung sebagai area rawan bencana. Sehingga berdasarkan formasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan ruang dimasa yang akan datang. Dengan demikian perlu perencanaan mendalam untuk memanfaatkan ruang yang ada bagi pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah. Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang proses pembangunan yang dilakukan sejalan dengan keadaan wilayah yang rawan dengan bencana.

Perkembangan geologi Tersier selanjutnya di daerah ini menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi - Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut.

Pada jaman Oligosen Akhir - Miosen Tengah di jalur Jambi - Palembang terjadi sedimentasi genang laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh *Formasi Talangakar (Tomt)* yang terdiri dari batupasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batupasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batulempung dan batu

lanau, *Formasi Gading (Tomg)* yang terdiri dari batupasir, batulanau dan batu lempung dengan sisipan batugamping dan lignit, dan *Formasi Baturaja (Tmb)* terdiri dari batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh *Formasi Hulusimpang (Tomh)* terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (*Tmos*) yang terdiri dari perselingan batulempung, batupasir, batulanau, serpih, terkadang gampingan.

Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh *Formasi Airbenakat* (terdapat di luar Provinsi Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh *Formasi Bal (Tmba)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan dan sisipan batupasir dan sedimentasi vulkanik klastik laut dangkal di jalur Bengkulu yang dicerminkan oleh *Formasi Lemau (Tml)* terdiri dari Batupasir tufaan gampingan, batulempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal batugamping, mengandung foraminifera dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir – Pliosen yang membentuk *Formasi Lakitan (Tmpl)* terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik, epalitik sedikit dasitan, tufa dan batupasir tufaan dan menindih secara tak selaras *Formasi Bal*, sedang di jalur Bengkulu terbentuk *Formasi Simpangaur (Tmps)* terdiri dari batupasir tufaan, tufa, batulempung tufaan, batugamping, konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang menindih secara selaras *Formasi Lemau*.

Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi – Palembang diendapkan *Formasi Kasai (Qtk)* yang berlingkungan darat (perselingan batupasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Di jalur Bukit Barisan di endapkan *Formasi Ranau (Qtr)* yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batuapung, dan kayu terkesikkan, dan *Formasi Bintunan (Qtb)* yang terdiri dari batupasir tufaan, tufa pasiran, batulempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh formasi Kasai, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir – Pliosen terlipat

lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi – Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Sumberdaya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah River Basin. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Daerah *River Basin* ini meliputi:

1. Daerah *River Basin* Tulang Bawang terletak di utara hingga ke arah barat, melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan dengan luas *River Basin* 10.150 Km² dan panjang 753,5 Km dengan 9 cabang anak sungai membentuk pola aliran dendritic yang merupakan ciri umum sungai-sungai di Lampung. Kepadatan (*density*) pola aliran sebesar 0,07 dan frekuensi pola aliran 0,0009.
2. Daerah *River Basin* Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian barat Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas *River Basin* 7.550 Km², panjang 965 Km, memiliki 14 cabang sungai, density pola aliran 0,13 dan frekuensi pola aliran 0,0019.
3. Daerah *River Basin* Sekampung terletak di sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara, hingga ke arah timur. Luas *River Basin* ini mencapai 5.675 Km² dengan panjang 623 Km dan memiliki 12 cabang sungai. Pola aliran mencapai kepadatan 0,11 dan frekuensinya mencapai 0,021.
4. Daerah *River Basin* Semangka terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus bagian selatan dan barat ke arah pantai Selat Sunda bagian barat. Luas *River Basin* ini 1.525 Km² dengan panjang 189 Km, memiliki 8 cabang sungai, kepadatan (*density*) pola aliran 0,12 dan frekuensi pola aliran 0,0052.
5. Daerah *River Basin* Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas 800 Km², dan panjang sungai mencapai 108,5 Km, memiliki 3

cabang sungai, pola aliran dengan kepadatan (density) 0,14 serta frekuensi 0,0038.

Secara hidrogeologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro - Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Gedong Meneng dan cekungan air tanah danau ranau. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu:

- a. Zona Aman Potensi Tinggi (*ZONA I*)
- b. Zona Aman Potensi Sedang (*ZONA II*)
- c. Zona Aman Potensi Kecil (*ZONA III*)
- d. Zona Imbuh / Resapan (*ZONA IV*)
- e. Zona Bukan CAT

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung terletak di bawah katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 260C - 280C, dengan suhu maksimum sebesar 330C dan minimum sebesar 200C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.
- b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya hingga tahun 2029 adalah 687,37 Km²
- d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten

Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan rawan bencana adalah 4.411,04 Km²

- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah 355,83 Km²
- f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memiliki produktivitas optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian.
2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan kecenderungan perkembangan hingga tahun

2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah.

3. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik dan peternakan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Pola ruang Provinsi Lampung meliputi:

- a. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Beberapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;
- b. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
 1. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.
 2. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan

perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.

3. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
4. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan).
5. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

6. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.
- c. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut:
 - Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
 - Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
 - Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
 - Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
 - Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
 - Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
 - Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
 - d. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:
 - Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Lampung Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupate Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

- Arahan rencana tanaman pangan lahan kering.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.

- Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah.

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

- Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan).

Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.

- Arahan rencana kawasan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur.

- Arahan Rencana Kawasan Industri

Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

- **Arahan rencana Kawasan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

- **Arahan rencana Kawasan Permukiman**

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman.

Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik.

2.1.4 Kondisi Demografi

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 7.596.115 jiwa. Bila dibandingkan dengan data hasil sensus 2000 yang tercatat sebesar 6.730.751 jiwa, maka dalam kurun waktu 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung bertambah sebesar 13,42 persen dengan

laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,24 persen. Jumlah Penduduk tersebut meningkat kembali menjadi 8.026.191 jiwa tahun 2014.

Dilihat dari distribusi antar Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya saling berdampingan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 1 227 185 orang, 998 720 orang, dan 961 897 orang. Ini berarti hampir 40% dari total penduduk Provinsi Lampung bermukim di tiga kabupaten tersebut. Sebaran penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Sebaran Penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun
2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Lampung Barat	278 189	281 409	284 492	287 588	290 388
02 Tanggamus	538 418	545 909	553 165	560 322	567 172
03 Lampung Selatan	915 463	927 629	939 390	950 844	961 897
04 Lampung Timur	954 694	966 313	977 537	988 277	998 720
05 Lampung Tengah	1 174 534	1 188 316	1 201 689	1 214 720	1 227 185
06 Lampung Utara	585 973	590 596	594 881	598 924	602 727
07 Way Kanan	407 525	412 897	418 121	423 195	428 097
08 Tulang Bawang	399 291	405 574	411 705	417 782	423 710
09 Pesawaran	400 208	405 711	411 077	416 372	421 497
10 Pringsewu	366 615	370 886	375 098	379 190	383 101
11 Mesuji	188 030	189 673	191 314	192 759	194 282
12 Tulang Bawang Barat	251 489	254 278	257 136	259 674	262 316
13 Pesisir Barat	142 228	143 815	145 411	146 929	148 412
71 Bandar Lampung	885 363	904 322	923 175	942 039	960 695

72	Metro	145 985	148 586	151 117	153 517	155 992
sumber : BPS Provinsi Lampung						

2.1.4.2. Ketenagakerjaan

Secara relatif angka pengangguran Lampung menunjukkan penurunan dari 4,79 persen pada Agustus 2014 menjadi 3,44 persen pada bulan Februari 2015. Bila dibandingkan dengan Februari 2014 (5,08 persen), angka pengangguran turun 1,65 poin. Angka pengangguran Lampung ini masih di bawah angka pengangguran nasional. Pada Februari 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 5,81 persen. Jika dicermati angka ini melanjutkan tren penurunan dari 5,82 persen pada Februari 2013.

Dilihat perbandingan kota-desa, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan (urban area). Sebanyak 5,07 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 70 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (rural area) tingkat pengangguran "hanya" 2,45 persen atau 69,5 ribu orang. Dibandingkan setahun yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan berkurang sebanyak 23,1 ribu. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan turun 42,2 ribu. Fenomena ini diduga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas sektor pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa.

Sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk yaitu sekitar 47,12 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Selama periode setahun terakhir jumlah pekerja konstruksi mengalami kenaikan sebanyak 70 ribu pekerja. Diikuti sektor industri dan transportasi, pergudangan & komunikasi masing-masing sebanyak 58,7 ribu dan 13,6 ribu pekerja. Sektor yang paling banyak mengalami drop out tenaga kerja adalah perdagangan, rumah makan & jasa akomodasi sebanyak 31,8 ribu pekerja.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2013 Dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun (*benchmark*) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Kinerja pembangunan Provinsi Lampung tahun 2014 diukur menurut 3 aspek pembangunan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

Tabel 2. 2
Kinerja pembangunan Provinsi Lampung tahun 2014

No	Kategori	Kondisi	Kondisi			Kondisi
			Target	Capaian	Realisasi	
			(%)	(%)	(%)	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,					

No	Kategori	Indikator	Tahun			Target
			2018	2019	2020	
	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
a	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,97%	6,00-6,35%	6,35-6,50%	7,00-7,50%	
b	Indeks Gini	0.282	0.244	0,19 – 0,20	0,18 – 0,19	
c	PDRB per kapita (Konstan)	6.890	7.090	7.106	7.106 – 7.500	
2.	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1.	Pendidikan					
a	Angka Melek Huruf	95.13	96	96,5	98	
b	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,44	7,50	7,55	7,70	
c	Angka Partisipasi Murni					
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,79	95	96	100	
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,64	74	75	78	
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	60	62	64	70	
d	Angka Partisipasi Kasar					
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	106,84	108	110	116	
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	93,23	94	95	98	
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	69,60	70	72	78	
2.2.	Kesehatan					
a	Angka Harapan Hidup	70,05	70,5	71,0	71,9	
b	AKB (/1.000 KH)	113/100 rb KH	112/100 rb KH	111/100 rb KH	110/100 rb KH	
c	AKI (/100.000 KH)	178	165 - 170	163 - 165	155 - 160	
d	Angka Kematian Balita	156 kasus	150	145	130	
e	Prevalensi Gizi Buruk	350	345	340	325	

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Fokus Layanan Urusan Wajib				
	Pendidikan Dasar				
	Angka Partisipasi Sekolah	94,31	94,50	95,00	95,9
	Pendidikan Menengah				
	Angka Partisipasi Sekolah	59,80	59,95	60,00	60,95
	Kesehatan				
	Rasio Puskesmas	3,79	3,80	3,82	3,89
	Anggaran Obat perkapita	8.051	10.500	11.000	12.500
	Rasio Dokter per 100 rb pddk	12	13	14	17
	Pekerjaan Umum				
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Tingkat Kemantapan Jalan)	60,00	65,00	70,00	85,00
	Ketenagakerjaan				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,27	66,37	66,47	66,77
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
a	Pertumbuhan ekonomi	5,97%	6,00-6,35%	6,35-6,50%	7,00-7,50%
b	Tingkat Inflasi (%)	7,56	7,18	6,99	4,75
c	Kemiskinan	14,35	12,86	11,86	9,86
c	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (skala 1-4)	N/A	N/A	2	3
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan				
	Pertanian				
a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	35,92	35,25	35,80	35,63

No	ASPEK/ FOKUS/ PIRINDUK URUSAN/ INDIKATOR REVISI (KONTRIBUSI TERHADAP PDRB) DAERAH	Kontribusi			Nilai (Rp)
		Kontribusi (Rp)	Perdagangan Tahun 20	Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	5,90	6,20	6,50	7,53
C	Nilai Tukar Petani (NTP)	124,53	125,64	124,5	125,65
	Kehutanan				
a	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,47	0,49	0,52	0,63
	Energi dan Sumber Daya Mineral				
a	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,96	2,06	2,16	2,63
	Pariwisata				
a	Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB	1,34	1,41	1,48	1,80
	Kelautan dan Perikanan				
a	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	7,37	7,74	8,13	9,88
b	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	112,00	113,72	113,86	114,29
	Perdagangan				
a	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,67	16,45	17,28	21,00
b	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	21,17%	23,87	25,62	34,1
	Perindustrian				
a	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	15,55	16,33	17,14	20,84
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				

No	Aspek / Pokus / Bidang URUSAN/ANALISIS/UTUK KINERJA/SP/RELEVAN/INDIKATOR DAERAH	Rencana			Rencana
		2019	2020	2021	2022
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian				
a	Daya beli masyarakat/PPP (Rp.000)	517.710	543.60	570.78	693.78
b	Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)	283.870	298.064	312.967	380.413
c	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan (Rp.)	233.840	245.532	257.809	313.368
d	Laju Pertumbuhan Investasi (Pemberntukan Modal Tetap Bruto/PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku	9,04	9,94	10,94	14,56
e	Pertumbuhan PAD (%)	21,5	22,5	23,00	24,5
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
a	Kondisi Jalan Negara (%)	83,02	85,50	87,25	95,25
b	Kondisi Jalan Provinsi (%)	60,72	65,72	70,72	85,72
	Lingkungan Hidup				
a	Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar	D	D	C	B
b	Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik	N/A	N/A	27 – 30 hari baik/tahun	32 – 35 hari baik/tahun
c	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Lampung	28,00	29,00	29,00 – 30,00	34,00 – 35,00
d	Rasio elektrifikasi Perdesaan	100,00	100,00	100,00	100,00
e	Rasio elektrifikasi rumah tangga	72	74,16	76,38	83,47
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,				

No	ASPEK / FOKUS / KATEGORI URUSAN / MANAJEMEN KINERJA DAN PANGKALAN DAERAH	Kemadya	Kemadya		Kemadya
		Kemadya Kategori Kategori	Kemadya	Kemadya	Kemadya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian				
a	Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk	0,38	0,38	0,36	0,30
b	Tingkat Partisipasi Pemilih	70,00	70,00 – 73,00	73,00 – 75,00	> 78%
4	Sumber Daya Manusia				
a	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,45	73,17	73,88	76,03
	Ketenagakerjaan				
a	Rasio ketergantungan	54,19	52,55	46,51	46,75
b	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,23	1,23 – 1,33	1,33 – 1,43	1,63 – 1,73
c	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,69	5,18	4,56	3,11
d	Indeks Pembangunan Gender	65,86	65,86 – 66,00	66,00 – 68,00	70,00 – 70,50
e	Indeks Pemberdayaan Gender	63,5	63,50 – 64,50	64,50 – 66,50	68,50 – 69,00

2.2.2 Aspek Daya Saing

2.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.2.2.1.1 PDRB dan PDRB Perkapita

Perekonomian Provinsi Lampung secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2014, perekonomian Provinsi Lampung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 231,008 triliun atau meningkat sebesar Rp. 26,608 Triliun dari PDRB tahun 2013 yang sebesar Rp. 204,40 Triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Provinsi Lampung meningkat dari Rp.

180,636 Triliun menjadi Rp. 189,809 Triliun. Peningkatan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,019 triliun dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 59,636 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (32,69 persen); Industri Pengolahan (18,03 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,01 persen).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp. 60,923 triliun meningkat jika dibandingkan triwulan I-2014 yang sebesar Rp. 56,115 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010, PDRB Provinsi Lampung triwulan I-2015 mencapai Rp. 48,616 triliun mengalami peningkatan dibanding triwulan I-2014 yang sebesar Rp. 46,340 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2015 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (35,13 persen); Industri Pengolahan (18,29 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,37 persen).

Peningkatan nilai PDRB Provinsi Lampung ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB per kapita belum mampu menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, PDRB per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi rata-rata PDRB per kapita suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita Provinsi Lampung tahun 2014 mencapai Rp 28,78 juta, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp. 25,77 juta.

2.2.2.1.2 Ekspor dan Impor

Pada triwulan III-2014, ekspor dan impor di wilayah Lampung tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 34,8 persen (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan II-2014 yang tumbuh 12,9 persen (yoy). Sejalan dengan ekspor, impor juga

mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,4 persen menjadi 49,1 persen. Secara total, ekspor Provinsi Lampung tahun 2014 US\$ 3.895,78 juta. Untuk total impor tahun 2014 mencapai US\$ 3.440,5 juta. Oleh karena itu, kondisi neraca perdagangan tercatat surplus sebesar US\$ 455,3 juta di tahun 2014.

Perkembangan ekspor pada triwulan I-2015 tumbuh 11,58 persen, tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 11,22 persen. Meningkatnya kinerja ekspor selain didorong oleh meningkatnya perdagangan antar daerah juga didorong oleh membaiknya ekspor luar negeri karena meningkatnya permintaan dari negara tujuan dan meningkatnya harga komoditas global. Sementara itu, impor triwulan I-2015 mengalami perlambatan yaitu tumbuh 10,84 persen lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,39 persen. Melihat kondisi ekspor dan impor pada triwulan I-2015, neraca perdagangan Provinsi Lampung masih mengalami surplus sebesar USD134,0 juta.

Terkait impor, dalam rangka melindungi pengusaha lokal dan mengendalikan impor di Provinsi Lampung, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Provinsi Lampung, yang berlaku efektif per Januari 2015.

2.2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah

2.2.2.2.1 Perkembangan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur merupakan unsur utama dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu penggerak ekonomi utama bagi suatu wilayah. Keterkaitan dan kelancaran perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dapat terhubung dengan adanya jalan.

Demi mendukung perkembangan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari dana pembangunan infrastruktur jalan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Panjang serta Bandara Radin Inten II.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dengan tingkat arus lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya terlebih pada hari-hari besar atau hari libur yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas sampai kepada kemacetan di penyeberangan khususnya kemacetan pada wilayah Bakauheni dan Merak. Salah satu alternatif mengatasi permasalahan ini adalah melalui pembangunan jalan toll Lampung. Rencana Pembangunan jalan Toll telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Status Jalan Nasional di Provinsi Lampung. Jalan Tol Lampung dengan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang ±250 km direncanakan melalui Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Pada tahun 2015 dimulai pelaksanaan pembebasan lahan jalan Tol pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan pada tanggal 30 April 2015 telah dilakukan *Ground Breaking* Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar oleh Presiden Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut Bapak Presiden menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan ground breaking yang pelaksanaannya hanya 5 bulan, lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden, yaitu 6 (enam) bulan. Pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar - Batas Sumatera Selatan saat ini sedang dalam tahapan AMDAL dengan pemrakarsa Konsorsium Dong II-Dong Nam.

Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan Bakauheni juga dilakukan melalui: (a) Penambahan jumlah kapal dari 44 unit (2013) menjadi 52 unit (2014); (b) Pembangunan Dermaga 6 dan percepatan penyelesaian rehab dermaga 4. Ditargetkan di Pelabuhan Bakauheni akan dibangun sampai 10 dermaga; dan (c) Perbaikan manajemen di Pelabuhan Bakauheni.

Selain penyeberangan Bakauheni, selama kurun 2013-2014 dilaksanakan pembangunan dermaga di Kabupaten Mesuji (Dermaga Sungai Sindang dan

Dermaga Wiralaga), sehingga dapat dioperasikan pada tahun 2015 untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi beban jalan dan mengoptimalkan angkutan perairan.

Dalam Kebijakan Pembangunan Tol Laut Nasional, telah ditetapkan 24 Pelabuhan Utama dan 163 Pelabuhan Feeder. Di Provinsi Lampung terdapat 1 Pelabuhan Utama (Pelabuhan Panjang) dan 3 Pelabuhan Feeder, yaitu Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Sebalang dan Pelabuhan Batu Balai.

Terkait percepatan implementasi kebijakan Tol Laut, Menteri Perhubungan RI berkesempatan meresmikan beroperasinya Kapal Ro-Ro pertama (KM Mutiara Persada 3) dengan jurusan Panjang - Tanjung Perak (Surabaya) sebagai entitas Tol Laut Nasional pada Tanggal 6 Mei 2015 di Pelabuhan Panjang - Lampung. Selanjutnya kapal tersebut akan berlayar setiap 4 (empat) hari sekali dari Pelabuhan Panjang.

Penanganan 3 (tiga) pelabuhan feeder diantaranya:

- a. Pelabuhan Batu Balai, berupa pembangunan dermaga dengan lebar 10,15 meter yang sampai akhir 2014 telah mencapai panjang 70 meter.
- b. Pelabuhan Pulau Sebesi, berupa pembangunan trestel dengan progres sampai akhir 2014 mencapai panjang 16 meter dengan lebar 6 m serta pemancangan dermaga tahap I (9 titik).
- c. Pelabuhan Sebalang, berupa pembangunan trestel dengan progres sampai akhir 2014 mencapai panjang 31 meter dengan lebar 9,5 m.

Disamping itu upaya untuk meningkatkan pelayanan di Bandara Radin Inten II terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen pengguna angkutan udara. Dengan perbaikan pelayanan dan pembukaan rute penerbangan baru diharapkan akan meningkatkan jumlah penumpang masuk dan keluar Lampung.

2.2.2.3 Fokus Iklim Investasi

2.2.2.3.1 Perkembangan PTSP

2.2.2.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.2.2.4.1 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat menonjol dalam proses pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu menyetengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk dapat mengerti masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyerapan tenaga kerja. Beberapa indikator utama yang sering dijadikan sebagai patokan keberhasilan yaitu penanganan pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan penyerapan tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Struktur Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2011-2014

Uraian	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	3.598.090	3.709.599	3.681.084	3.857.936
Bekerja	3.368.486	3.516.856	3.471.602	3.673.158
Pengangguran	229.604	192.743	209.482	184.778
TPT	6,38	5,20	5,69	4,79
TPAK	65,27	66,30	64,84	66,99

Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2011 - 2014 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Lampung dari 3.598.090 orang pada tahun 2011 menjadi 2.857.936 orang pada tahun 2014. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja ini sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja pada tahun 2011 sebesar 3.368.486 orang menjadi 3.673.158 orang pada tahun 2014. Peningkatan ini

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terserap sebagai pekerja di berbagai sektor.

Meningkatnya penduduk bekerja diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2011 jumlah pengangguran mencapai 229.604 orang atau 6,38 persen lalu mengalami penurunan menjadi 184.778 orang atau 4,79 persen pada tahun 2014.

2.2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.3.1 Fokus Pemertaan Ekonomi Daerah

2.2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan laju capaian nilai tambah riil daerah yang menggambarkan kemajuan perekonomian yang dihasilkan. Di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional, ekonomi Provinsi Lampung tahun 2014 tumbuh sebesar 5,08 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen dan rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,66 persen.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,07 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,84 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,78 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 6,57 persen.

Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan I-2015 dibandingkan Triwulan I-2014 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,01 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 12,38 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 12,18 persen. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,84 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan

sumbangan 0,66 % dari total pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I.

Jika dibandingkan triwulan IV-2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2015 (q-to-q) sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi provinsi se-wilayah Sumatera yang tumbuh rata-rata sebesar 0,03 persen. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan triwulan I-2015 terhadap Triwulan IV Tahun 2014 sebesar 38,74 persen.

2.2.3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 8,36 persen setara dengan inflasi Nasional. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yang tercatat 7,56 persen. Namun demikian, secara nasional khusus di daerah-daerah penghitungan inflasi mengalami kondisi yang seragam yakni peningkatan inflasi secara signifikan terkait depresiasi Rupiah serta kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG.

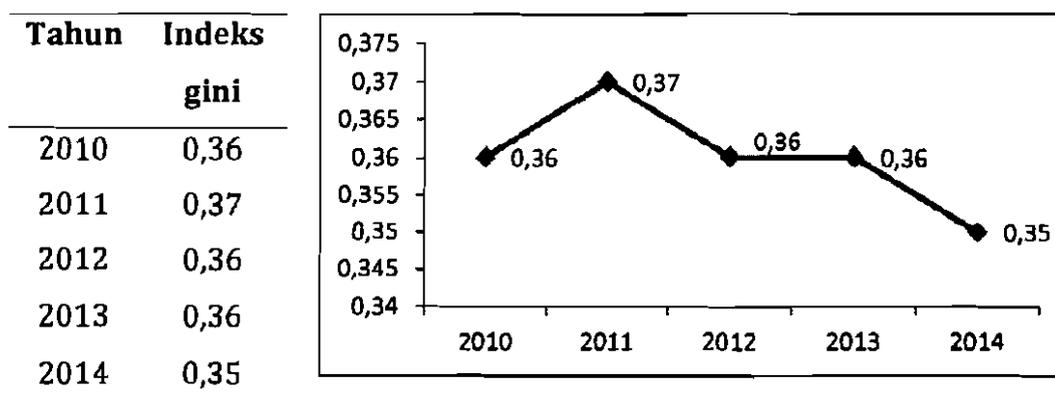
Pada triwulan I tahun 2015, inflasi mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV tahun 2014 dari sebesar 8,06 persen (yoy) menjadi 6,64 persen (yoy). Diharapkan inflasi hingga akhir tahun 2015 tetap terkendali sehingga masih berada pada kisaran sasaran Inflasi Provinsi Lampung sebesar 4 ± 1 persen. Berbagai upaya pengendalian inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota diyakini mampu membawa pergerakan inflasi ke level yang rendah dan stabil. Bentuk nyata yang dilakukan diantaranya adalah penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dimana Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan bahan pangan dan juga perbaikan infrastruktur dalam mendukung proses distribusi barang.

2.2.3.1.3 Gini Rasio

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Penghitungan Indeks Gini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Tabel 2. 4

Tabel Gini Rasio Provinsi Lampung Tahun 2010-2014



Secara umum distribusi pengeluaran di Lampung lebih merata dibandingkan nasional baik dari Kriteria Bank Dunia maupun besaran Gini Rasio. Pada lapisan 40% penduduk ekonomi terbawah ternyata memiliki share distribusi pengeluaran sebesar 20,75 persen. Sedangkan pada tingkat nasional pada kelompok penduduk pada level ekonomi yang sama hanya memiliki share 16,48 persen. Dan pada penduduk high class (20% teratas) share distribusi pengeluaran nasional sangat dominan yakni 48,69 persen sedangkan di Lampung 42,03 persen. Menurut Kriteria Bank Dunia Share distribusi pengeluaran 12 persen ke bawah pada level penduduk 40% terbawah menunjukkan ketimpangan tinggi. Ketimpangan pengeluaran yang lebih rendah di Lampung dibandingkan nasional juga ditunjukkan dengan Gini Rasio dimana pada September 2014 angka Lampung sebesar 0,3312, sementara angka nasional sebesar 0,4141 Perkembangan antar waktu pada periode September 2013-September 2014 menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang semakin

rendah (semakin merata) di Lampung dan berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang ketimpangannya semakin tinggi.

Berdasarkan angka Indeks Gini ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk antar kelompok pengeluaran di Provinsi Lampung masih tergolong rendah dan pola distribusi pengeluaran penduduk membaik.

2.2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

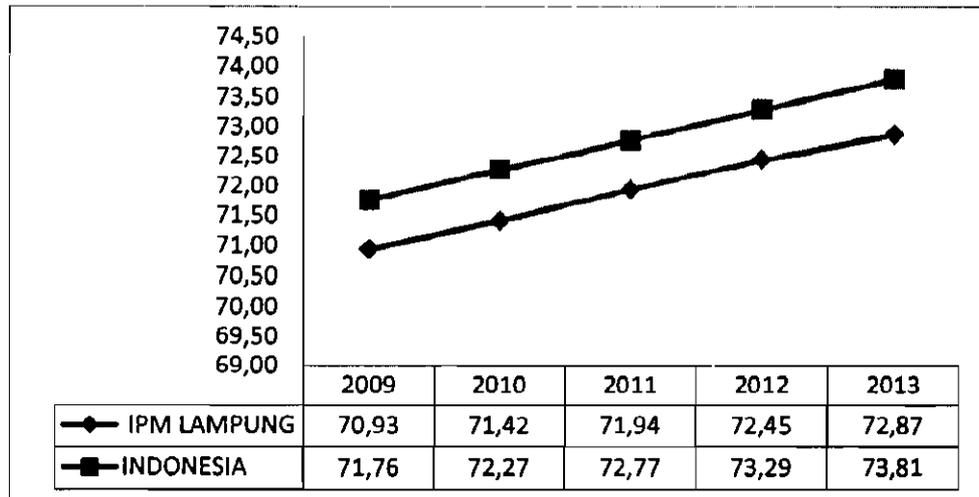
2.2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran kualitas hidup yang dapat dipergunakan untuk membandingkan kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia, karena ukuran ini dapat melihat keterbandingannya baik antarwilayah maupun antarwaktu. Angka IPM kurang memiliki makna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau daerah lainnya sehingga akan dapat diketahui posisi pembangunan manusia baik antarwaktu maupun antardaerah.

Usaha Pemerintah Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia selama periode 2009-2013 dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari angka IPM yang selalu meningkat sepanjang periode tersebut seperti tampak pada gambar berikut:

Grafik 2. 1

Indeks Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013



Tahun 2013 angka IPM Lampung mencapai 72,87 artinya status pembangunan manusia di Provinsi Lampung menurut UNDP masuk dalam golongan menengah ke atas. Nilai IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012, meskipun peningkatannya relatif kecil dari 72,45 pada 2012 menjadi 72,87 pada 2013. Sayangnya, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka IPM Lampung masih berada di bawah nasional. Hal ini disebabkan titik awal (*starting point*) IPM Lampung berada di bawah nasional.

2.2.3.2.2 Indeks Pembangunan Gender

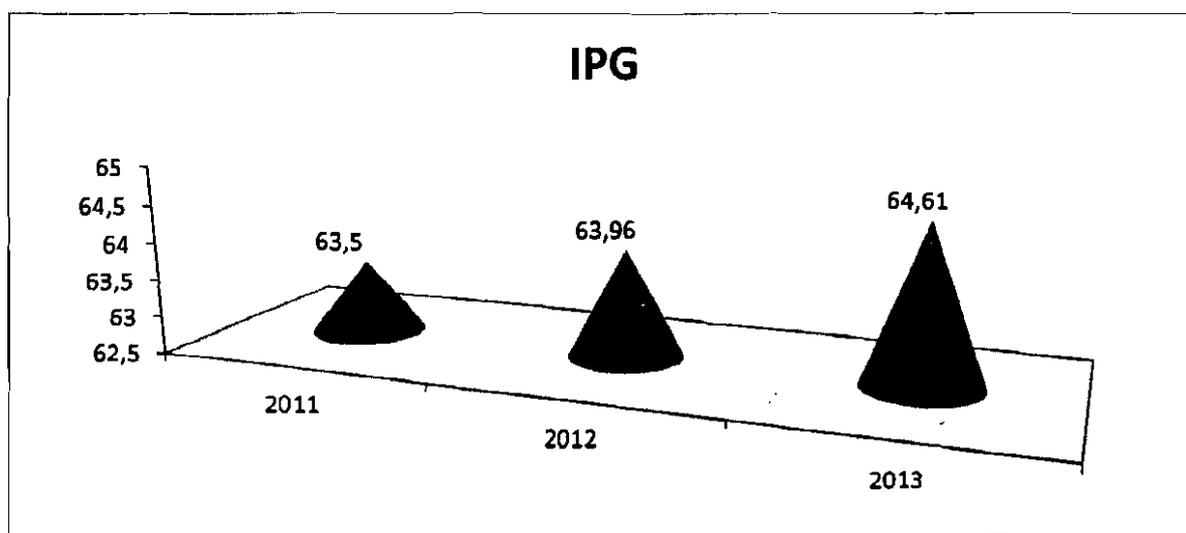
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen: pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita dan didekati dengan pengeluaran per kapita), pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan angka melek huruf). IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian pembangunan yang lebih baik pula.

Walaupun dengan menggunakan IPM akan dapat dilakukan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini tidak mampu

mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi perhatian global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya. Jadi, dengan menggunakan IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula.

Grafik 2. 2

Indek Pembangunan Gender Provinsi Lampung Tahun 2011-2013



Gambar di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender Provinsi Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan lebih dari satu persen yaitu dari 63,5 menjadi 63,96 pada tahun 2012. Sayangnya pada tahun berikutnya peningkatan IPG Lampung hanya mencapai 0,65 persen yaitu menjadi 64,61.

2.2.3.2.3 Tingkat Kemiskinan Daerah

Angka kemiskinan Lampung pada September 2014 sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2014 yakni dari 14,28 persen menjadi 14,21

persen. Secara absolut jumlah penduduk miskin sedikit bertambah menjadi 1.143,93 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2014 yang sebesar 1.142,92 ribu orang. Penurunan angka kemiskinan yang dialami Provinsi Lampung merupakan lanjutan dari tren yang terjadi sejak 2009 dengan rata-rata penurunan angka kemiskinan pertahun sekitar 1,19 persen. Penurunan ini juga sejalan dengan tren perkembangan tingkat kemiskinan pada tingkat nasional tetapi dengan tingkat kecepatan penurunan yang lebih cepat di Provinsi Lampung. Hal ini terlihat dari gap antara grafik angka kemiskinan nasional dengan Lampung yang semakin sempit, bahkan di Maret 2014 semakin lebih sempit lagi dikarenakan angka kemiskinan nasional yang sedikit meningkat dari semester sebelumnya.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode Maret 2014–September 2014, garis kemiskinan naik Rp. 12.222,- atau 3,99 persen, yaitu dari Rp 306.600,- per kapita per bulan menjadi Rp 318.822,- per kapita per bulan. Terjadinya peningkatan nilai Garis Kemiskinan, mengakibatkan di perdesaan tingkat kemiskinan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan tidak mampu mengimbangi tingginya kenaikan harga.

Selama periode Maret 2014–September 2014, garis kemiskinan naik Rp. 12.222,- atau 3,99 persen, yaitu dari Rp 306.600,- per kapita per bulan menjadi Rp 318.822,- per kapita per bulan. Terjadinya peningkatan nilai Garis Kemiskinan, mengakibatkan di perdesaan tingkat kemiskinan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan tidak mampu mengimbangi tingginya kenaikan harga.

Tabel 2. 5
ata Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun
2012-2014

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Perkotaan	283.048	310.464	336.927	241,10 (12,00%)	235,47 (11,59%)	230,63 (11,08%)
Perdesaan	236.735	265.105	295.931	1.023,39 (17,63%)	939,88 (15,99%)	912,28 (15,41%)
Perkotaan + Perdesaan	248.645	276.759	306.600	1.264,48 (16,18%)	1.175,35 (14,86%)	1.142,92 (14,28%)

2.2.3.2.4 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

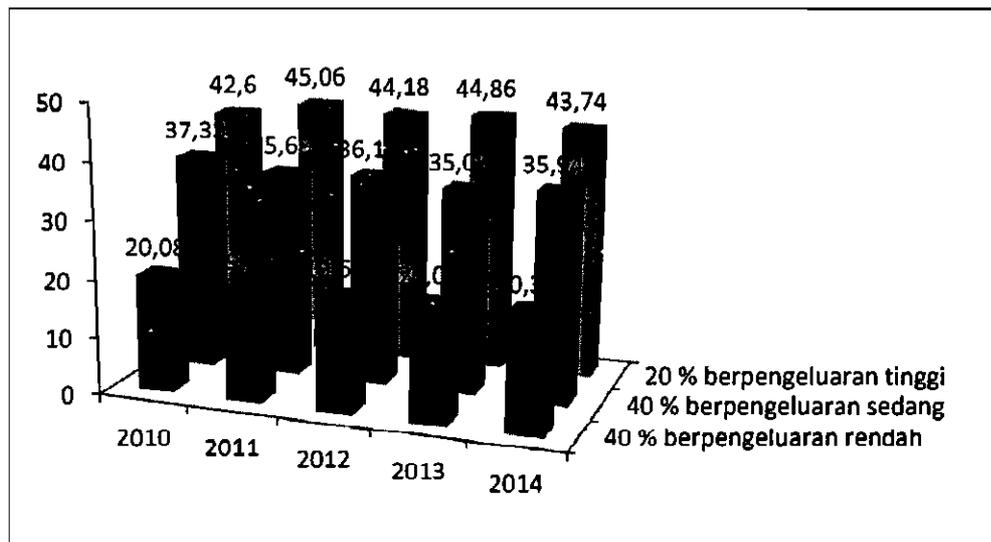
Tabel 2. 6
Tingkat Ketidakmerataan (Ketimpangan) Pendapatan Penduduk Provinsi
Lampung Tahun 2010-2014

Tahun	40 % berpengeluaran rendah	40 % berpengeluaran sedang	20 % berpengeluaran tinggi
2010	20,08	37,33	42,60
2011	19,27	35,68	45,06
2012	19,65	36,17	44,18
2013	20,09	35,05	44,86
2014	20,32	35,94	43,74

Perkembangan disparitas pendapatan versi bank dunia jika dilihat dalam bentuk gambar yaitu:

Grafik 2. 3

Tingkat Ketidakmerataan (Ketimpangan) Pendapatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010-2014



Pada tahun 2014 terlihat bahwa 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 20,32 persen dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

Membandingkan antara tahun 2013 dan 2014 terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran terendah mengalami kenaikan yaitu dari 20,09 persen menjadi 20,32 persen, begitu pula penduduk yang termasuk 40 persen berpengeluaran sedang mengalami kenaikan yaitu dari 35,05 persen menjadi 35,94 persen. Sedangkan pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi penurunan persentase yaitu dari 44,86 persen menjadi 43,74 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk secara umum tahun 2014 cenderung membaik dibandingkan dengan tahun 2013.

2.2.3.2.5 Daerah Tertinggal

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar untuk menentukan daerah tertinggal yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas, dan (6) karakteristik daerah. Sejalan dengan tahapan yang hendak ditempuh oleh pemerintah, perlu adanya kerja sama antarpemangku kepentingan untuk membuka simpul-simpul akses yang menyebabkan ketertinggalan wilayah-wilayah di Provinsi Lampung. Pembukaan pintu akses ini sudah seharusnya dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar, terutama bagi daerah tertinggal. Oleh karena itu dukungan konsep yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KL perlu untuk disinergikan dan disinkronkan dengan sasaran yang akan dicapai oleh KPDT.

Sesuai kriteria tersebut, di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yaitu: Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Meskipun dilihat dari data kemiskinan Kabupaten Lampung Barat (termasuk Kabupaten Pesisir Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat) persentasenya lebih kecil dibanding rata-rata provinsi yaitu 13,92 persen, namun beberapa kriteria daerah tertinggal seperti aksesibilitas dan karakteristik daerah memberikan kontribusi besar dalam penentuan daerah tertinggal. Penyebabnya adalah wilayah rawan bencana dan topografi yang berbukit-bukit sehingga sulit diakses.

2.2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.2.4.1.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2013. Keberhasilan ini bisa dilihat pada peningkatan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini

bisa dilihat pada peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,75 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,89 tahun pada tahun 2013. Meskipun tidak signifikan namun peningkatan ini menunjukkan bahwa kesempatan sekolah penduduk semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya bersekolah, perlu terus disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud sumber daya manusia yang berkualitas.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan dari 94,64 persen pada tahun 2010 menjadi 95,92 persen. Pada tahun 2013 seluruh kabupaten/kota telah berhasil mencapai angka di atas 93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Buta Huruf (ABH) kurang dari 7 persen, bahkan Kota Bandar Lampung ABH hanya 1,22 persen pada tahun 2013. Hasil ini tidak terlepas dari upaya-upaya positif pemerintah daerah dalam menuntaskan buta aksara. Secara umum angka literasi Provinsi Lampung pada tahun 2014 mencapai 94,7%.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemertaan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel 2. 7

Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Lampung Tahun 2011-2013

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2011	2012	2013
SD	Laki-Laki + Perempuan	104,02	106,57	110,73
	Laki-laki	105,55	107,10	112,54
	Perempuan	102,42	106,22	108,97
SLTP	Laki-Laki + Perempuan	89,25	93,41	85,47
	Laki-laki	84,95	90,67	82,81

	Perempuan	93,86	96,23	88,51
SMA	Laki-Laki + Perempuan	61,76	62,23	63,81
	Laki-laki	56,89	59,16	62,44
	Perempuan	67,16	65,09	65,24

Tabel memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 110,73 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD lebih dari 100 persen karena terdapat anak yang belum mencukupi umur (usia dibawah 7 tahun) sudah bersekolah SD atau anak yang melebihi umur yang seharusnya (usia lebih dari 12 tahun) masih duduk di bangku SD. Berdasarkan jenis kelamin, APK laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APK perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APK laki-laki lebih rendah dibanding APK perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APK, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bisa dilihat pada nilai Angka Partisipasi Murni (APM). Data berikut menunjukkan capaian APM Provinsi Lampung:

Tabel 2. 8
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2011	2012	2013
SD	Laki-Laki + Perempuan	91,63	93,50	97,41
	Laki-laki	93,10	93,55	97,49
	Perempuan	90,09	93,46	97,32
SLTP	Laki-Laki + Perempuan	67,06	72,08	74,96
	Laki-laki	64,31	69,52	71,40
	Perempuan	70,01	74,71	79,02
SMA	Laki-Laki + Perempuan	46,05	46,14	53,48
	Laki-laki	40,98	44,54	52,81
	Perempuan	51,67	47,86	54,18

Tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013, anak yang bersekolah pada jenjang SD sebesar 97,41 persen artinya partisipasi dan akses penduduk bersekolah SD sesuai dengan kelompok umur yang direkomendasikan (7-12 tahun) atau bersekolah tepat waktu sebesar 97,41 persen. Demikian halnya dengan yang bersekolah tepat waktu SLTP sebesar 74,96 persen dan bersekolah tepat waktu SLTA sebesar 53,48 persen. Seperti halnya dengan APK, APM menurut jenis kelamin mempunyai pola yang sama yaitu APM laki-laki pada jenjang SD lebih tinggi dibanding APM perempuan, sebaliknya pada jenjang SLTP dan SLTA APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah, terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur usia yang sama. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. APS penduduk Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2011	2012	2013
	Laki-Laki + Perempuan	97,94	98,64	99,03
7 - 12	Laki-laki	98,13	98,46	99,04
	Perempuan	97,74	98,82	99,02
	Laki-Laki + Perempuan	86,39	90,00	91,06
13 - 15	Laki-laki	83,61	88,02	89,09
	Perempuan	89,38	92,04	93,30

Dari Tabel dapat diketahui bahwa penduduk usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 yang masih sekolah sebesar 99,03 persen artinya masih ada 0,97 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah. Demikian pula dengan penduduk usia 13-15 yang tidak sekolah sebesar 8,94 persen. Walaupun APS 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun belum mencapai 100 persen namun secara perlahan menunjukkan peningkatan.

Jika dilihat dari sudut gender, tidak terdapat perbedaan yang berarti pada partisipasi sekolah laki-laki dengan perempuan. Penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sama untuk bersekolah. Hasil Susenas tahun 2013 mengindikasikan bahwa APS laki-laki dan APS perempuan hampir sama di semua jenjang pendidikan.

Disparitas gender pada level partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun cukup kecil yaitu laki-laki sebesar 99,04 persen dan perempuan sebesar 99,02 persen. Namun di usia 13-15 tahun angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Biasanya semakin tinggi jenjang pendidikan disparitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin tinggi.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Siswa Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat disesuaikan dengan jumlah penduduk kelompok usia di tingkat SD/MI sudah mencapai kondisi ideal, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs masih jauh dari ideal. Rasio untuk SD/MI, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 maka idealnya adalah 1:192 (satu kelas 32 orang terdiri atas 6 kelas), sedangkan rasio ideal SMP/MTs adalah 1:108 (satu kelas 36 siswa terdiri atas 3 kelas). Dengan adanya pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) diharapkan dapat menjadikan rasio SMP/MTs lebih ideal, terlepas dari persebaran gedung sekolah di setiap kabupaten/kota.

Tabel 2. 10

Rasio Ketersediaan Sekolah/Siswa Pendidikan Dasar Provinsi Lampung

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
	SD/MI				
	Jumlah Gedung Sekolah	na	na	na	4.611
	Jumlah Siswa	na	na	na	858.739
	Rasio	na	na	na	1 : 186
	SMP/MTs				
	Jumlah Gedung Sekolah	na	na	na	1.260
	Jumlah Siswa	na	na	na	306.622
	Rasio	na	na	na	1 : 243

Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, maka rasio ideal guru dan murid di SD/MI adalah 1:32, atau enam guru per satuan pendidikan. Secara umum jumlah guru SD/MI di Provinsi Lampung sudah mencukupi dan lebih ideal. Artinya, dalam satu kelas bisa tersedia satu atau dua guru. Kondisi ini terlepas dari penumpukan jumlah guru di satu daerah

dibanding daerah lain. Jika distribusi guru merata maka kondisi Ideal bisa tercapai.

Untuk rasio guru dan murid di tingkat SMP/MTs, pengukuran secara umum tidak bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Hal ini karena meskipun setiap pelajaran wajib harus tersedia minimal satu guru, namun setiap sekolah masih memiliki muatan lokal yang berbeda antarsekolah.

Tabel 2. 11
Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
SD/MI				
Jumlah Guru Sekolah	na	na	na	52.311
Jumlah Siswa	na	na	na	858.739
Rasio	na	na	na	1 : 16
SMP/MTs				
Jumlah Guru Sekolah	na	na	na	24.203
Jumlah Siswa	na	na	na	306.622
Rasio	na	na	na	1 : 13

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

Secara umum kelompok umur 16 – 18 tahun dikategorikan dalam pendidikan menengah yaitu SMA/MA/SMK. Dalam rentang waktu 2011 – 2013 APS 16 – 18 tahun terus mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di usia tersebut yang menikmati bangku sekolah, sementara penduduk usia 16-18 tahun yang belum menikmati bangku sekolah yaitu 34,59 persen. Secara detil APS laki-laki usia 16 – 18 tahun lebih rendah dibanding

perempuan. Meskipun selisihnya sangat kecil namun perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menaikkan APS laki-laki usia 16 – 18 tahun.

Tabel 2. 12

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Provinsi Lampung

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	2011	2012	2013
		Laki-Laki + Perempuan	56,24	60,43
16 - 18	Laki-laki	52,30	58,34	64,67
	Perempuan	60,62	62,67	65,14

Tabel 2. 13

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
SMA/MA/SMK					
	Jumlah Gedung Sekolah	na	na	na	835
	Jumlah Siswa	na	na	na	238.757
	Rasio	na	na	na	1 : 286

Tabel 2. 14

Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
SMA/MA/SMK					
	Jumlah Guru Sekolah	na	na	na	21.866
	Jumlah Siswa	na	na	na	238.757
	Rasio	na	na	na	1 : 11

2.2.3.1.2 Kesehatan

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru BTA

Hingga bulan Desember 2013 ditemukan Kasus Baru BTA positif sebanyak 6.411 Kasus yang berarti baru 50,9 % dari Perkiraan Kasus Baru BTA positif yang dapat ditemukan dari target > 70 % yang diharapkan. Angka penemuan kasus TB paru BTA positif pada tahun 2013 dari 15 Kabupaten Kota (Pesisir Barat masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat) hanya satu Kabupaten yang mencapai target lebih dari 70%.

Grafik 2. 4
Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) TB Paru Provinsi Lampung



Bila dilihat dari angka kesembuhan (*cure rate*) TB Paru, maka target Provinsi Lampung sudah terlampaui sejak tahun 2010 yaitu sebesar 85 persen. Puncak pencapaiannya terjadi pada tahun 2012 sebesar 93,04 persen. Angka tersebut bergerak fluktuatif, namun tetap berada di atas target.

2. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Tabel 2. 15

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Provinsi Lampung

No.	Parameter	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Sakit Pemerintah	12	12	13	13	14
a.	RSUD Kabupaten/Kota (Pemerintah dan Swasata)	9	10	10	11	11
b.	RSUAM	1	1	1	1	1
c.	RS Tentara	1	1	1	1	1
d.	RS Polri	1	1	1	1	1
2.	RS Khusus Pemerintah	1	1	1	1	1
a.	RS Jiwa	1	1	1	1	1
3.	RS Swasta	30	30	35	37	38
a.	RS Umum Swasta	23	23	26	26	26
b.	RS Khusus Swasta	7	7	9	11	12
Total		43	43	49	51	53

Tabel 2. 16

Jumlah RS, TT RS dan Rasio TT/Penduduk Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah RS	Jumlah TT RS	Rasio TT / Penduduk
2010	45	4.005	1 : 1.900
2011	44	3.793	1 : 2.027
2012	45	4.470	1 : 1.738
2013	52	4.696	1 : 1.689
2014	61	5.589	1 : 1.436

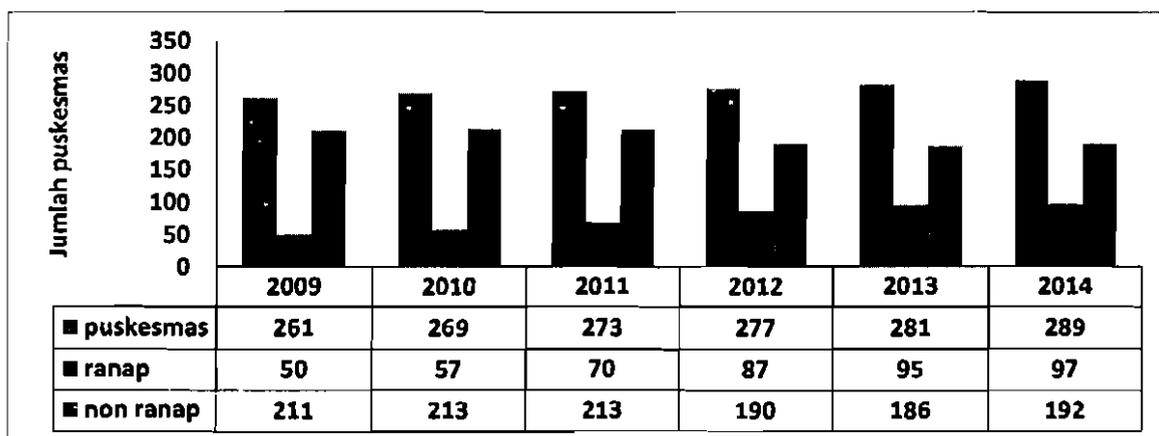
Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO), rasio ideal tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk adalah 1:1.000 jumlah penduduk. Dengan demikian, rasio tempat tidur di Provinsi Lampung masih jauh dari ideal. Meski demikian, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dengan menambah jumlah tempat tidur rumah sakit. Hal ini bisa dilihat pada tabel bahwa setiap tahun jumlah tempat tidur rumah sakit semakin bertambah dan rasionya mengalami penurunan.

Meskipun mengalami peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit, namun distribusinya masih belum mampu mencukupi terutama di daerah.

3. Cakupan Puskesmas

Grafik 2. 5

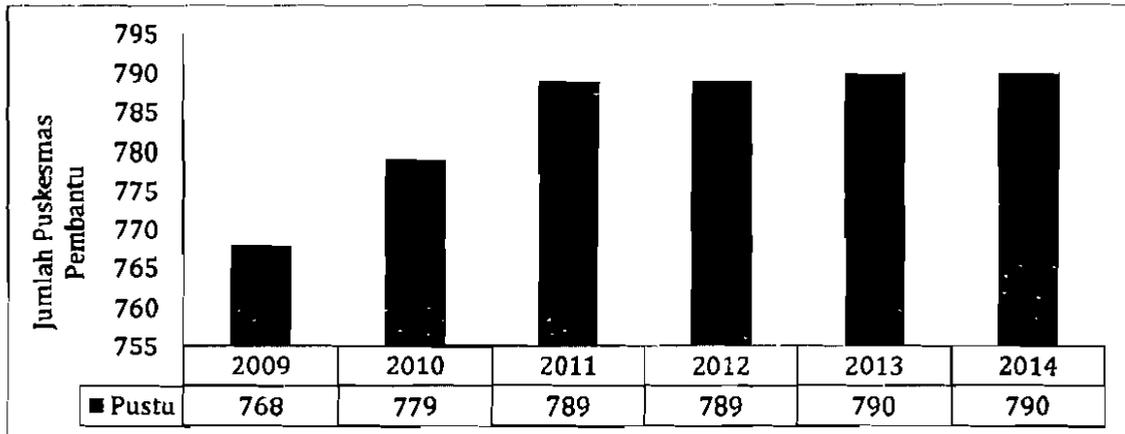
Jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2009



Jumlah Puskesmas pada tahun 2009 berjumlah 261 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 289 unit pada tahun 2014. WHO mensyaratkan bahwa rasio ideal antara jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1:30.000. Artinya satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Dengan kondisi ini maka sejak tahun 2009 jumlah puskesmas di Provinsi Lampung telah melebihi jumlah ideal. Pada tahun 2013, rasio idealnya 1:264, namun jumlah Puskesmas di Provinsi Lampung sudah mencapai 281 unit. Jumlah puskesmas tersebut berada di luar Puskesmas Pembantu (Pustu) yang jumlahnya cukup banyak, terlihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 6

Jumlah Puskesmas Pembantu Provini Lampung Tahun 2009 Sampai 2014

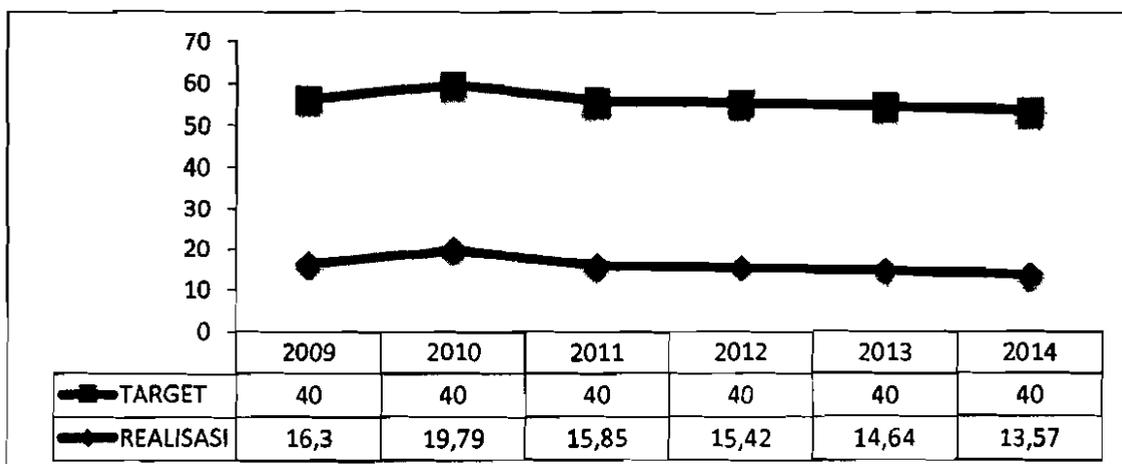


Dengan banyaknya jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu semestinya kesehatan masyarakat lebih terjamin dan memberikan efek positif dalam menurunkan berbagai masalah seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk dan kurang, dan penyakit menular.

4. Rasio dokter per satuan penduduk

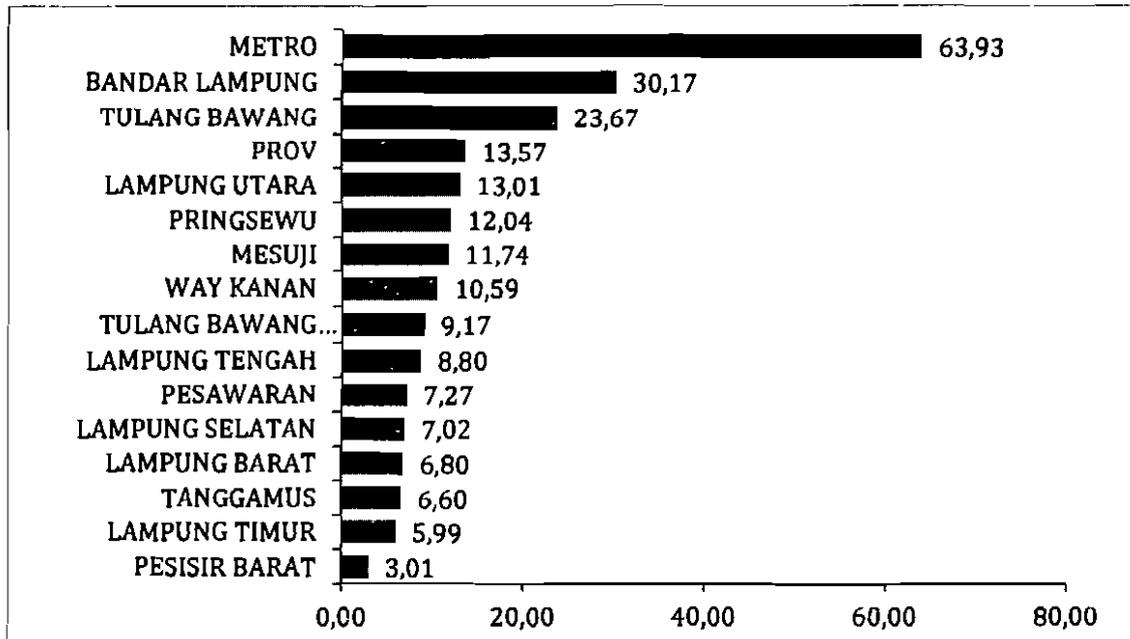
Grafik 2. 7

Target dan Realisasi Jumlah Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Lampung



Grafik 2. 8

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung



2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan dalam bidang Pekerjaan Umum meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan dan energi.

Tabel 2. 17

Kinerja Jalan di Provinsi Lampung 2010 - 2014

No	Parameter	2010	2011	2012	2013	2014
1	Panjang Jalan Provinsi	2.369,97	1.702,81	1.702,81	1.702,81	1.702,81
2	Kondisi Jalan Provinsi	1)Mantap : 1.023,27 Km (43,18 %) 2)Tidak Mantap : 1.346,7 Km	1)Mantap : 900,51 Km (52,83 %) 2)Tidak Mantap : 804,06 Km	1)Mantap : 1.034 Km (60,72 %) 2)Tidak Mantap : 668,81 Km	1)Mantap : 1.051,52 Km (61,75 %) 2)Tidak Mantap : 651,29 Km	1)Mantap : 1.107,65 Km (65,05 %) 2)Tidak Mantap : 595,16 Km

		(56,82 %)	(47,17 %)	(39,28 %)	(38,25 %)	(34,95 %)
3	Panjang Jalan Nasional	1.159,57	1.159,57	1.159,57	1.159,57	1.159,57
4	Kondisi Jalan Nasional	1)Mantap : 953,612 Km (82,24 %) 2)Tidak Mantap : 205,961 Km (17,76 %)	1)Mantap : 1.080,82 Km (93,21%) 2)Tidak Mantap : 78,76 Km (6,79%)	1)Mantap : 962,633 Km (83,02%) 2)Tidak Mantap : 196,94 Km (16,98%)	1)Mantap : 962,633 Km (83,02%) 2)Tidak Mantap : 196,94 Km (16,98%)	1)Mantap : 1.112,47 Km (95,94%) 2)Tidak Mantap : 47,10 Km (4,06%)

Sumber Data : Satker P2JN Lampung 2015 & Dinas PU Provinsi Lampung,
2015

Gambar 2. 2
Kondisi Eksisting Infrastruktur Provinsi
Lampung



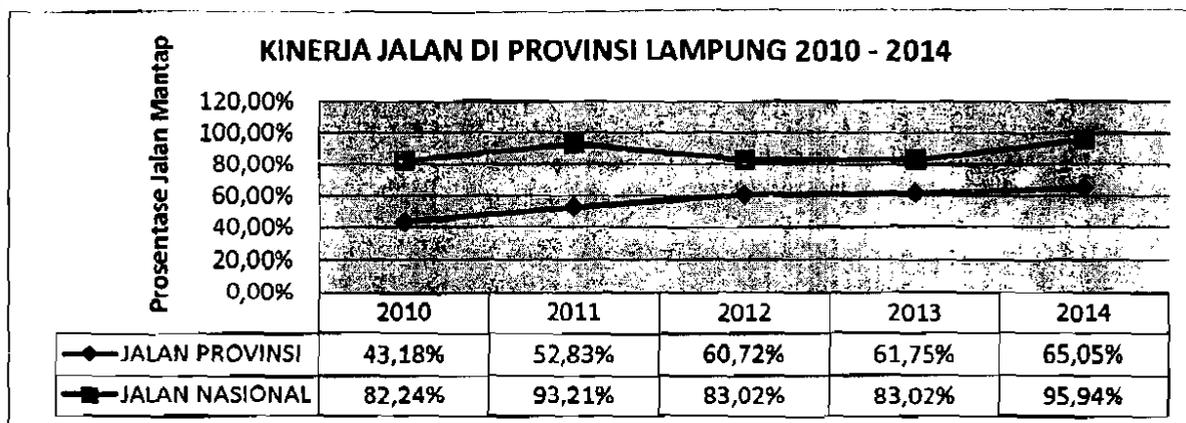
Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai ke tahun 2014 terjadi peningkatan kondisi kemantapan jalan yang cukup signifikan, baik pada ruas jalan nasional maupun jalan Provinsi. Kondisi ini tidak lepas dari komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dan upaya koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur

Jalan Provinsi terjadi peningkatan kondisi mantap jalan dari 61,75 % pada tahun 2013 menjadi 65,05% pada tahun 2014. Demikian juga untuk jalan Nasional, terjadi peningkatan kondisi mantap jalan dari 83,02 % pada tahun 2013 menjadi 95,95% pada tahun 2014.

Peningkatan kondisi kemantapan jalan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada table berikut:

Grafik 2. 9

Kinerja Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014



Sumber: Satker P2JN Lampung 2015 & Dinas PU Provinsi Lampung, 2015

Dari grafik di atas terlihat bahwa jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Diharapkan pada akhir tahun 2019 kondisi jalan mantap provinsi mencapai 85%, sesuai target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian diperlukan untuk memenuhi target penambahan produksi padi sebanyak satu juta ton gabah kering giling sampai dengan tahun 2016. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan operasi dan pemeliharaan di 19 Daerah Irigasi, rawa, waduk serta sungai yang menjadi kewenangan provinsi karena kerusakan jaringan pengairan menyebabkan “kehilangan air”. Namun masih dibutuhkan infrastruktur sumberdaya air lainnya untuk meningkatkan hasil pertanian dan peningkatan pendapatan para petani.

Prioritas utama yang sanga tmendesak dan harus segera dilakukan adalah optimalisasi lahan rawa melalui reklamasi rawa seluas 51.717 Ha, perbaikan 13 Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan rata-rata kerusakan 40%, pembangunan kembali Bendung Way Krep di Kabupaten Tanggamus dan Way Tatayan di Kabupaten Lampung Tengah, pembebasan tanah di Daerah Irigasi

Jabung di Kabupaten Lampung Timur, pembangunan *Regulating Dam* Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu, pembangunan Bendungan Sukaraja III di Kabupaten Lampung Timur, pembangunan bendungan Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah, pembuatan sumur bor, pencetakan sawah baru di lahan kering, serta pompanisasi di sekitar Sungai Sekampung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi memiliki luas total : 275.663 Ha. Dari luasan tersebut yang menjadi kewenangan provinsi adalah 20.541Ha (7,45%), kewenangan Kab/Kota 131.303 Ha (47,63%) sedangkan kewenangan pemerintah pusat 123.819 Ha (44,92%).

Sampai dengan tahun 2014, kegiatan yang telah dilakukan adalah ;

- Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan operasi dan pemeliharaan di 19 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung serta rawa, waduk dan sungai.
- Rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu.
- Konservasi melalui pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya di Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu.
- Rehabilitasi embung, waduk, situ di Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah dan Kab. Pringsewu
- Pembebasan lahan untuk DI Jabung
- DED, dan FS untuk pembangunan *regulating dam* Sukoharjo, pembangunan bendungan Sukaraja III dan pembangunan bendungan Segalamider.
- Perbaikan *catchment area* untuk daerah irigasi Sekampung System.

2.2.3.1.4 Perumahan

a. Sektor Air Minum

Sampai akhir tahun 2014, 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum (RISPAM) yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penanganan penyediaan air minum, dan masih terdapat 2 Kabupaten (Kab. Way Kanan dan Kab. Pesisir Barat) sedang dalam proses penyusunan dan penyelesaian.

Berdasarkan data BPS, 2011, desa rawan air menurut status kekeringan Provinsi Lampung, sbb:

Tabel 2. 18
Desa Rawan Air Menurut Status Kekeringan Provinsi Lampung

Desa Rawan Air Menurut Status Kekeringan Provinsi Lampung					
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Desa Rawan Kekeringan	Desa Rawan Non-Status	Total
1801	Lampung Barat	49	26	11	50
1802	Tanggamus		48	48	110
1803	Lampung Selatan	58		33	4
1804	Lampung Timur			42	21
1805	Lampung Tengah			16	20
1806	Lampung Utara			5	40
1807	Way Kanan			2	35
1808	Tulang Bawang	-	31	51	69
1809	Pesawaran	66	34	-	44
1810	Pringsewu	32	44	-	55
1811	Mesuji	15	51	1	8
1812	Tulang Bawang Barat	5	43	21	11
1813	Pesisir Barat		5	-	43
1871	Bandar Lampung	60	33	-	33
1872	Metro	-	22	-	-
				50	

Sumber : Status Desa Rawan Kekeringan, BPS 2011

Keterangan :

Desa "Non-Status" - dikarenakan jumlah Desa merupakan jumlah Desa Update (2013) sedangkan Data Desa Rawan Air dikeluarkan oleh BPS pada Tahun 2011

Capaian program air minum se-Provinsi Lampung, sbb:

Tabel 2. 19
Capaian Program Air Minum Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Capaian Program Air Minum (2014)		Capaian Program Air Minum (2013)		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1801	Lampung Barat	137.0	66.2	139.2	70.1	66.2
1802	Tanggamus	73.5	66.2	67.4	74.5	66.7
1803	Lampung Selatan	66.0	66.4	66.3	66.9	67.3
1804	Lampung Timur	66.2	63.9	64.1	69.1	65.3
1805	Lampung Tengah	79.8	69.9		83.2	72.8
1806	Lampung Utara	77.4	70.6		78.5	72.6
1807	Way Kanan	81.6	70.9		87.5	73.1
1808	Tulang Bawang	75.0	61.0	62.5	78.8	64.8
1809	Pesawaran	76.6	74.0		78.7	75.9
1810	Pringsewu	63.6	60.8	61.8	66.7	65.3
1811	Mesuji	35.8	59.1	58.5	35.8	62.2
1812	Tulang Bawang Barat	70.2	72.4		78.5	70.2
1871	Bandar Lampung	60.2	71.1	60.3	60.7	60.8
1872	Metro	68.8	92.7	69.3	78.9	73.2
Capaian MDGs		665.1	574.2	570.9	635.5	652.4

b.

Sumber : Hasil Perhitungan MDGs Provinsi Lampung, 2014

Dalam mendukung target MDG's, dilakukan melalui program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang di dalamnya terdapat program-program pencapaian sanitasi layak diantaranya:

- 1) Program Percepatan Pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) yang meliputi sektor drainase, persampahan dan air limbah.
- 2) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS),
- 3) Program PAMSIMAS terkait pemenuhan air bersih.
- 4) Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui Kementerian Kesehatan.

Untuk program PPSP, pemerintah provinsi lampung sudah terjaring progam ini sejak tahun 2011 dari 14 Kabupaten, 6 kabupaten yang masuk didalam program tersebut diantaranya : Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji dan Kab.Lampung Barat dan Kota Bandar Lampung. Tahun 2012 menjadi 10 Kabupaten bertambah 4 Kabupaten diantaranya : Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus. Tahun 2013 bertambah 4 Kabupaten menjadi 14 Kabupaten termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB), diantaranya : Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat. Adapun sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 100% dengan *include*-nya Kabupaten Lampung Utara dalam program PPSP.

Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), meliputi penanganan drainase, air limbah dan persampahan, dimana sampai tahun 2015 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam tahapan:

Tabel 2. 20
Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Provinsi Lampung sampai tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Keputusan
1.	Kab. Tulang Bawang	Memorandum Program Sanitasi (MPS)
2.	Kab. Tulang Bawang Barat	MPS
3.	Kab. Pesisir Barat	MPS
4.	Kab. Way Kanan	MPS

5.	Kab. Pesawaran	Implementasi
6.	Kota Metro	Implementasi
7.	Kab. Lampung Timur	Implementasi
8.	Kab. Lampung Barat	Implementasi
9.	Kab. Tanggamus	Implementasi
10.	Kab. Lampung Selatan	Implementasi
11.	Kota Bandar Lampung	Implementasi
12.	Kab. Pringsewu	Implementasi
13.	Kab. Lampung Tengah	Implementasi
14.	Kab. Mesuji	Implementasi
15.	Kab. Lampung Utara	Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi (SSK)

Tabel 2. 21

Capaian Sektor Sanitasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No.	Kab./Kota	Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persentase)				
		2011	2012	2013	2014	2015
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target
1801	Kab. Lampung Barat	40.15	40.78	40.86	42.71	49.13
1802	Kab. Tanggamus	34.18	34.24	34.58	35.40	39.14
1803	Kab. Lampung Selatan	53.49	53.15	52.76	52.52	57.72
1804	Kab. Lampung Timur	38.90	38.86	38.06	38.27	41.85
1805	Kab. Lampung Tengah	42.29	42.12	41.64	41.38	44.81
1806	Kab. Lampung Utara	43.06	42.81	42.88	43.27	47.69
1807	Kab. Way Kanan	27.42	28.01	28.21	28.35	31.81
1808	Kab. Tulang Bawang	40.66	41.39	41.15	41.05	45.15
1809	Kab. Pesawaran	45.92	46.00	45.49	46.13	53.14
1810	Kab. Pringsewu	52.97	55.75	55.95	56.16	62.09
1811	Kab. Mesuji	19.84	20.32	20.93	22.83	26.10
1812	Kab. Tulang Bawang Barat	36.83	37.27	37.29	38.06	42.64
1813	Kab. Pesisir Barat	32.49	32.82	33.16	33.50	38.48
1871	Kota Bandar Lampung	73.24	72.89	71.96	72.02	75.23
1872	Kota Metro	80.81	81.57	91.25	93.49	94.26
	Capaian Akses Sanitasi	3,530,464	3,574,369	3,648,499	3,588,967	4,102,620
	Partisipasi	60,50%	60,31%	60,95%	61,28%	61,7%
	Partisipasi	40,50%	40,05%	40,87%	41,19%	41,7%
	Jumlah Penduduk	7,701,144	7,768,764	7,932,132	8,026,191	8,117,268
		44.15	44.53	45.08	45.68	49.95

Capaian MDGs Sanitasi berdasarkan perhitungan MDGs tahun 2014 dengan dasar hitungan Survei BPS 2010 dan Data Podes 2011 mencapai 45,68 % dan target Sanitasi Layak 2015 Provinsi Lampung sebesar 49,95 %. Kekurangan

Target MDGs Sanitasi sebesar 1,71 % Tahun 2015 dipenuhi melalui swadaya masyarakat dan atau melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab./Kota, DAK dan PHLN melalui program pembangunan infrastruktur sektor Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) khususnya sanitasi.

DAK Sanitasi sebagai salah satu data input perhitungan MDGs Sanitasi diusulkan sesuai daerah rawan sanitasi dengan tingkat resiko sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah (dokumen PPSP).

Daerah Rawan Sanitasi Menurut Tingkat Resiko dan Status Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Lampung:

Tabel 2. 22

Daerah Rawan Sanitasi Menurut Tingkat Resiko dan Status Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Daerah Rawan Sanitasi 2014				Total
		Resiko 4 (Sangat Tinggi)	Resiko 3 (Tinggi)	Resiko 2 (Sedang)	Resiko 1 (Rendah)	
1	Kab. Lampung Barat	8	11	8	3	106
2	Kab. Lampung Tengah	106	19	-	-	177
3	Kab. Lampung Selatan	4	65	180	2	-
4	Kab. Lampung Timur	11	58	-	-	126
5	Kab. Lampung Utara	113	82	24	8	75
6	Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	247
7	Kab. Way Kanan	3	8	-	-	200
8	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	151
9	Kab. Pesawaran	26	45	-	-	73
10	Kab. Pringsewu	10	15	-	-	106
11	Kab. Mesuji	18	12	-	-	45
12	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	80
13	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	120
14	Kota Bandar Lampung	3	29	62	26	6
15	Kota Metro	1	8	11	2	-

Sumber : Data Daerah Rawan Sanitasi - Buku Putih Sanitasi Kab / Kota Provinsi Lampung, 2014

c. Kawasan Kumuh

Konsep MDGs Kumuh adalah pengurangan terhadap rumah tangga kumuh. Capaian dan target MDGs Kumuh Provinsi Lampung : Luasan kawasan kumuh Provinsi Lampung berdasarkan hasil survei identifikasi kawasan Kumuh tahun 2014 sebesar 1.930 Ha, dan belum adanya penyusunan rencana aksi daerah di Provinsi Lampung terhadap penanganan pengurangan Kawasan Kumuh.

Tabel 2. 23

Luasan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung Tahun 2014 (Ha)

No	Kab. Kota	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Bandar Lampung	238.64
2.	Metro	40.21
3.	Lampung Tengah	40.85
4.	Lampung Selatan	47.2
5.	Lampung Timur	103.68
6.	Lampung Barat	30.72
7.	Lampung Utara	82.27
8.	Tanggamus	167.75
9.	Pesawaran	773.37
10.	Way Kanan	34.36
11.	Tulang Bawang	244.66
12.	Tulang Bawang Barat	79.04
13.	Pringsewu	46.92
14.	Mesuji	Tidak ada data luasan kumuh

2.2.3.1.5 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

- Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
- Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tabel 2. 24

Legalisasi Peraturan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Legalisasi	Tahun Pengesahan
1.	Prov. Lampung	Perda No. 1 Tahun 2010	
2.	Lampung Barat	Perda No. 1 Tahun 2012	
3.	Lampung Selatan	Perda No. 15 Tahun 2012	
4.	Lampung Tengah	Perda No. 1 Tahun 2012	
5.	Lampung Timur	Perda No. 4 Tahun 2012	
6.	Mesuji	Perda No. 6 Tahun 2012	
7.	Pesawaran	Perda No. 4 Tahun 2012	
8.	Pringsewu	Perda No. 2 Tahun 2012	
9.	Tanggamus	Perda No. 16 Tahun 2010	
10.	Tulang Bawang	Perda No. 5 Tahun 2013	
11.	Tulang Bawang Barat	Perda No. 2 Tahun 2012	
12.	Way Kanan	Perda No. 11 Tahun 2011	
13.	Bandar Lampung	Perda No. 10 Tahun 2011	
14.	Metro	Perda No. 1 Tahun 2012	
15.	Lampung Utara	Perda No. 4 Tahun 2014	
16.	Pesisir Barat	Proses Rekomendasi Materi Teknis	

- Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pengawasan penataan ruang adalah suatu upaya mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (pasal 3), mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Sampai tahun 2014, pemerintah se-Provinsi Lampung telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda.) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi:

2.2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 32 Tahun... mengamanatkan untuk menyusun RPJMD bagi Kepala Daerah selambatnya 6 bulan setelah dilantik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan RPJMD tahun 2015-2019. Selain itu juga dilakukan fasilitasi Penyusunan RPJMD bagi Kabupaten Lampung Utara yang pada saat bersamaan juga menyusun RPJMD. Sesuai ketentuan Undang-Undang, seluruh Kabupaten/Kota telah menyusun RPJPD, kecuali bagi Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonom Baru, dan baru akan melakukan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015.

2.2.3.1.7 Perhubungan

Pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan di Provinsi Lampung adalah dalam rangka mewujudkan misi ke 12 RPJM Tahun 2009-2013 dengan prioritas program pada: (a) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (b) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan (c) Peningkatan Pelayanan angkutan.

PERHUBUNGAN DARAT

Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas angkutan darat, pada tahun 2014 telah dilaksanakan :

- Pengadaan dan Pengawasan Rambu Lalu Lintas Standar di Jalan Provinsi sebanyak 199
- Pemasangan Delineator sebanyak 230 dan,
- Pemasangan Pagar Pengaman (Guardrail) sebanyak 300

ASDP

Beberapa hasil yang dicapai terkait pembangunan pelabuhan penyeberangan Bakauheni adalah: (a) Penambahan jumlah kapal dari 44 unit (2013) menjadi 52 unit (2014); (b) Pembangunan Dermaga 6 dan percepatan penyelesaian rehab dermaga 4. Ditargetkan di Pelabuhan Bakauheni akan dibangun sampai 10 dermaga; dan (c) Perbaikan manajemen di Pelabuhan Bakauheni.

Selain penyeberangan Bakauheni, selama kurun 2013-2014 dilaksanakan pembangunan dermaga di Kabupaten Mesuji (Dermaga Sungai Sindang dan Dermaga Wiralaga), sehingga dapat dioperasikan pada tahun 2015 untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi beban jalan dan mengoptimalkan angkutan perairan.

Perkeretaapian

Capaian kinerja tahun 2014 yaitu :

- a. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlindungan KA di Kota Bandar Lampung.
- b. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pengaman dan Pengendalian Perlindungan Sebidang KA di Lampung Utara dan Way Kanan

Selain itu untuk mempercepat pembangunan bidang infrastruktur KA, bekerja sama dengan pemerintah telah diupayakan :

- a. Pembebasan Lahan untuk Peningkatan Kapasitas Lintas Tanjung Enim-Tarahan melalui *Double Track* Khususnya *Shortcut* Rejosari-Tarahan (36 Km).
- b. Pembangunan konstruksi *double track short cut* Rejosari-Tarahan.

- c. Pembangunan *Trans Sumatera Railways* (Bakauheni-Tanjung Karang, Tanjung Karang-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Mesuji-Batas Sumatera Selatan: Percepatan rencana pembangunan fisik serta pembebasan lahan).
- d. Pembangunan *Dry Port* di Way Kanan : Percepatan dan dukungan anggaran melalui APBN.
- e. Sosialisasi dan implementasi pengalihan penggunaan transportasi jalan raya ke moda Kereta Api guna mengurangi beban kerusakan jalan dan kemacetan.

BIDANG LAUT

Dalam Kebijakan Pembangunan Tol Laut Nasional, telah ditetapkan 24 Pelabuhan Utama dan 163 Pelabuhan Feeder. Di Provinsi Lampung terdapat 1 Pelabuhan Utama (Pelabuhan Panjang) dan 3 Pelabuhan Feeder, yaitu Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Sebalang dan Pelabuhan Batu Balai.

Terkait percepatan implementasi kebijakan Tol Laut, Menteri Perhubungan RI berkesempatan meresmikan beroperasinya Kapal Ro-Ro pertama (KM Mutiara Persada 3) dengan jurusan Panjang – Tanjung Perak (Surabaya) sebagai entitas Tol Laut Nasional pada Tanggal 6 Mei 2015 di Pelabuhan Panjang - Lampung. Selanjutnya kapal tersebut akan berlayar setiap 4 (empat) hari sekali dari Pelabuhan Panjang.

Penanganan 3 (tiga) pelabuhan feeder diantaranya:

- d. Pelabuhan Batu Balai, berupa pembangunan dermaga dengan lebar 10,15 meter yang sampai akhir 2014 telah mencapai panjang 70 meter.
- e. Pelabuhan Pulau Sebesi, berupa pembangunan trestel dengan progres sampai akhir 2014 mencapai panjang 16 meter dengan lebar 6 m serta pemancangan dermaga tahap I (9 titik).
- f. Pelabuhan Sebalang, berupa pembangunan trestel dengan progres sampai akhir 2014 mencapai panjang 31 meter dengan lebar 9,5 m.

BIDANG UDARA

Bandar Udara Raden Inten II merupakan sarana transportasi yang cukup penting dalam mendukung pengembangan ekonomi di wilayah. Oleh karena itu

sarana ini perlu dipelihara dan ditingkatkan kondisi fisiknya ke arah yang lebih baik.

Tabel 2. 25
Jumlah Pesawat, Penumpang, Bagasi dan Kargo
Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

TAHUN	PESAWAT	PENUMPANG	BAGASI (Kg)	KARGO (Kg)
	Total DTG/BRK	Total DTG/BRK	Total DTG/BRK	Total DTG/BRK
2010	6.442	732.135	5.093.760	1.039.114
2011	9.648	1.006.688	6.551.157	2.343.050
2012	10.341	1.206.141	7.851.676	2.804.980
2013	10.147	1.158.399	7.681.676	3.043.025
2014	9.767	1.225.403	7.940.648	3.722.960

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 2014

2.2.3.1.8 Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup dicerminkan dari kualitas air sungai dan kualitas udara. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPLHD Provinsi Lampung pada 6 DAS yaitu Way Besai, Way Pengubuan, Way Sekampung, Way Semangka, Way Seputi dan Way Tulang Bawang, diketahui bahwa kadar COD rata rata masih dibawah ambang. Kadar BOD rata rata berkisar 2-5 dengan ambang 6 mg/l, namun pada saat tertentu jumlahnya menjadi sangat tinggi, diatas 6 yaitu di Way Besai, Way Semangka dan Way Pengubuan. Kondisi ini diduga disebabkan oleh pelepasan limbah industri oleh perusahaan disekitar DAS. Sedangkan kadar COD dengan ambang 50 mg/l juga masih dibawah ambang dengan kisaran 15-40 mg/l.

Data dan informasi mengenai kualitas udara tahun 2014 diketahui berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara, secara umum keadaan parameter kualitas udara masih dalam kondisi baik tyerutama untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, Pb dan PM₁₀ sesuai dengan baku mutu lingkungan berdasarkan PP 41 tahun 1999,

namun untuk parameter HC dan TSP di beberapa titik di Bandar Lampung sudah melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan. Tingginya nilai hidrocarbon tersebut mengindikasikan bahwa kondisi lalu lintas di kota Bandar Lampung telah mengalami kepadatan tinggi cenderung macet.

2.2.3.1.9 Pertanahan

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Lampung masih menghadapi permasalahan konflik atas penguasaan lahan, baik konflik antar masyarakat, masyarakat dengan Pemerintah, masyarakat dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha dengan pengusaha. Pada tahun 2014 telah berhasil dilakukan fasilitasi dan penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut sebanyak 11 kasus.

2.2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan telah ditetapkan target untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dan perempuan melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta *trafficking*. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan, melalui pelatihan ekonomi kreatif di perdesaan bagi 30 kelompok perempuan.
2. Pencegahan, penanganan dan pendampingan terhadap korban Trafficking dan KDRT terhadap perempuan dan anak, melalui peningkatan pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan rumah perlindungan trauma centre (rumah aman).
3. Pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh penghargaan di bidang pemberdayaan perempuan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Utama. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 Desember 2014.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perkembangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Lampung, sebagai berikut :

Tabel 2. 26
Perkembangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
di Provinsi Lampung Tahun 2012-2014

TAHUN	PEREMPUAN				ANAK	
	PERKOSAA N	PELECEHA N	KDRT	PENGANIAY AAN	KEKERASA N	TRAFICKIN G
2012	129	9	185	46	na	na
2013	139	14	180	49	310	11
2014	130	25	166	7	na	na

2.2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Dalam kurun waktu 2013-2014 kesertaan ber KB masyarakat secara umum menunjukkan peningkatan dari 1.189.577 peserta aktif tahun 2013 menjadi 1.208.590 peserta aktif tahun 2014.

Tabel 2. 27

Jumlah Kesertaan Ber-KB Provinsi Lampung, Tahun 2013 dan 2014

NO	KESERTAAN BER KB	TAHUN	
		2013	2014
1	IUD	163,157	168,967
2	MOW	16,312	16,659
3	MOP	14,233	13,773
4	KONDOM	33,035	33,580
5	IMPLAN	185,471	207,198
6	SUNTIK	411,561	409,351
7	PIL	365,808	359,062
TOTAL		1,189,577	1,208,590

Tingkat kesejahteraan dengan kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 adalah kategori keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga miskin, atau dinyatakan dengan Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori pra sejahtera dan Sejahtera I dari seluruh keluarga yang didata tingkat kesejahteraannya. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera, dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejahteraan penduduk meningkat.

Tabel 2. 28**Tahapan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan 2014**

NO	TAHAPAN KESEJAHTERAAN	Tahun	
		2013	2014
1	PRA KS	681,033	657,608
2	KS I	590,905	608,602
3	KS II	551,678	580,542
4	KS III	280,304	287,162
5	KS III+	43,652	43,785
6	JUMLAH	2,147,572	2,177,699

2.2.3.1.13 Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Kesejahteraan Sosial, jenis PMKS ada 26 jenis yaitu: anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan hukum, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. Data berikut menunjukkan jumlah PMKS se-Provinsi Lampung.

Tabel 2. 29
Jumlah PMKS se-Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai 2014

Tahun	Jumlah PMKS (KK)	Jumlah PMKS (Jiwa)
2012	525.047	227.540
2013	611.747	219.372
2014	638.070	177.455

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah PMKS dari kategori keluarga sejak tahun 2012, sedangkan dari kategori individu cenderung menurun setiap tahunnya. Dominasi PMKS dari kategori keluarga berasal dari keluarga fakir miskin dengan jumlah terbesar dari Lampung Tengah. Dari individu, data Dinas Sosial menunjukkan dominasi PMKS berasal dari kalangan perempuan rawan sosial ekonomi dan diikuti oleh kelompok lanjut usia telantar.

2.2.3.1.14 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat menonjol dalam proses pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan masalah ketenagakerjaan selalu mengetengahkan isu-isu tentang pengangguran, kesempatan kerja dan partisipasi angkatan kerja yang tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk dapat mengerti masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyerapan tenaga kerja. Beberapa indikator utama yang sering dijadikan sebagai patokan keberhasilan yaitu penanganan pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan penyerapan tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30
Penanganan Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka) Dan
Penyerapan Tenaga Kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Provinsi
Lampung Tahun 2011 - 2014

Uraian	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	3.598.090	3.709.599	3.681.084	3.857.936
Bekerja	3.368.486	3.516.856	3.471.602	3.673.158
Pengangguran	229.604	192.743	209.482	184.778
TPT	6,38	5,20	5,69	4,79
TPAK	65,27	66,30	64,84	66,99

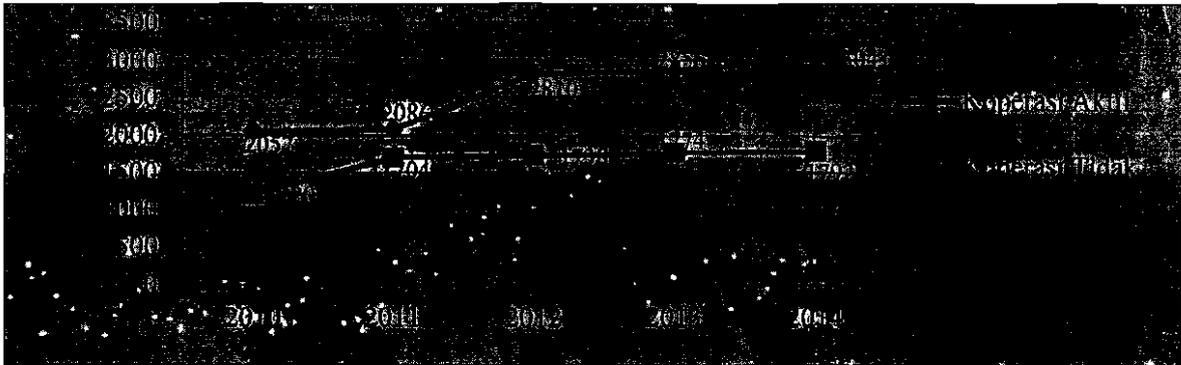
Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2011 - 2014 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Lampung dari 3.598.090 orang pada tahun 2011 menjadi 3.857.936 orang pada tahun 2014. Peningkatan jumlah Angkatan Kerja ini sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja pada tahun 2011 sebesar 3.368.486 orang menjadi 3.673.158 orang pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah terserap sebagai pekerja di berbagai sektor.

Meningkatnya penduduk bekerja diiringi dengan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2011 jumlah pengangguran mencapai 229.604 orang atau 6,38 persen lalu mengalami penurunan menjadi 184.778 orang atau 4,79 persen pada tahun 2014.

2.2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah Koperasi per Desember 2014 sebanyak 4.833 Unit Koperasi, secara kelembagaan mengalami kenaikan sebanyak 203 Unit Koperasi atau 4,2 % dari jumlah 4.833 Unit Koperasi.

Grafik 2. 10
Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Th. 2010 s/d Desember
2014

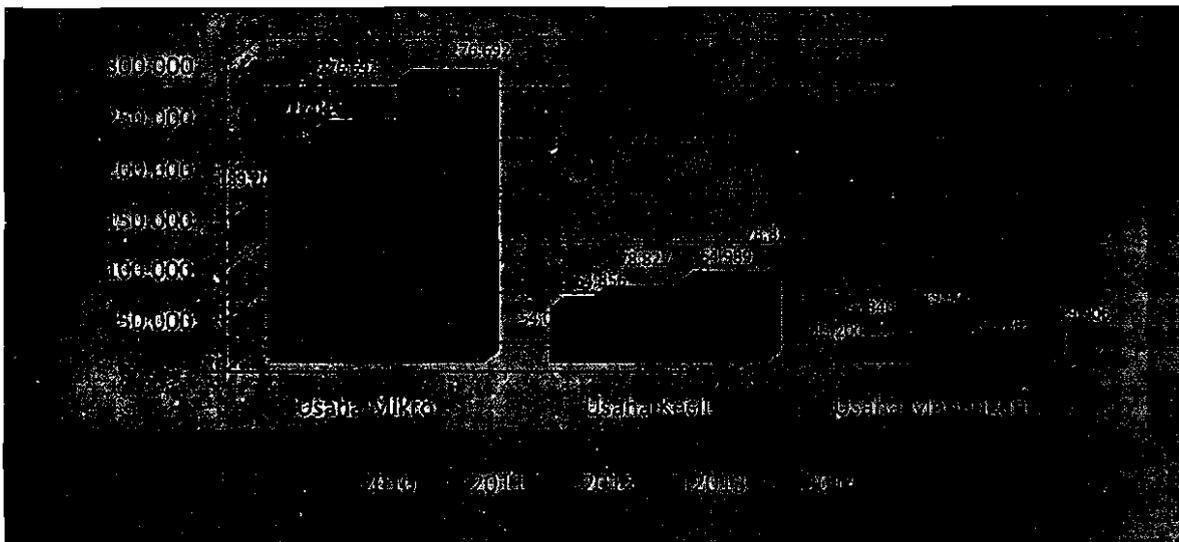


Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 375.425 unit. Jumlah tersebut terdiri dari

- Usaha mikro 276.692 unit
- Usaha Kecil 78.827 unit
- Usaha Menengah 19.906 unit

Jumlah UMKM di Provinsi Lampung pada tahun 2014 berdasarkan data terakhir masih stagnan belum mengalami peningkatan dari data tahun 2013 baik jumlah usaha Mikro, Kecil dan menengah, ini pun harus menjadi perhatian dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Grafik 2. 11
Perkembangan UMKM Tahun 2010 - 2014



2.1.3.1.16 Penanaman Modal

Total realisasi investasi yang masuk ke Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai Rp. 518,9 milyar. Investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). PMA Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp. 176,79 milyar, sementara PMDN di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp. 342,2 milyar. Untuk triwulan I tahun 2015, total realisasi investasi yang masuk mencapai Rp. 270,2 milyar berasal dari PMA dan PMDN masing-masing sebesar Rp. 132,9 milyar dan Rp. 137,3 milyar.

Realisasi pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (seperti jalan, jembatan, dan energi) terus menjadi prioritas pembangunan yang juga akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Provinsi Lampung. Selama tahun 2014, dukungan kegiatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan investasi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,70 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang sebesar 3,79 persen (yoy). Untuk tahun 2015, investasi diperkirakan akan meningkat didorong oleh adanya realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan swasta di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 31

Total Realisasi Investasi Yang Masuk Ke Provinsi Lampung

No.	SEKTOR	2013		2014		PMA (Rp (Miliar))	PMDN (Rp (Miliar))	Total (Rp (Miliar))
		Jumlah	Rp (Miliar)	Jumlah	Rp (Miliar)			
1	Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan	4	84.050	1	8.769,6	14	3.037,6	
2	Sektor Industri Makanan	11	64.000	15	1.263.930,2	40	876.093,8	1.005.014
3	Sektor Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik					6	6.825	
4	Sektor Industri	-	-	-	-	3	2.857	13.222

	transportasi, Gudang dan Komunikasi								
5	Sektor Industri Mineral Non Logam						10.500		
6	Sektor Industri Pertambangan	4	12.200	1	6.533,1	4	169,1	1	17.361,8
7	Sektor Industri Karet, Barang Kulit, Karet dan Plastik	-		2	38.391,2	-			
8	Sektor Jasa Lainnya	3	450			6	1.449		
9	Sektor Industri Kimia dan Farmasi	5	64.490			13	172.556	18	2.729.114
10	Sektor Industri Kayu	3	1.950			5	2.440,2		
11	Sektor Industri Listrik, Air dan Gas	12	182.100	3	124.752,6	10	394.653,5		
12	Sektor Perumahan	1				3	45.675		
13	Sektor Perdagangan	3	48.500						
14	Sektor Peternakan	-				5	20.960	3	9.893
15	Sektor Industri Lainnya	1	3.960			6	75.600		
16	Sektor Perikanan	3	7.100			6	110.803		
Jumlah		50	168.800		1.134.176	12	1.538.000	17	3.333.441
			Total		1.911.176		Total		5.111.111
			Target		2.000.000		Target		3.200.000
			Realisasi %		96		Realisasi %		159,73

2.2.3.1.17 Kebudayaan

2.2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda, sebagai potensi pembangunan daerah, memperoleh perhatian yang cukup besar dalam pengembangan potensinya. Pembangunan kepemudaan diarahkan untuk: menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu melalui pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan 100 organisasi kepemudaan

Guna mendukung pengembangan prestasi olah raga maka Pemerintah Provinsi saat ini telah melakukan pengembangan melalui PLPP dan sekolah keberbakatan. Disamping itu untuk mendukung pengembangan bakat-bakat di bidang olah raga juga tersedia fasilitas olah raga di kabupaten/kota baik oleh pemerintah.

Tabel 2. 32
Jumlah Lapangan Olahraga Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi
Lampung

No	Kab / Kota	Jumlah Lapangan Olahraga
1.	Lampung Barat	34
2.	Lampung Selatan	48
3.	Lampung Tengah	12
4.	Lampung Timur	1
5.	Mesuji	13
6.	Pesawaran	1
7.	Pringsewu	1
8.	Tanggamus	1
9.	Tulang Bawang	30
10.	Tulang Bawang Barat	86
11.	Way Kanan	2
12.	Bandar Lampung	13
13.	Metro	11
14.	Lampung Utara	1
15.	Pesisir Barat	na
Jumlah		254

Disamping Pemerintah juga mengelola Gedung Olahraga sebanyak 6 GOR. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan kepada Kelompok Olahraga Prestasi sebanyak 3 klub, serta olahraga pelajar sebanyak 30 klub. Prestasi bidang olah raga yang berhasil diraih oleh Provinsi Lampung yaitu,

1. Popwil II Kalimantan Barat 1 emas, 10 perak, 8 perunggu dari 5 cabang

2. Kejuaraan Angkat Besi PLPP Banjarmasin 15 emas, 2 perak
3. PON Remaja Surabaya 2 emas, 2 perak, 2 perunggu dari 2 cabor
4. Kejurnas Senam PLPP Surabaya 4 emas, 1 perak

2.2.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.2.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.3.1.21 Kearsipan

2.2.3.1.22 Komunikasi dan Informasi

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Komunikasi juga dimaksudkan sebagai proses penyampaian pesan kepada orang lain. Dengan demikian komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan handphone (HP) dan telepon. Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan dengan telepon rumah, karena harga telepon seluler maupun pulasanya cukup bersaing dibandingkan dengan telepon rumah, telepon seluler juga lebih diminati karena lebih praktis dibawa kemana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi dimanapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan yang semakin meluas.

Tabel 2. 33

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2011-2013

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Rumah	4,27	3,99	3,55
Telepon Seluler	80,73	85,39	87,70
Komputer	8,27	9,80	9,10

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media massa dan media elektronik, seperti Televisi, Radio, Surat Kabar, media on line dsb.

Berdasarkan data jumlah media massa dan media elektronik pada tahun 2014 yaitu :

Tabel 2. 34

Data Jumlah Media Massa Dan Media Elektronik Pada Tahun 2014

Media Massa	Surat Kabar Harian	Surat Kabar Mingguan	Majalah	Radio	Televisi
Nasional	8	-	7	-	15
Daerah	30	13	1	78	10

2.2.3.1.23 Perpustakaan

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan bahwa salah satu tujuan perpustakaan adalah menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan "Koleksi

Deposit" dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung telah menjalankan amanat dari undang-undang ini. Jenis koleksi karya rekam dan cetak yang disimpan saat ini dalam Koleksi Deposit adalah berasal dari berbagai lembaga dan media se-Provinsi Lampung. Hingga saat ini jumlah koleksi deposit yang dikumpulkan mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi jumlah judul maupun eksemplarnya.

Tabel 2. 35
Jumlah Koleksi Deposit

Jumlah Koleksi Deposit	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Judul	112	214	431	616	718
Jumlah eksemplar	158	294	508	702	842

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPAD Lampung telah meningkatkan koleksi buku setiap tahunnya baik dari sisi jumlah judul dan eksemplarnya. Berikut ditampilkan jumlahnya:

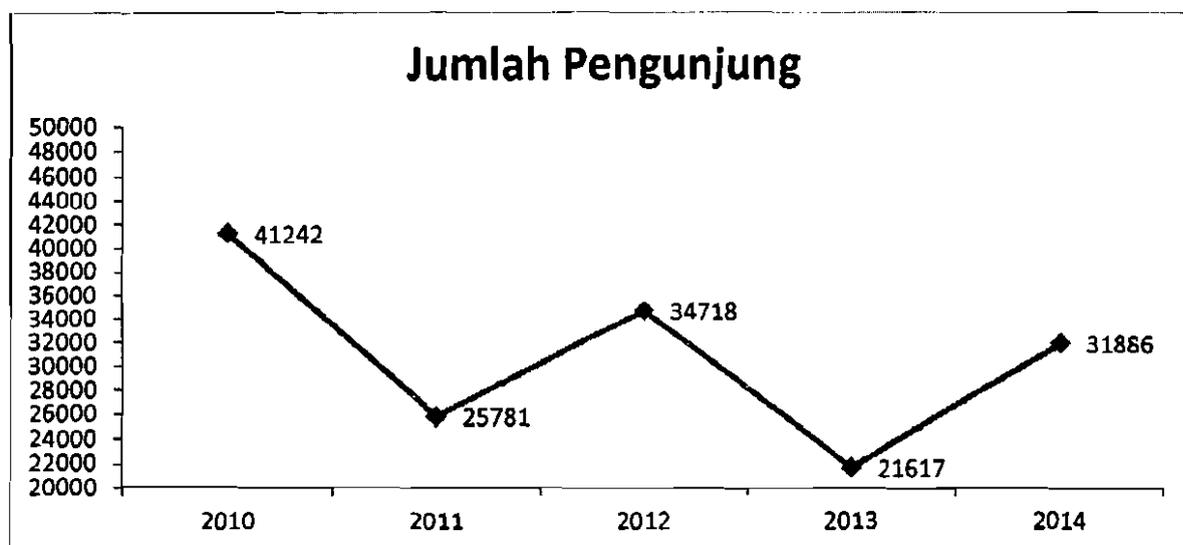
Tabel 2. 36
Jumlah Koleksi Buku

Jumlah Koleksi Buku	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Judul	42.746	88.110	131.652	172.528	219.626
Jumlah eksemplar	135.477	274.560	407.812	530.122	659.130

Agar mempermudah pengunjung dalam mencari buku dan sinopsisnya, maka BPAD Lampung telah menotomasikan bahan pustaka dan dokumentasi yang telah dikoleksi sejak tahun 2012. Jumlah koleksi yang berhasil diotomasikan yaitu 2.782 (2012), 11,760 (2013), dan 1.300 (2014).

Era digital saat ini memberikan pengaruh secara langsung terkait jumlah pengunjung ke Perpustakaan. Kemudahan dalam mencari informasi dan bahan referensi di dunia maya menjadikan perpustakaan sebagai tempat kedua untuk mencarinya. Dalam lima tahun terakhir terjadi fluktuasi kunjungan perpustakaan yang bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 12
Jumlah Pengunjung Perpustakaan



2.2.3.1.24 Ketahanan Pangan

Pada tahun 2014 kecukupan cadangan pangan khususnya beras ditunjukkan dengan perbandingan antara produksi beras dengan tingkat konsumsinya. Berdasarkan data ketersediaan beras Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 1.881.047 ton dengan total konsumsi diperkirakan sebesar 1.100.322 ton maka terdapat surplus beras sebesar 780.725 ton. Berikut disajikan data ketersediaan dan cadangan pangan di Provinsi Lampung :

Tabel 2. 37

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014

Uraian	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				
	2010	2011	2012	2013	2014
Realisasi Kuantitatif (Kg)	47.732,70	46.511,63	71.333,33	20.500	19.881
Realisasi Persentase (%)	23,9	47,1	82,8	93,0	171,00

2.2.3.1.25 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk menciptakan stabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung melibatkan segenap komponen masyarakat baik ormas, LSM maupun tokoh masyarakat, melalui 4 kali rapat koordinasi/rapat kerja. Hingga Tahun 2014 jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang diregistrasi sebanyak 85 organisasi, sedangkan jumlah LSM sebanyak 57.

2.2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.2.3.2.1 Pertanian

Target pembangunan bidang pertanian dalam RPJMD yaitu:

1. Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada pangan.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, produksi peternakan serta produksi perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan

Berdasarkan target tersebut, telah dihasilkan produksi bidang pertanian sebesar:

- a. Produksi Padi pada tahun 2014 mencapai 3.320.293 ton GKG atau meningkat sebesar 113.291 ton GKG dibandingkan tahun 2013 (3.207.002 ton GKG). Sehingga ketersediaan beras Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 1.881.047 ton dengan total konsumsi diperkirakan sebesar 1.100.322 ton maka terdapat surplus beras sebesar 780.725 ton.
- b. Untuk komoditas lainnya, juga mengalami peningkatan seperti jagung dari 1,760 juta ton pada tahun 2013 menjadi 1,819 juta ton di tahun 2014 dan ubikayu dari 8,329 juta ton pada tahun 2013 menjadi 9,725 juta ton pada tahun 2014.
- c. Untuk Perkebunan, Provinsi Lampung juga mendominasi komoditas secara nasional, seperti kopi robusta sebanyak 22,63% dari produksi nasional, lada terbesar nomor 2 nasional dengan kontribusi sebesar 25,4%

sedangkan tebu terbesar nomor 2 nasional dengan kontribusi sebesar 25,19%

- d. Sektor peternakan juga menunjukkan peningkatan. Populasi ternak sapi potong meningkat dari 573.483 ekor tahun 2013 menjadi 723.394 ekor tahun 2014, sehingga produksi daging sapi meningkat dari 14,622 juta ton ditahun 2013 menjadi 14,632 juta ton ditahun 2014. Selain itu untuk ternak kambing terjadi peningkatan sebanyak 1,253 Juta ekor dan mencapai 1,299 Juta ekor pada tahun 2014. Hal ini yang menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak sapi dan kambing nomor 1 di Sumatera dan nomor 4 secara nasional. Sedangkan produksi daging ayam ras pedaging meningkat dari 41,622 juta ton menjadi 43,800 Juta ton ditahun 2014. Peningkatan tersebut diiringi pula oleh peningkatan produksi telur dari tahun 2013 sebanyak 51,387 juta ton menjadi 56,526 juta ton pada tahun 2014.
- e. Sasaran peningkatan produksi tahun 2015 untuk tanaman padi adalah 4.003.330 ton, jagung 2.031.117 ton, kedele 11.835 ton, kacang tanah 13.561 ton, kacang hijau 3.558 ton, ubi kayu 10.928.619 ton, dan ubi jalar 51.691 ton. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran produksi tersebut antara lain Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, melalui bantuan sarana berupa :
 - 1) Combine Harvester Besar sebanyak 4 unit ke Kecamatan Rawajitu Selatan dan Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan candipuro di Kabupaten Lampung Selatan, dan Kecamatan Seputih Raman di Kabupaten Lampung Tengah.
 - 2) Combine Harvester Kecil sebanyak 17 unit diberikan kepada 8 kabupaten pada tahun 2014, dan sebanyak 168 unit diberikan kepada 13 kabupaten/kota pada tahun 2015.
 - 3) Vertical Dryer Padi dan Bangunan sebanyak 5 unit pada tahun 2014 diberikan ke Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, tanggamus, dan Lampung Tengah. Dan pada Tahun 2015

diberikan bantuan 7 unit vertical dryer ke kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Pesawaran.

- 4) Tahun 2015 juga telah diberikan bantuan sarana prasarana berupa Flat Bed Dryer sejumlah 3 unit diberikan ke Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.
- 5) Untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan berupa Vertical Dryer Jagung dengan jumlah total 16 unit, yang diberikan ke Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, dan Pringsewu.

2.2.3.2.2 Kehutanan

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung, kawasan hutan telah dipertahankan pada kisaran 30% dari wilayah daratan suatu provinsi (sesuai amanat UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan). Namun hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup parah sekitar 544.085 hektare atau 54,15 %. Yang terparah adalah Hutan Produksi sekitar 76,48%, Hutan Konservasi 37,38 % dan Hutan Lindung sekitar 62,73 %.

Kerusakan kawasan hutan yang tinggi tersebut secara bertahap dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan untuk turut serta dalam percepatan rehabilitasi, pengamanan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk Kawasan Hutan Lindung telah diimplemantasikan kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Berikut ini adalah progress kegiatan HKm di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 38
Progress Kegiatan HKm di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Izin Usaha HKm	
		Kelompok	(Ha)
1	Lampung Barat	50	24.760,66
2	Lampung Utara	6	5.875,00
3	Tanggamus	32	46.677,00
4	Lampung Tengah	9	13.135,86
5	Lampung Timur	1	920,00
6	Way Kanan	10	12.198,58
7	Lampung Selatan	5	3.132,00
8	Pringsewu	2	3.642,00
TOTAL		115	110.341,10

Selain Kegiatan HKm, pada awal tahun 2014 telah diinisiasi untuk pengembangan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung. Saat ini pada tahap verifikasi terhadap 22 Desa calon penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) yang mengelilingi Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Register 3 di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam meminimalisir kerusakan kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung telah mengimplemantasikan kegiatan nasional berupa Pembangunan HutanTanaman Rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Pesisir Kabupaten Pesisir Barat dengan luas 15.387 hektare yang dikelola oleh 8 Koperasi. Dalam kegiatan HTR ini masyarakat dalam wadah Koperasi diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan hasil kayu maupun non kayu. Kedepan kawasan hutan produksi yang belum dikelola oleh Pihak Ketiga dan bermasalah dengan perambahan, maka kegiatan HTR ini sangat potensial untuk dikembangkan.

Tidak hanya sampai disitu, upaya untuk menghijaukan lahan-lahan masyarakat di luar kawasan hutan negara melalui berbagai gerakan, antara lain Gerakan

Lampung Menghijau (GELAM) telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam upaya perbaikan lingkungan dan ekonomi masyarakat serta penyediaan bahan baku kayu rakyat untuk mendukung industri perkayuan di Provinsi Lampung. Namun di sisi lain persoalan perambahan dan konflik kawasan hutan masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian “extra” dalam kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 39

Konflik Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

No.	NAMA KAWASAN	FUNGSI HUTAN	KABUPATEN	PERMASALAHAN
1.	Way Pisang Reg. 1 & Pematang Taman Reg. 2	Produksi	Lampung Selatan	Transmigrasi dan Desa dalam Kawasan Hutan
2.	TangkitTitiBungur I Reg. 18	Produksi	Lampung Selatan	Desa dalam kawasan hutan dan sertifikasi lahan kawasan
3.	Kelompok KHP Way Ketibung I Reg. 5; Way Ketibung II Reg. 35; Way Kibang Reg. 37 & Gedong Wani Reg. 40	Produksi	Lampung Selatan	Desa dalam kawasan hutan dan penerbitan sertifikat lahan kawasan
4.	Rebang Reg. 42	Produksi	Way Kanan	Penggarapan Lahan
5.	Muara Dua Reg. 44	Produksi	Way Kanan & Tulang Bawang	Desa dalam kawasan hutan dan Klaim Tanah Adat
6.	Sungai Buaya Reg. 45	Produksi	Tulang Bawang	Desa dalam kawasan hutan, penerbitan sertifikat lahan kawasan & Klaim Tanah Adat
7.	Way Hanakau Reg. 46	Produksi	Way Kanan	Transmigrasi
8.	Way Terusan Reg. 47	Produksi	Lampung Tengah	Transmigrasi dan Desa dalam Kawasan Hutan
9.	Giham Tahmi	Produksi	Way Kanan	Desa dalam kawasan

No.	NAMA KAWASAN	FUNGSI HUTAN	KABUPATEN	PERMASALAHAN
				hutan
10.	GunungBalak Reg. 38	Lindung	Lampung Timur	Desa dalam kawasan hutan dan sertifikasi lahan kawasan
11.	PerintianBatu Reg. 21	Lindung	Tanggamus	Penerbitan sertifikat Lahan Kawasan
12.	Bukit Rigis Reg. 45B	Lindung	Lampung Barat	Pergeseran Batas Kawasan
13.	Bukit Rindingan Reg. 32	Lindung	Tanggamus	Transmigrasi
14.	PematangNeba Reg. 28	Lindung	Tanggamus	Transmigrasi
15.	Cagar Alam Laut Krakatau Reg. 50	Konservasi	Lampung Selatan	Klaim Tanah Adat
16.	TN. Way Kambas	Konservasi	Lampung Timur	Klaim Tanah Adat
17.	TN. Bukit Barisan Selatan	Konservasi	Tanggamus	Klaim Tanah Adat DAN penerbitansertifikat

2.2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi merupakan bagian penting dari pembangunan wilayah. Kekurangan suplai energi akan mempengaruhi besarnya minat investasi, terutama investasi berbasis teknologi. Saat ini total pasokan listrik yang masuk ke sistem kelistrikan Lampung sebesar 828 MW dengan beban puncak sebesar 819,6 MW, sehingga cadangan daya hanya sebesar 8,4 MW. Dengan kondisi ini maka saat terjadi pemeliharaan pembangkit atau PLTA dalam kondisi air turun maka suplai listrik dipastikan defisit. Dengan kondisi tersebut maka pengembangan Kawasan Industri Lampung mengalami stagnasi, karena investasi yang masuk tidak dapat dilayani suplai energi listriknya. Disisi lain rasio elektrifikasi baru mencapai 76,68% dengan jumlah pelanggan 1.564.817 rumah tangga.

2.2.3.2.4 Pariwisata

2.2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan kualitas. Nilai ekspor mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 291,442,519.23 US\$ menjadi 316.227.460,84 US\$, meskipun volume ekspor pada tahun 2013 sebesar 25.488 Ton sedangkan kondisi 10 Desember 2014 tercatat mencapai 24.775 Ton. Secara rinci kinerja bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 28,01 Kg/Kap/Tahun dari tahun 2013 sebesar 25,05 Kg/Kap/Tahun.
2. Peningkatan nilai eksport produk perikanan tahun 2014 sebesar US \$ 348.038.762,97 (Rp.4,176 Triliun) dari sebelumnya US \$ 292.528.045,24 (Rp.3,510 Triliun).
3. Pembangunan Breakwater Pelabuhan Perikanan Bengkunt
4. Peningkatan Produksi benih ikan tahun 2014 sebesar 13.227.569.543 ekor dibandingkan tahun 2013 sebesar 11.219.995.568 ekor.
5. Produksi benih Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan benih ikan di Provinsi Lampung dan memenuhi permintaan luar daerah Provinsi Lampung.
6. Peningkatan sarana dan prasarana BBIS Probolinggo melalui pembangunan Hatchery Indoor, sumur bor, dan rehab kolam
7. Telah dilakukan pembinaan teknis dan manajemen kepada Unit Pembenh Skala Kecil sebanyak 653 Unit.
8. Terbangunnya kapal penangkapan ikan INKAMINA sebanyak 3 unit kapal dan telah beroperasi.
9. Terbangunnya dermaga perikanan rakyat Batu Menyan di Desa Ketapang Menyan Kabupaten Pesawaran.
10. Pengembangan "Rumah Ikan" sebanyak 50 modul.

11. Telah dilakukan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan sebanyak 1.006 pemohon.
12. Telah dilakukan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) diprovinsi Lampung sebanyak 447 unit.
13. Pemberian bantuan kepada 151 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKKAN) @ Rp.35.000.000,- / Pokdakkan di Kab/Kota melalui PUMP Perikanan Budidaya dengan total bantuan dana sebesar Rp. 5.285.000.000,-

2.2.3.2.6 Perdagangan

2.2.3.2.7 Perindustrian

2.2.3.2.8 Ketransmigrasian

Provinsi Lampung telah menjadi daerah tujuan transmigrasi sejak zaman pendudukan Belanda yaitu tahun 1905 dengan istilah kolonisasi. Kolonisasi pertama memberangkatkan 155 kepala keluarga (KK) berasal dari Kedu, Jawa Tengah, menuju Gedong Tataan (saat ini masuk Kabupaten Pesawaran). Sejak saat itu wilayah Gedong Tataan menjadi wilayah kolonisasi yang berasal dari Banyumas, Tulung Agung, Kediri, Madura, dan lain-lain. Wilayah kolonisasi ini meluas ke Sukadana. Untuk memperingatinya, maka dibangun Museum Transmigrasi di Gedong Tataan, Pesawaran.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk (saat ini merupakan provinsi terbanyak kedua se-Sumatera setelah Sumatera Utara), maka Provinsi Lampung mengadakan program transmigrasi dengan daerah tujuan Kalimantan dan Sulawesi sejak tahun 2007. Berikut ditampilkan data pengiriman transmigrasi dari Provinsi Lampung ke Kalimantan dan Sulawesi tahun 2010 - 2014:

Tabel 2. 40
Data Pengiriman Transmigrasi Dari Provinsi Lampung Ke Kalimantan Dan
Sulawesi Tahun 2010 - 2014:

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
2010	40	181
2011	95	363
2012	70	259
2013	60	218
2014	11	37

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu syarat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan peran serta Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator (*agent of development*) untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Selain itu secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Di samping itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Namun demikian, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor riil, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan ke luar daerah.

Sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama, menyebutkan bahwa arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2016 masih merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi serta peningkatan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal daerah yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi kepada ekonomi nasional dan global. Di lain sisi ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan teknologi. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Secara lebih rinci kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain :

1. Menciptakan Kesempatan Kerja yang Tinggi

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan

sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment* dalam pengertian bahwa lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah dan swasta dapat dipenuhi oleh para pencari kerja.

2. Meningkatkan Kapasitas Produksi

Peningkatan kapasitas produksi merupakan suatu keharusan. Namun demikian di sisi lain peningkatan ini erat kaitannya dengan peningkatan investasi maupun *saving* yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan investasi dan *saving* akan terjadi ketika masyarakat memiliki tingkat pendapatan perkapita yang juga tinggi melalui peningkatan produktivitasnya maupun penggunaan dan pengembangan teknologi.

3. Meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Daya Beli Masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4. Menciptakan Kondisi Perekonomian Daerah yang Stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu pendapatan, kesempatan kerja serta tingkat harga barang. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

5. Pemerataan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

3.1.1 Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Lampung

Perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB Harga Berlaku mencapai Rp. 187,494 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 164,393 triliun. Menurut Harga Konstan, maka PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2014 mencapai Rp. 48,301 triliun (ADHK 2000) meningkat dari tahun 2013 yang sebesar Rp. 46,123 triliun.

Tabel 3.1
PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014

PDRB	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ADH BERLAKU (Juta rupiah)	88.934.861	108.404.270	127.908.260	144.639.476	164.393.428	187.494.589
ADHK TH 2000 (Juta rupiah)	36.256.295	38.389.899	40.858.942	43.526.870	46.123.346	48.301.530

Sumber : BPS Prov. Lampung
) Angka sementara

Meninjau PDRB disisi penawaran, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 perekonomian Lampung pada periode tahun 2009 s.d. 2014 didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu : sektor Pertanian, sektor Perdagangan/Hotel/Restoran, dan sektor Industri Pengolahan, yang terus diikuti dengan meningkatnya peran sektor Pengangkutan/Komunikasi. Di tahun 2014, masing-masing kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB adalah : sektor Pertanian dengan kontribusi 34,22 %, Perdagangan/Hotel/Restoran dengan kontribusi 16,68 %, Industri Pengolahan dengan kontribusi 15,61 % dan Pengangkutan/Komunikasi dengan kontribusi 11,97 %.

Tabel 3.2
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014
Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku (Juta Rupiah)

No.	SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹⁾
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	34.591.074	39.917.414	45.478.685	51.927.562	58.418.105	64.153.346
	distribusi	38,89%	36,82%	35,56%	35,90%	35,54%	34,22%
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1.860.403	2.161.754	2.672.150	2.903.528	3.357.875	3.658.846
	distribusi	2,09%	1,99%	2,09%	2,01%	2,04%	1,95%
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	12.514.338	17.120.714	20.555.157	22.481.435	25.517.406	29.261.614
	distribusi	14,07%	15,79%	16,07%	15,54%	15,52%	15,61%
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	518.964	595.503	691.203	796.376	913.992	1.091.740
	distribusi	0,58%	0,55%	0,54%	0,55%	0,56%	0,58%
5	BANGUNAN	3.742.874	3.968.970	4.397.009	4.855.562	5.187.493	6.080.743
	distribusi	4,21%	3,66%	3,44%	3,36%	3,16%	3,24%
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11.948.935	16.530.762	20.481.520	22.930.103	26.198.820	31.272.602
	distribusi	13,44%	15,25%	16,01%	15,85%	15,94%	16,68%
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	8.800.173	11.011.468	14.716.358	16.683.865	19.338.010	22.439.485
	distribusi	9,90%	10,16%	11,51%	11,53%	11,76%	11,97%
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	5.932.710	6.844.990	7.633.617	8.892.445	10.226.601	11.687.412
	distribusi	6,67%	6,31%	5,97%	6,15%	6,22%	6,23%

9	JASA-JASA	9.025.390	10.252.694	11.282.562	13.168.600	15.235.126	17.848.800
	distribusi	10,15%	9,46%	8,82%	9,10%	9,27%	9,52%
	PDRB	88.934.861	108.404.270	127.908.260	144.639.476	164.393.428	187.494.589

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Disisi permintaan, PDRB Lampung pada periode 2009-2014, lebih dari 50 persen perekonomian Lampung periode tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, diikuti dengan PMTB pada kisaran 17-18 persen dan konsumsi belanja pemerintah pada kisaran 10-12 persen, dengan nilai *nett* ekspor sekitar 25 persen, ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Th 2009-2014
Menurut Penggunaan ADH Berlaku (Juta Rupiah)

No	SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	51.445.080	57.545.531	65.624.263	75.171.836	85.880.755	96.743.552
	distribusi	57,85%	53,08%	51,31%	51,97%	52,24%	51,60%
2	PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	1.023.135	1.139.132	1.238.534	1.411.746	1.586.976	1.825.936
	distribusi	1,15%	1,05%	0,97%	0,98%	0,97%	0,97%
3	PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	11.217.767	12.649.780	14.014.848	15.790.062	17.696.368	19.158.546
	distribusi	12,61%	11,67%	10,96%	10,92%	10,76%	10,22%
4	PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTB)	16.299.817	18.667.584	22.130.674	25.656.641	28.983.843	33.165.233
	distribusi	18,33%	17,22%	17,30%	17,74%	17,63%	17,69%
5	PERUBAHAN STOK	421.717	-1.763.107	-208.544	-37.841	610.107	562.995
	distribusi	0,47%	-1,63%	-0,16%	-0,03%	0,37%	0,30%
6	EKSPOR BARANG DAN JASA	38.809.589	45.457.305	54.606.538	64.941.271	69.508.570	84.490.529
	distribusi	43,64%	41,93%	42,69%	44,90%	42,28%	45,06%
7	DIKURANGI IMPOR BARANG DAN JASA	30.282.244	25.291.955	29.498.053	38.294.240	39.873.191	48.452.202
	distribusi	34,05%	23,33%	23,06%	26,48%	24,25%	25,84%
	JUMLAH PDRB	88.934.861	108.404.270	127.908.260	144.639.476	164.393.428	187.494.589

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

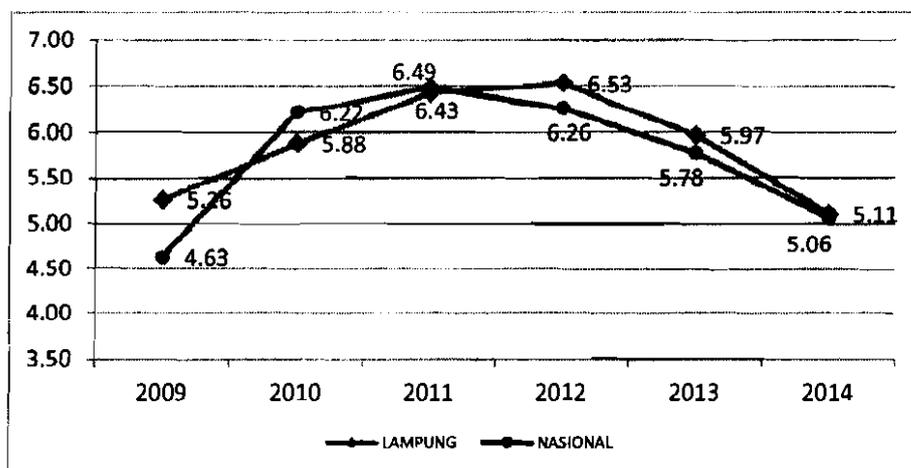
Merujuk pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.1, dapat dipaparkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada periode tahun 2009-2014 adalah 5,86 persen, sejalan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dip periode tersebut. Pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,11 persen (atau 5,08 persen ADHK Th. 2010), melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06 persen (atau 5,02 persen ADHK Th. 2010).

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2014

PERYAJAAN	2009*)	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014**)	2014***)
LAMPUNG (%)	5,26	5,88	6,43	6,53	5,97	5,11	5,08
NASIONAL (%)	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78	5,06	5,02

Sumber : BPS Prov. Lampung
 *)Tahun Dasar 2000
 **) Angka sementara ADHK Tahun 2000
 ***) Angka sementara ADHK Tahun 2010

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2014



Pertumbuhan ekonomi disisi penawaran selama periode 2009-2014, rata-rata laju pertumbuhan dari seluruh sektor tumbuh di atas 5 persen, kecuali sektor pertanian dan pertambangan/penggalian. Untuk kedua sektor tersebut tumbuh melambat bahkan cenderung menurun. Di tahun 2014 tercatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian berada pada tingkat 2,67% yang berarti menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,95%. Sementara itu, pertumbuhan pada sektor pertambangan/penggalian hanya tumbuh 1,77% di tahun 2014 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,66%. Demikian pula pada sektor industri pengolahan, tumbuh lebih rendah dari 7,56% pada tahun 2013 menjadi 4,5 % di tahun 2014 (Tabel 3.5).

Memperhatikan data pertumbuhan sektoral pada tiga tahun terakhir, tampak bahwa sektor-sektor *tradable* (pertanian, pertambangan/penggalian, industri pengolahan) yang merupakan *engine of growth* dan memiliki *linkage effect* yang besar untuk pengembangan sektor lainnya, tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor *non tradable*. Secara singkat, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak riil.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014
Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2000

No	SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	2,63%	1,07%	4,96%	4,20%	3,95%	2,67%	3,25%
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-9,21%	-3,38%	13,48%	4,28%	10,66%	1,77%	2,93%
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5,88%	6,11%	4,88%	4,39%	7,56%	4,50%	5,55%
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2,84%	10,41%	9,86%	11,51%	10,05%	8,56%	8,87%

5	BANGUNAN	4,87%	3,71%	7,77%	5,82%	2,50%	7,85%	5,42%
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	7,60%	4,78%	5,50%	5,59%	4,70%	6,66%	5,81%
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	11,47%	15,42%	12,98%	13,73%	7,83%	7,56%	11,50%
8	KEUANGAN, PERSEWAAN OAN JASA PERUSAHAAN	12,91%	26,88%	7,48%	12,44%	9,48%	6,12%	12,55%
9	JASA-JASA	5,59%	5,59%	8,24%	9,42%	9,39%	9,48%	7,95%

Sumber BPS Prov. Lampung

**) Angka sementara

Pertumbuhan PDRB disisi penggunaan (permintaan), tampak bahwa pertumbuhan PMTB selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan, terutama di tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 1,57 persen.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2014
Menurut Penggunaan ADH Konstan Tahun 2000

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	20.748.709	21.861.261	23.073.024	24.546.211	26.252.446	27.940.495
	pertumbuhan	5,28%	5,36%	5,54%	6,38%	6,95%	6,43%
2	PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA	446.562	464.017	489.233	515.362	537.496	573.655
	pertumbuhan	10,62%	3,91%	5,43%	5,34%	4,29%	6,73%
3	PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	4.872.516	5.130.424	5.235.585	5.359.176	5.502.001	5.660.551
	pertumbuhan	6,89%	5,29%	2,05%	2,36%	2,67%	2,88%
4	PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTB)	5.766.588	6.174.634	6.748.875	7.358.682	7.817.713	7.940.526
	pertumbuhan	3,82%	7,08%	9,30%	9,04%	6,24%	1,57%
5	PERUBAHAN STOK	177.772	-762.357	74.714	-1.722.401	-1.931.081	-268.455
	pertumbuhan	-106,62%	-528,84%	-109,80%	-2405,31%	-12,12%	-81,17%
6	EKSPOR BARANG DAN JASA	18.944.629	17.974.083	22.690.157	23.992.303	30.054.675	35.750.892
	pertumbuhan	-9,81%	-5,12%	26,24%	5,74%	25,27%	19,44%
7	DIKURANGI IMPOR BARANG DAN JASA	14.700.482	12.452.162	17.452.646	16.522.464	22.109.903	29.296.133
	pertumbuhan	4,24%	-15,29%	40,16%	-5,33%	33,82%	29,26%

	JUMLAH PDRB	36.256.295	38.389.899	40.858.942	43.526.870	46.123.346	48.301.530
	pertumbuhan	5,26%	5,88%	6,43%	6,53%	5,97%	5,11%

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Pertumbuhan PDRB dapat dipacu dengan meningkatkan nilai investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output adalah ICOR. Memperhatikan perkembangan ICOR Provinsi Lampung tahun 2010-2014 tercatat bahwa ICOR selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2014 ICOR Provinsi Lampung sebesar 3,65 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Rasio PMTB Terhadap PDRB dan Perkembangan ICOR
Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
RASIO PMTB TERHADAP PDRB	16,08	16,52	16,91	16,95	16,44
ICOR (%)	2,89	2,73	2,76	3,01	3,65

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Secara umum pendapatan setiap penduduk dalam suatu wilayah dicerminkan oleh PDRB perkapita. Angka PDRB perkapita digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan digunakan untuk mendeteksi adanya kemajuan perbaikan tingkat kesejahteraan riil dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku lebih menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara umum mengkonsumsi barang dan jasa pada tahun tertentu.

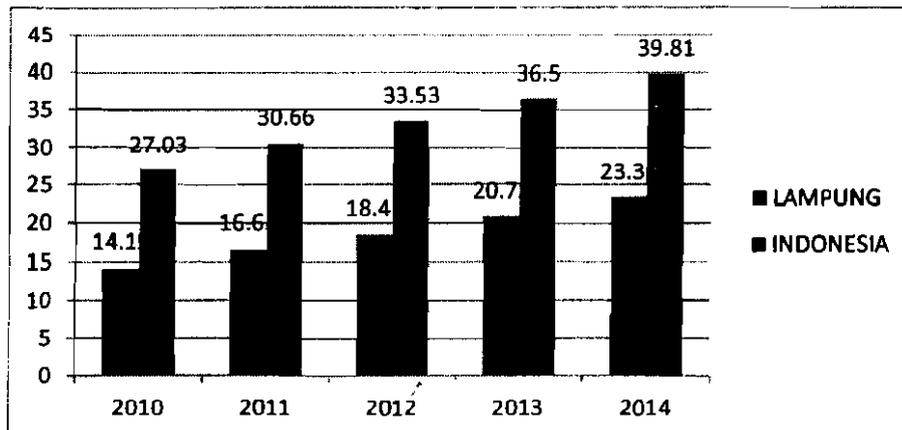
Tabel 3.8
PDRB Perkapita Provinsi Lampung
Dan Nasional Tahun 2010-2014

Indikator	Lokasi	2010	2011	2012	2013	2014*)
PDRB Perkapita ADH Berlaku (Juta rupiah)	Lampung	19,72	21,98	23,91	25,77	28,78
	Indonesia	27,03	30,66	33,53	36,50	39,81
PDRB Perkapita ADHK Th. 2000 (Juta rupiah)	Lampung	5,03	5,31	5,55	5,81	6,02
	Indonesia	9,28	9,70	10,22	11,06	11,48

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Angka sementara

Pada periode tahun pengamatan, PDRB perkapita Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan. Namun demikian, keadaan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB perkapita secara nasional.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014
ADH Berlaku (Juta Rupiah)



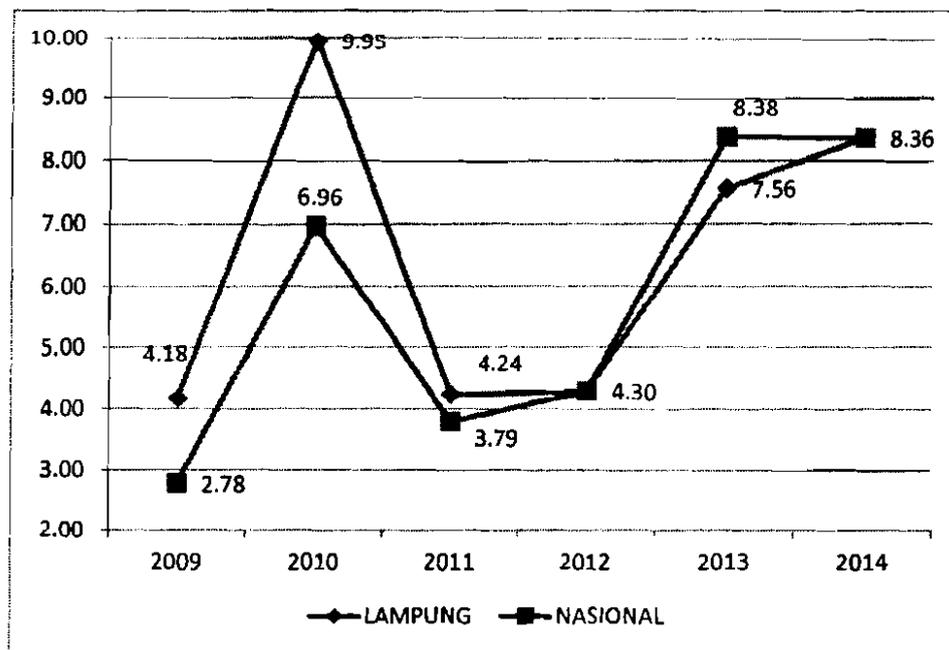
Tabel 3.9
Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2014

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LAMPUNG *) (%)	4,18	9,95	4,24	4,30	7,56	8,36
NASIONAL (%)	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36

Sumber : BPS Prov. Lampung
*) Kota Bandar Lampung

Mengaitkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Tabel 3.4) dan tingkat inflasi (Tabel 3.9) pada tahun-tahun terakhir periode, tampak bahwa perekonomian Lampung mengalami tekanan laju inflasi dimana tingkat pertumbuhan ekonomi melambat, sementara laju inflasi merangkak naik melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi. Diakhir tahun 2014, laju inflasi sebesar 8,36 persen setara dengan laju inflasi nasional di tahun yang sama. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari golongan komoditas *administered price* (kenaikan BBM pada triwulan IV tahun 2014) yang berdampak pada komoditas *volatile food*. Sementara untuk inflasi inti masih mengalami kenaikan namun tetap terkendali.

Grafik 3.3
Tingkat Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2014



3.1.2 Kinerja Sosial Ekonomi Provinsi Lampung

3.1.2.1 Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak selamanya berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan ketika pertumbuhan tersebut hanya ditopang oleh sektor-sektor usaha yang memiliki elastisitas lapangan kerja yang rendah. Beberapa masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, antara lain masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memiliki makna bila diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

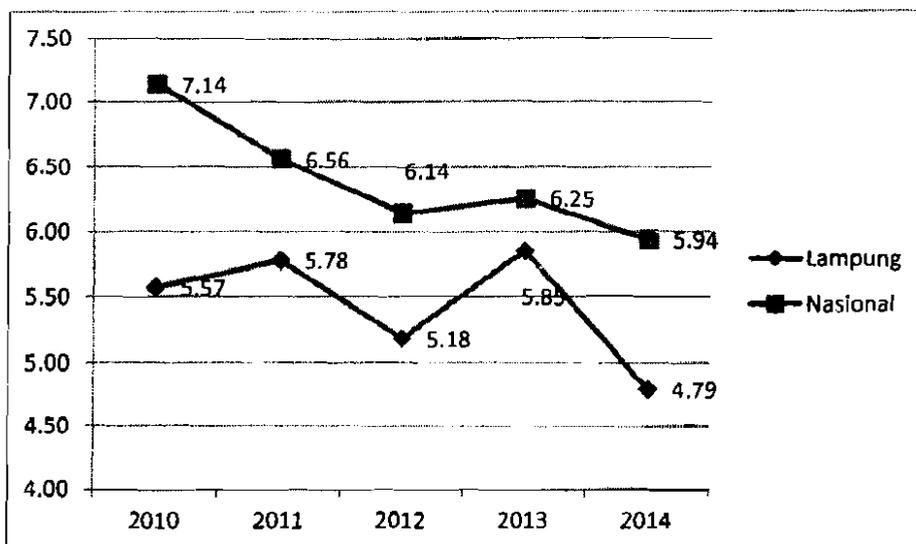
Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Lampung (%)	5,57	5,78	5,18	5,85	4,79
Nasional (%)	7,14	6,56	6,14	6,25	5,94

Sumber : BPS Prov. Lampung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 menurun dari 5,85% atau sekitar 209,5 ribu orang di tahun 2013 menjadi 4,79% atau sekitar 184,8 ribu orang pada tahun 2014. Dalam skala nasional, TPT Provinsi Lampung pada periode tahun 2010-2014 masih berada dibawah TPT nasional. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian untuk terus menekan angka TPT.

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014



Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Terbukanya lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan perekonomian dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian (produktivitas dan pendapatan masyarakat). Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur tidak memiliki kemampuan atau harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Akibat jangka panjang

adalah menurunnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3.1.2.2 Persentase Penduduk Miskin

Memperhatikan Tabel 3.11, meskipun penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode 2010 s.d. 2014 mengalami penurunan, namun data statistik menunjukkan bahwa angka tersebut masih berada di atas persentase penduduk miskin secara nasional. Bila tingkat kemiskinan tersebut dikaitkan dengan data LPE, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dari LPE nasional, namun keadaan tersebut justru sangat berbeda bila dibandingkan dengan persentase/tingkat kemiskinan dari penduduk.

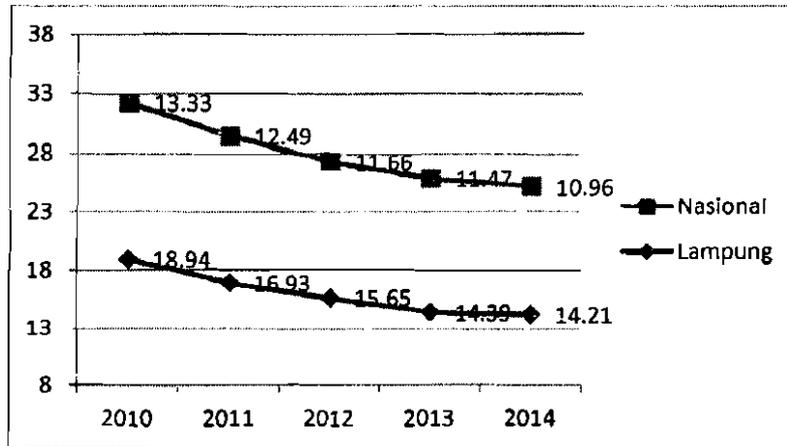
Memperhatikan Tabel 3.11, meskipun penduduk miskin Provinsi Lampung pada periode 2010 s.d. 2014 mengalami penurunan, namun data statistik menunjukkan bahwa angka tersebut masih berada di atas persentase penduduk miskin secara nasional. Bila tingkat kemiskinan tersebut dikaitkan dengan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), meskipun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dari LPE nasional, namun keadaan tersebut justru sangat berbeda bila dibandingkan dengan persentase/tingkat kemiskinan dari penduduk.

Tabel 3.11
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014

LOKASI	2010	2011	2012	2013	2014
Lampung (%)	18,94	16,93	15,65	14,39	14,21
Nasional (%)	13,33	12,49	11,66	11,47	10,96

Sumber : BPS Prov. Lampung

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010-2014



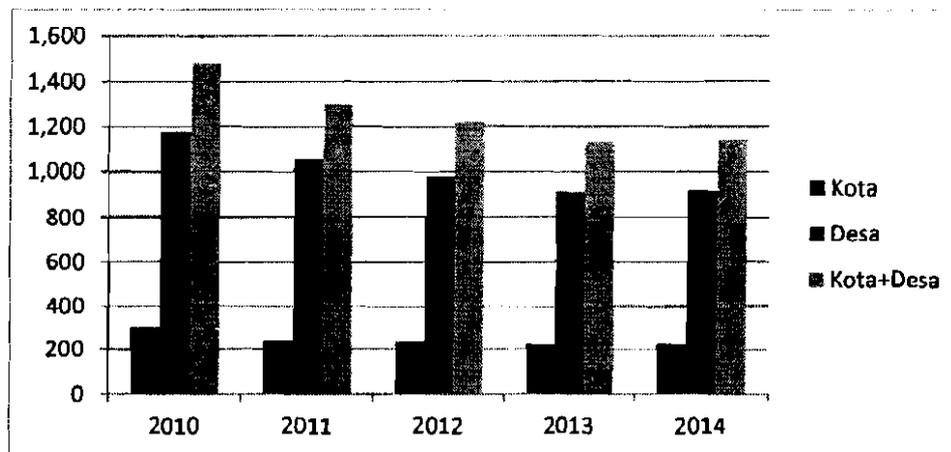
Perlu diketahui, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli. Untuk dapat keluar dari status kemiskinan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) faktor utama yang perlu dikendalikan oleh pemerintah. *Pertama*, menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar agar dapat terjangkau, seperti : ketersediaan barang/jasa, efisiensi dan pengawasan jalur distribusi barang/jasa, pengendalian inflasi, dan regulasi yang berpihak pada golongan ekonomi lemah. *Kedua*, melakukan upaya-upaya meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat secara umum.

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribuan jiwa)

Tipe Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
Kota	301,70	241,94	237,90	222,75	224,21
Desa	1.178,20	1.056,77	981,10	911,53	919,73
Kota + Desa	1.479,90	1.298,71	1.219,00	1.134,28	1.143,93

Sumber : BPS Prov. Lampung

Grafik 3.6
Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Ribuan jiwa)



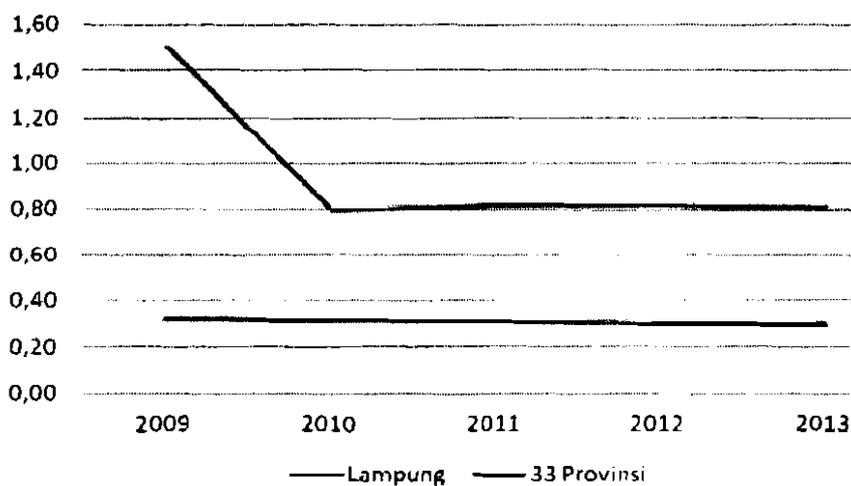
Meninjau Tabel 3.12, tampak bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung perlu diarahkan pada kegiatan di wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur pedesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan

sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

3.1.2.3 Indeks *Williamson*

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumberdaya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Grafik 3.7
Indeks *Williamson* Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2013



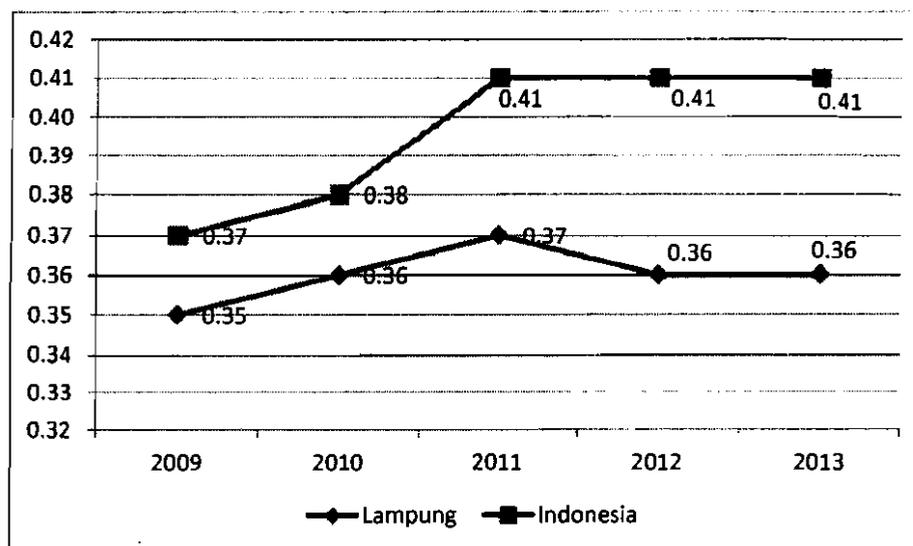
Meskipun cukup lambat, Indeks *Williamson* Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2009-2013 cenderung menurun. Nilai indeks 0,27 di tahun 2009 turun menjadi 0,24 di tahun 2013, masih dibawah nilai Indeks *Williamson* secara nasional. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut

masih berada pada tingkat kesenjangan antar wilayah yang masih rendah. Namun demikian, penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar wilayah tetap menjadi agenda penting dan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam perumusan perencanaan pembangunan, diarahkan pada upaya mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.

3.1.2.4 Indeks Gini

Sampai dengan tahun 2013, Indeks Gini Provinsi Lampung belum banyak bergerak dari catatan nilai indeks di tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan dengan nilai Indeks Gini nasional, maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada di bawah nilai Indeks Gini secara nasional.

Grafik 3.8
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2009-2013



Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas, dan konflik antar kelompok masyarakat. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat terus mendapatkan prioritas, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

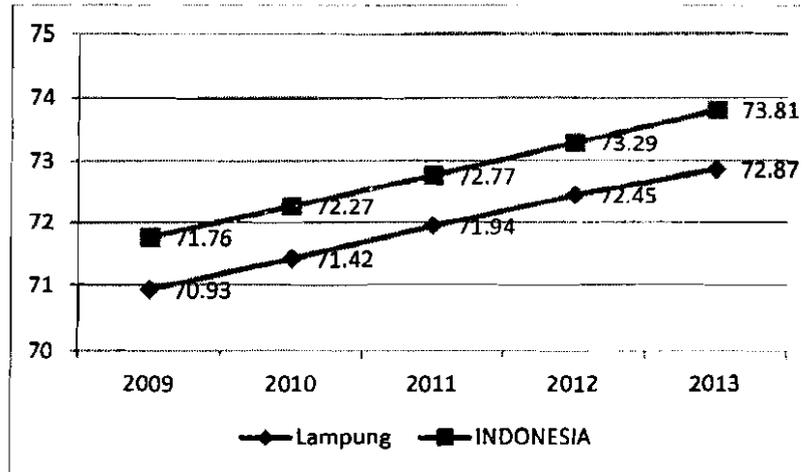
Dalam konteks kenegaraan, kesenjangan pendapatan antar kelompok akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam stabilitas. Oleh karenanya, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah dengan upaya-upaya signifikan yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengembangkan usaha kecil dan menengah, sehingga mampu mengangkat kualitas dan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan tidak sekedar dipandang dari sisi ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Indikator IPM menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang berpijak pada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Dinamika kependudukan mempunyai keterkaitan dan saling berpengaruh terhadap keberhasilan diberbagai bidang pembangunan. IPM tidak hanya menggambarkan kualitas

penduduk, namun dapat dipandang sebagai salah satu pendukung daya saing daerah.

Grafik 3.9
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia



Pada periode tahun 2009 s.d. 2013 IPM Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah IPM nasional. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2016 dan 2017

Sebagai bagian dari kesatuan perekonomian global dan nasional, maka tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Lampung akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global.

3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional dan Global

Memasuki tahun 2015, kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai belahan negara ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus tertekan dan cenderung melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok yang menjadi salah satu sumber utama permintaan dan penentu dinamika harga komoditas global. Diantara negara ekonomi besar, aktivitas ekonomi di Amerika Serikat mulai pulih, tetapi terjadi pelambatan di kawasan Eropa dan Jepang, sementara proses rebalancing ekonomi Tiongkok masih berlanjut. Situasi di tataran global tersebut diperberat oleh berbagai permasalahan struktural pada perekonomian domestik, yang sesungguhnya bukanlah suatu hal baru karena telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan struktural tersebut antara lain adalah kualitas infrastruktur dan SDM yang belum mendukung secara optimal, ekspor yang masih didominasi produk berbasis SDA, ketahanan pangan dan energi yang masih rendah, pasar keuangan yang masih dangkal, serta ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang meningkat.

Kombinasi situasi global yang kurang kondusif dan sejumlah permasalahan domestik yang masih mengemuka tersebut pada gilirannya meningkatkan risiko instabilitas perekonomian, yang terlihat pada berbagai indikator seperti neraca pembayaran, nilai tukar dan inflasi. Meski Indonesia merupakan negara penghasil dan pengeksport minyak, namun impor minyak Indonesia lebih besar dari pada ekspor. Disatu sisi, hal ini berdampak positif pada

perdagangan, tapi disisi yang lain pengaruh utama pada ekonomi akan juga tergantung pada dampak dan tanggapan di sektor fiskal dan energi.

Menghadapi sejumlah tantangan dan risiko tersebut, Pemerintah bersama dengan otoritas moneter memperkuat sinergi dan menempuh berbagai jalur kebijakan dengan tetap memprioritaskan stabilitas makro ekonomi dan terus mendorong reformasi struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian nasional. Kombinasi kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi Nasional

No.	URAIAN	TARGET KINERJA		
		2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan PDB (%)*)	5,8	6,6	7,1
2.	PDB per Kapita (ribu Rp) *)	47.804	52.686	58.489
3.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,0	4,0	4,0
4.	Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	12.200	12.150	12.100
5.	Tingkat Pengangguran (%)	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 -10,5	9,0-10,0	8,5-9,5

Sumber : RPJMN 2015-2019

Dalam jangka menengah, prospek perekonomian diharapkan berada dalam lintasan yang terus meningkat dengan inflasi yang lebih rendah, perlu didukung oleh peningkatan produktivitas secara keseluruhan sehingga pada gilirannya meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan reformasi energi yang ditempuh Pemerintah pada bulan November 2014 merupakan “kebijakan sulit tapi perlu” guna memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja modal dan realokasi anggaran pada sektor-sektor yang lebih produktif. Menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditempuh pemerintah, tantangan pengendalian makro ekonomi tahun 2015 memerlukan kerja keras pemerintah untuk mematahkan resiko kenaikan ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasarannya. Disisi lain, pemerintah terus menggalang lahirnya investasi luar dan dalam negeri melalui berbagai upaya promosi dan kerjasama, seraya mengumpulkan lebih banyak penerimaan negara melalui berbagai terobosan regulasi pendukung guna memacu perekonomian dimasa mendatang.

Dengan perbaikan perekonomian global yang terus berlanjut, perekonomian Indonesia tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski diawal tahun 2015 pertumbuhan ekonomi nasional masih melambat, pada akhir tahun 2015 pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan meningkat pada kisaran 5,4-5,8% dengan inflasi diperkirakan pada kisaran sasaran $4\pm 1\%$.

Beberapa resiko patut dicermati bersama, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata. Di tingkat regional, Indonesia menghadapi tantangan baru seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada

akhir 2015. Dari domestik, perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi, daya saing industri dan perdagangan, sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan ekonomi yang inklusif, serta mantapnya modal dasar pembangunan.

Sesuai target pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 diantara 6,4 persen hingga 6,6 persen, inflasi 4 persen, angka kemiskinan 9-10 persen, pengangguran 5,2-5,5 persen, rasio penerimaan pajak 13,3 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pangan, maritim, industri, sebagai agenda prioritas nasional.

Dalam publikasi Bank Indonesia, perwujudan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah tersebut mensyaratkan empat pilar fundamental perekonomian yang kokoh, yaitu: 1) kedaulatan pangan dan energi, 2) adanya sektor industri yang berdaya saing global dan menyediakan lapangan kerja yang layak, 3) tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, dan 4) terbukanya akses yang lebih merata (inklusif) terhadap berbagai peluang ekonomi.

Empat pilar perekonomian yang kokoh tersebut selanjutnya mensyaratkan adanya lingkungan perekonomian yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing kegiatan investasi dan kewirausahaan oleh sektor swasta. Untuk mewujudkan lingkungan tersebut diperlukan ketersediaan dua fondasi pendukung utama yaitu: (i) modal dasar pembangunan yang berkualitas dan

memadai, mencakup infrastruktur konektivitas fisik dan digital, modal manusia, inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang kuat, dan (ii) stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang kokoh. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa tantangan untuk memperkuat keempat pilar fundamental perekonomian domestik dan kedua fondasi ekonomi tersebut masih mengemuka.

Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makro ekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada tahun 2016, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,6-6,0% dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga. Namun, prospek positif tersebut akan diikuti dengan defisit transaksi berjalan yang sedikit meningkat sejalan dengan peningkatan impor terkait dengan proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini diperkirakan hanya bersifat temporer dan bersifat lebih produktif karena terkait dengan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan defisit transaksi berjalan ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Pada tahun 2016, dengan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi, diperkirakan inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi $4\pm 1\%$. Sumber tekanan inflasi antara lain diperkirakan berasal dari permintaan domestik yang meningkat di tengah turunnya harga komoditas yang semakin terbatas. Inflasi inti diperkirakan masih akan terjaga dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diperkirakan akan

cenderung menurun seiring dengan peningkatan produksi bahan makanan dan tata niaga yang lebih baik. Inflasi administered prices diperkirakan tetap pada level yang rendah apabila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga barang/jasa yang bersifat strategis.

3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Lampung

Prospek perekonomian Provinsi Lampung di tahun 2015, 2016 dan 2017 dipengaruhi oleh kinerja perekonomian nasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Berdasarkan data dan *release* BPS Provinsi Lampung menunjukkan Perekonomian Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I-2015 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,01 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 12,38 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 12,18 persen. Selain itu Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan juga tumbuh di atas angka 8 persen. Sedangkan jika dibandingkan terhadap triwulan IV Tahun 2014 maka perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2015 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 6,79 persen yang didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi dan palawija yang memasuki masa panen, menjadikan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 38,74 persen. Selain Pertanian,

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami pertumbuhan yang positif. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) dimana kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi (-17,15 persen) dan Pengadaan Listrik dan Gas (-10,31 persen).

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT); PMTB & PI, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,75 persen; diikuti PMTB & PI sebesar 2,43 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,09 persen.

Struktur PDRB Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Lampung secara berturut-turut adalah PMTB & PI, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Nett Ekspor, dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I-2015 (*y-on-y*), maka Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan

tertinggi, yakni sebesar 3,38 persen, diikuti komponen PMTB & PI sebesar 0,74 persen.

Sedangkan jika dibandingkan antar triwulan maka triwulan I-2015 terhadap triwulan IV-2014 (q-to-q) tumbuh sebesar 6,79 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 0,03 persen.

Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 masih terbuka lebar dengan asumsi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah dapat terkendali. Dengan memperhatikan berbagai kondisi dan situasi baik pada skala global dan nasional maka kondisi perekonomian Provinsi Lampung diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Beberapa Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial Ekonomi
Provinsi Lampung

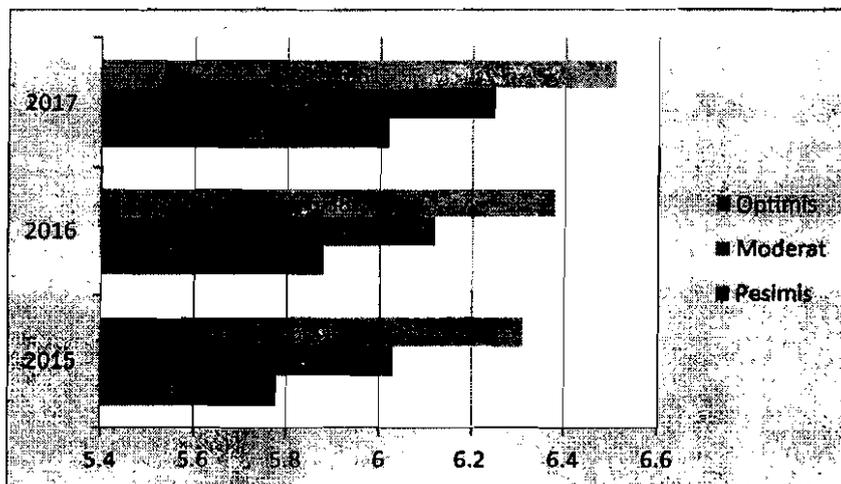
No	URUTAN	TARGET KINERJA		
		2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung (%)	35,25	35,80	35,73
2.	PDRB per kapita (konstan)	7,090	7,106	7,106-7,500
3.	Pertumbuhan ekspor non migas (%)	6,00	6,25	6,30
4.	Nilai Tukar Petani (NTP)	124,53	125,64	125,65
5.	Pertumbuhan PAD (%)	2,64	8,84	10,28
6.	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi (%)	65	70	75
7.	Persentase Kemantapan Jalan Negara (%)	85,50	87,25	92,25
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,18	4,56	4,01
9.	Kemiskinan (%)	12,86	11,86	10,86

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung, 2015-2019

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,88% hingga

6,38%. Sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan berada pada kisaran 6,02% hingga 6,51%. Prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 dan 2017 ini diperkirakan akan dapat dicapai dengan bertumpu pada 4 (empat) sektor utama yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian agar pertumbuhan ekonomi memiliki makna sebagai ukuran *welfare* maka tekanan inflasi tetap menjadi perhatian utama dan diusahakan berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

Grafik 3.10
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung
Periode 2015-2017



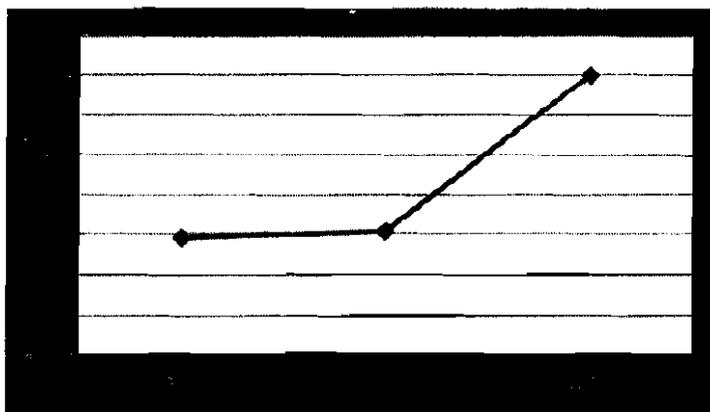
- Kontribusi sektor pertanian selama periode 2015-2016 akan meningkat dari 35,25% menjadi 35,80% seiring dengan keberpihakan Pemerintah pada sektor ini melalui berbagai kegiatan yang digulirkan kepada petani dengan sasaran akhir swasembada pangan. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) dan Perluasan Areal Tanam (PAT) merupakan contoh kegiatan yang

sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung tercapainya swasembada pangan khususnya terhadap 3 komoditas utama yaitu padi, jagung dan kedelai.

Prospek peningkatan kontribusi nilai tambah dari sektor pertanian akan terus didorong melalui kegiatan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil-hasil pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias. Selain itu sebagai sentra perkebunan maka perlu diupayakan peningkatan areal tanam tanaman perkebunan rakyat, yaitu usaha perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanam kurang dari 25 hektar; serta perkebunan besar yaitu tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau rakyat dengan luas areal tanam lebih besar atau sama dengan 25 hektar. Masyarakat juga perlu didorong untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang meliputi usaha pemeliharaan segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas baik yang bertujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong, maupun untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya. Demikian juga halnya pada wilayah perikanan yang meliputi segala pengusaha perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan, maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik di sungai maupun perairan air tawar, termasuk juga pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan rumah tangga.

- Peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2015-2017 pendapatan perkapita masyarakat (konstan) diharapkan meningkat dari Rp. 7,090 juta di Tahun 2015 menjadi Rp. 7,500 juta di Tahun 2017. Peningkatan pendapatan perkapita akan berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) dan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat secara bruto.

Grafik 3.11
Proyeksi Pendapatan perKapita Penduduk Lampung
Periode 2015-2017

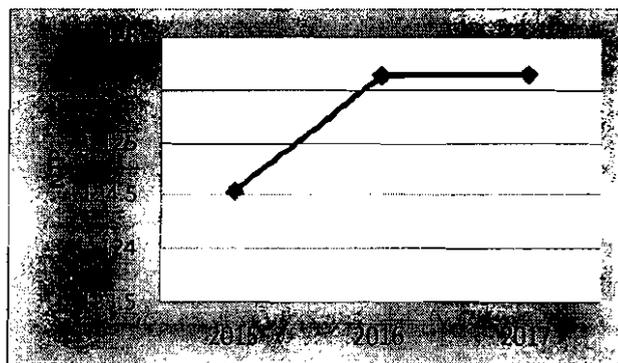


- Pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Lampung diperkirakan akan tetap tumbuh dari 6% di Tahun 2015 menjadi 6,25% di Tahun 2016 dan 6,30% di Tahun 2017. Peningkatan nilai ekspor non migas ini terutama ditunjang oleh komoditas minyak kelapa sawit, kopi, batubara, lada hitam, bahan kertas, udang segar/beku, dan buah/sayuran olahan. Sedangkan negara tujuan utama ekspor Lampung adalah India, Jepang, Taiwan, Tiongkok (Asia); Italia Belanda, Spanyol (Eropa); Amerika, Australia,

Oceania, dan Afrika. Namun demikian perhatian tetap harus diberikan terhadap munculnya hambatan berupa perkembangan eksternal yang diliputi resiko ketidakpastian dan *barrier to entry* dalam isu lingkungan yang dibuat negara utama tujuan ekspor.

- Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung, diperkirakan NTP akan menguat dari tahun ke tahun. Trend peningkatan NTP terjadi dari tahun 2015 yang mencapai 124,53 menjadi 125,64 di tahun 2016 serta 125,65 di tahun 2017 dan hal ini sejalan dengan trend peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung.

Grafik 3.12
Proyeksi NTP Provinsi Lampung Periode 2015-2017



- Salah satu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi di bidang fiskal yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dari sisi penerimaan daerah, terdapat 3 (tiga) sumber penerimaan yang terdiri dari : (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana perimbangan, serta (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama ini sebagian besar Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Lampung lebih mengandalkan kepada sumber penerimaan yang berasal dari dana perimbangan untuk membiayai belanja pemerintah daerah, sementara *action* pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih memerlukan dorongan secara lebih optimal.

Perhatian kepada sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai arti penting karena dengan semakin besarnya penerimaan daerah dari sumber-sumber tersebut dapat dijadikan ukuran yang menunjukkan kemandirian daerah untuk membangun wilayahnya atas kekuatan sendiri. Penerimaan daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan berpengaruh secara langsung terhadap sisi permintaan agregat yang kemudian dapat mendorong peningkatan sisi penawaran agregat dalam perekonomian daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) disatu sisi menunjukkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan

kemandirian daerah, namun disisi yang lain jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada pelaku usaha di daerah dan dalam kondisi lain dapat menyebabkan terjadinya *capital flight* pada tataran regional.

Sejalan dengan hal tersebut dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional. Oleh karenanya target pertumbuhan penerimaan PAD pada Tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 8,84% dan 10,28%. Peningkatan penerimaan PAD ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan bahwa rasio penerimaan PAD terhadap pendapatan regional saat ini masih berada pada kisaran < 5% sehingga potensi pajak dan retribusi yang tersedia masih cukup besar.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah akan diterapkan pada pos-pos pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kelompok objek pajak yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

- Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Salah satu infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kondisi

infrastruktur jalan yang baik mampu menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat (barang dan manusia/penumpang), dan menghubungkan *resources* dan hasil produksi ke pasar (perdagangan/*trade*). Kondisi jalan yang baik juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti perdagangan antar wilayah, perluasan pasar, terciptanya kompetisi, penyebaran pengetahuan, dan meningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap sarana pendidikan dan kesehatan dimana pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi salah satu syarat yang dituntut oleh para investor untuk menanamkan modalnya di daerah selain faktor keamanan, perizinan dan sosial budaya masyarakat. Untuk alasan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kemantapan kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional. Dari keseluruhan panjang jalan Provinsi yang mencapai 1.702,81 km, pada tahun 2017 kemantapan Jalan Provinsi ditargetkan mencapai 75% mantap (1.277,11 km), meningkat dari tahun 2016 yang ditargetkan 70% (1.191,97 km) mantap serta 65% mantap (1.106,83 km). Sedangkan kemantapan jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung ditargetkan menjadi 92,25% mantap (1.069,70 km) di tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yang ditargetkan 87,25% mantap (1.011,72 km) dan 2015 yang ditargetkan 85,50% mantap (991,43 km) yang dihitung dari keseluruhan panjang jalan nasional di Provinsi Lampung sepanjang 1.159,57 km.

- Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan juga diskenariokan akan menurun selama periode Tahun 2015-2017 sebagai imbas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor produktif yang menyerap tenaga kerja. Rata-rata penurunan tingkat pengangguran terbuka selama 3 tahun direncanakan sebesar 12% per tahun, sedangkan penurunan kemiskinan sebesar 8% per tahun. Pengangguran dan kemiskinan merupakan 2 (dua) hal yang saling berkaitan dan tidak bisa ditentukan kondisi mana yang menjadi penyebab terjadinya kondisi yang lain (*viscious cycle*). Satu hal yang patut menjadi perhatian bahwa penambahan pengangguran disebabkan oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada. Selain itu terdapat kecenderungan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan fisik yang bersifat padat modal daripada padat tenaga kerja dan berimplikasi pada pendekatan pembangunan berbasis investasi dan pengurangan proyek padat karya. Salah satu solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi di daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- Kebijakan nasional yang diperkirakan akan menjadi tantangan perekonomian Provinsi Lampung adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas

investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia termasuk perekonomian di Provinsi Lampung.

Dampak positif MEA bagi perekonomian Indonesia secara umum maupun Provinsi Lampung secara khusus diantaranya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang yang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Dampak Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan skill, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.

Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus diperhatikan. Hambatan tersebut di antaranya : *Pertama*, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.

Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut *Global Competitiveness Index (GCI) 2014*, kualitas infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. *Ketiga*, sektor industri yang masih rapuh karena ketergantungan impor akan bahan baku dan barang setengah jadi. *Keempat*, keterbatasan pasokan energi. *Kelima*, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia termasuk Provinsi Lampung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;

- f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi :
- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Perkembangan realisasi pendanaan pembangunan Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2012-2014 serta proyeksi pendapatan tahun 2016 dari berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.15
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2012 s.d Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)

NO	Uraian	Realisasi			Proyeksi 2016
		2012	2013	2014	
	PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG	3.760.547	3.912.732	4.559.503	5.073.505
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.706.131	1.782.079	2.307.656	2.528.940
	Pajak Daerah	1.465.711	1.547.336	1.946.452	2.292.408
	Retribusi Daerah	8.190	10.070	9.253	8.495
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	21.270	25.144	25.462	27.389
	Lain Lain PAD Yang Sah	210.958	199.528	326.487	196.268
2.	Bagian Dana Perimbangan	1.280.942	1.384.043	1.472.486	1.705.746
	Bagi Hasil Pajak	165.018	145.424	142.641	141.963
	Bagi Hasil Bukan Pajak	145.696	117.848	144.940	222.739

NO.	Uraian	Realisasi			Proyeksi Moderat 2016
		2012	2013	2014	
	Dana Alokasi Umum	939.139	1.060.663	1.136.053	1.288.284
	Dana Alokasi Khusus	31.087	60.108	48.851	52.759
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	773.473	746.609	779.360	838.818
	Pendapatan Hibah	773.473	22.430	22.926	23.205
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dr Provinsi & Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	0,00	724.178	748.609	815.555
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	7.824	58

Selama kurun waktu tahun 2012-2014, sumber dana pembangunan APBD Provinsi Lampung secara prosentase cenderung berimbang proporsinya baik dari sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah maupun dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2016, secara moderat pendapatan Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai Rp. 5,073 trilyun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 11,27% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 5,559 trilyun.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terusmeningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan

pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 33% dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
3. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN

(khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP).

4. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 16,5%, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan : konkuren yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Sementara, belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga

disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk implikasi terhadap penganggaran belanja pemerintah daerah. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, bahwa pada bulan Maret 2016 mendatang Pemerintah Provinsi Lampung selesai melaksanakan inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren. Sementara itu, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dilaksanakan sebelum bulan Oktober 2016. Disisi belanja, penyelesaian P3D perlu ditindaklanjuti dengan tambahan alokasi anggaran.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 struktur belanja dalam APBD mengalami terdiri dari kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian, sebagai berikut :

1. **Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.

- c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang

disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

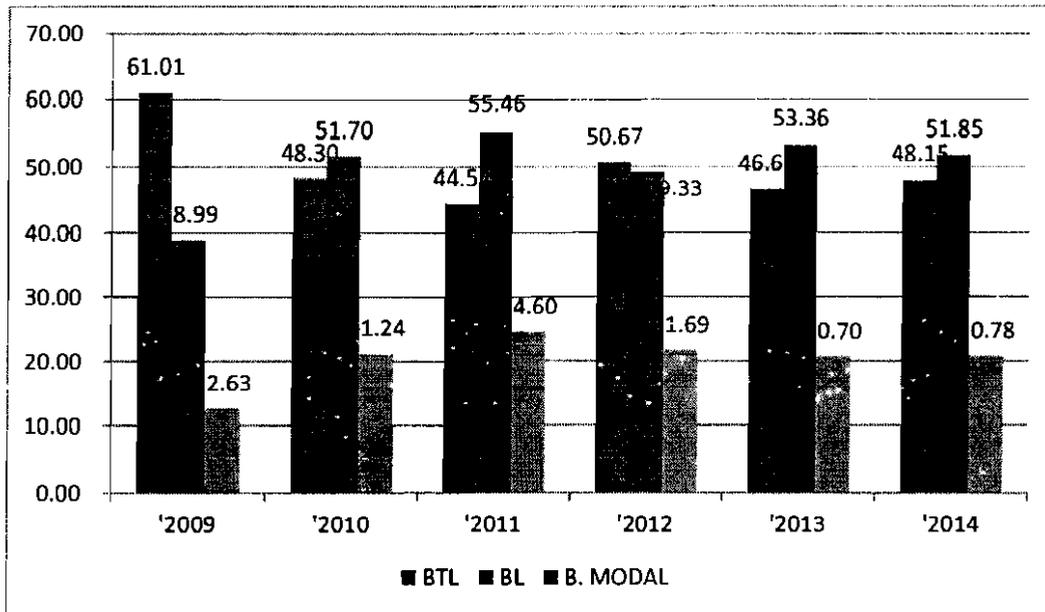
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel. 3.16
Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN BELANJA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PROYEKSI 2016
BELANJA DAERAH	2.004.899,19	2.566.069,52	3.836.296,35	3.884.534,95	4.454.187,32	4.723.190,70	5.128.383,46
BELANJA TIDAK LANGSUNG	968.441,25	1.143.021,70	1.943.966,17	1.811.879,22	2.144.560,81	2.637.268,60	2.897.818,24
BELANJA PEGAWAI	416.719,26	441.128,55	488.121,06	497.662,95	544.114,85	771.913,78	849.072,16
BELANJA HIBAH	38.365,62	35.896,76	741.534,65	761.045,63	847.424,32	807.523,43	888.275,77
BELANJA BAN. SOSIAL	87.950,12	109.417,06	7.840,00	5.448,51	4.521,80	9.700,00	9.700,00
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	378.733,82	406.965,25	472.103,54	357.471,26	723.095,81	1.000.000,00	1.100.000,00
BELANJA BANTUAN KEU. KEPADA PROVINSI/KAB/ KOTA/ PEMERINTAH DESA SERTA PARPOL	19.314,55	114.627,31	212.754,59	170.214,41	20.173,87	25.642,60	28.206,86
BELANJA TIDAK TERDUGA	27.357,88	34.986,77	21.612,32	20.036,46	5.230,16	22.488,79	22.563,45
BELANJA LANGSUNG	1.036.457,94	1.423.047,82	1.892.330,18	2.072.655,73	2.309.626,50	2.085.922,10	2.230.565,22
BELANJA PEGAWAI	76.544,85	107.811,86	135.197,64	100.476,76	109.214,90	117.594,81	
BELANJA BARANG DAN JASA	534.103,89	683.985,94	925.181,89	1.168.089,65	1.274.956,92	1.248.015,16	
BELANJA MODAL	425.809,20	631.250,02	831.950,66	804.089,33	925.454,68	720.312,12	

Grafik 3.13
Realisasi Belanja Tak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal terhadap
Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 (Persen)



3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

3.2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran

pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung pada tahun 2011-2014 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
2. Pembayaran pokok hutang.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Lampung untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Lampung diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Lampung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Lampung;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan

pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

4. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.

3.2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.17
Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d Tahun 2015

No.	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	PEMBIAYAAN	-	-	19.497.615.001	25.500.000.000
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	25.997.615.001	26.000.000.000
	<i>SILPA</i>	-	-	<i>25.997.615.001</i>	<i>26.000.000.000</i>
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	6.500.000.000	500.000.000
	<i>Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) PT. Lampung Jasa Utama</i>	-	-	<i>5.000.000.000</i>	-
	<i>Penyertaan Modal PT. Wahana Raharja</i>	-	-	<i>1.500.000.000</i>	<i>500.000.000</i>
	<i>Penyertaan Hutang Hasil Kab/Kota</i>	-	-	-	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019 perlu kita jadikan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dimulai dan dilakukan sejak proses perencanaan.

4.1 TINJAUAN KEBIJAKAN NASIONAL

4.1.1 VISI DAN MISI RPJMN 2015-2019

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4.1.2 STRATEGI DAN AGENDA PRIORITAS RPJMN 2015-2019

A. Strategi RPJMN 2015-2019

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

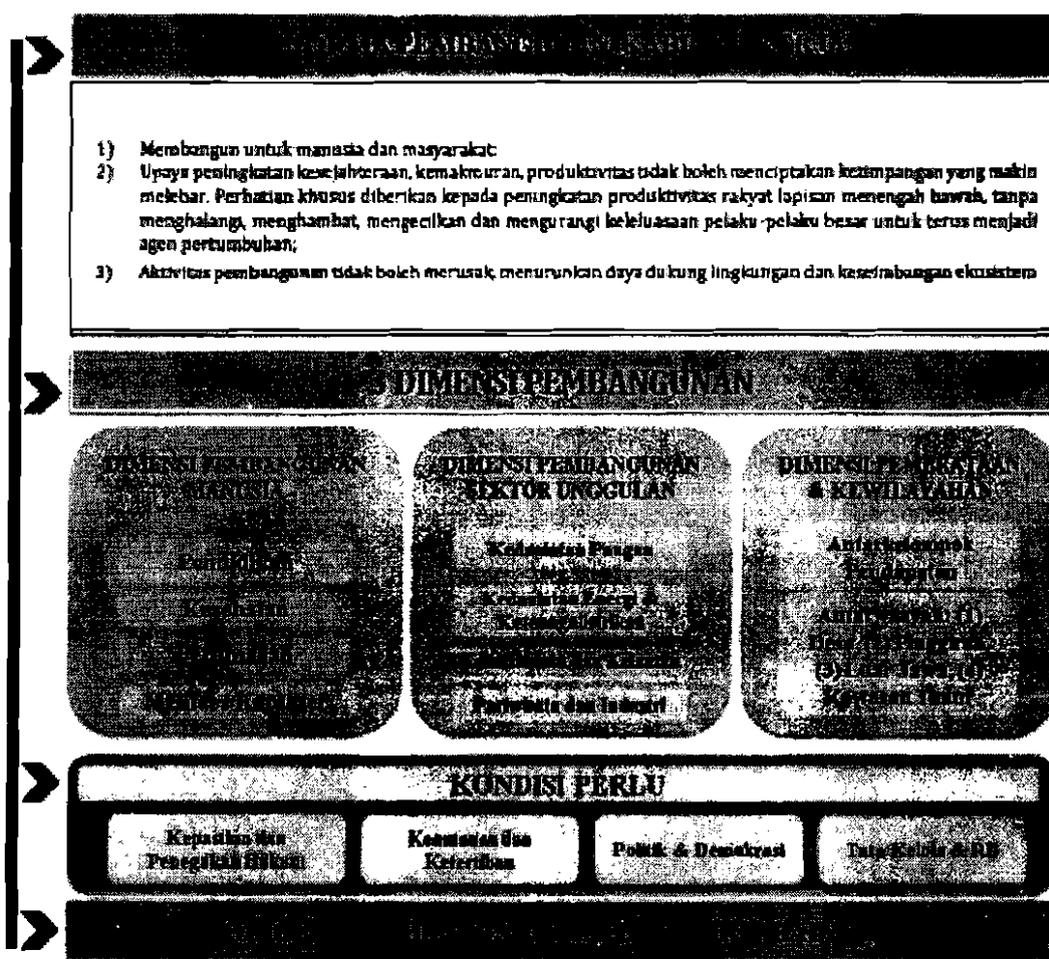
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas : Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; Wilayah pinggiran; Luar Jawa; serta Kawasan Timur Indonesia.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain : a) Kepastian dan penegakan hukum; b) Keamanan dan

ketertiban; c) Politik dan demokrasi; dan d) Tetakelola dan reformasi birokrasi.

4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Gambar 4.1
Strategi Pembangunan Nasional



B. Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

4.1.3 SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

4.1.4 ARAH KEBIJAKAN UMUM RPJMN 2015-2019

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana**

Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.**

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.**

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera

bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

4.1.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN PERTAMA RPJMN 2015-2019

Agenda **satu tahun pertama** dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya **membangun fondasi untuk melakukan akselerasi** yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping **melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat** yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Secara garis besar, beberapa prioritas pembangunan yang dimulai pada tahun pertama RPJMN mencakup : kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga negara yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, masyarakatnya harmonis antar kelompok sosial, postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada

keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan

Tabel 4.1
Sasaran Makro RKP 2016 dalam RPJMN

SASARAN RKP DALAM RPJMN	INDIKATOR / LOKASI	2015	2016
SASARAN MAKRO	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	6,6
	- Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	47,80	52,68
	- Inflasi (%)	5,0	4,0
	- Rasio Penerimaan Pajak thd PDRB (%)	13,2	14,2
	- Tingkat Pengangguran (%)	5,00	5,2 - 5,5
	- Tingkat Kemiskinan (%)	10,00	9,0 - 10,0

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

4.2.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Sejalan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dengan Visi Pembangunan :

“ Lampung Maju dan Sejahtera ”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

Secara komparatif, Provinsi Lampung didukung oleh letak geografis yang strategis dan ketersediaan sumber daya alam serta pertanian yang handal. Secara kompetitif, dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi maka ketersediaan SDM berkualitas dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, namun tentu saja tetap memperhatikan jatidiri yang berbasis Ekonomi Kerakyatan. Dengan tingginya kualitas SDM maka proses pemberdayaan ekonomi rakyat akan terjadi secara alamiah yang pada akhirnya akan mendorong sector pembangunan.

Provinsi Lampung memiliki birokrasi pemerintah yang bersih bebas korupsi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang berorientasi melayani. Birokrasi pemerintah yang visioner akan menjadi faktor pendukung jika didorong dengan kebijakan, fasilitasi dan melindungi proses

peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Birokrasi pemerintah daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah dimana pemerintah mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang berkemandirian dan berkeadilan sosial, politik, hukum, ekonomi serta disokong oleh proses demokratisasi. Cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung yaitu menjadikan Provinsi Lampung lebih makmur dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Lampung yang makmur yaitu Lampung yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan

pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang *civilized* dan berkeadilan (*justice for all*) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Provinsi Lampung merupakan daerah sejahtera dengan budaya luhur. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Tanah *Sai Bumi Ruwa Jurai*, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 tersebut, disusun 5 (lima) misi dan agenda kerja sebagai berikut :

Misi-1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sector dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diimbangi pula dengan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Penciptaan daya saing berkelanjutan merupakan perkuatan ekonomi sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah produk dan penguatan kemandirian daerah yang diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 1 antara lain: urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan ketahanan pangan, urusan koperasi dan umkm, urusan penanaman modal dan perijinan, serta urusan pariwisata.

Misi-2: Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan social bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 2 antara lain: urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, urusan

penataan ruang, urusan perumahan, urusan energi dan sumberdaya mineral, serta urusan ketransmigrasian.

Misi-3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai IPTEK, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat yang kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan social yang memadai.

Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi, direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu : 1. Pi'il pesenggiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan Lampung menitikberatkan pada pemaknaan budaya yang konstruktif, transformative, kreatif, dan produktif serta bernilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis (beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur).

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 3 antara lain: urusan pendidikan, urusan perpustakaan, urusan kesehatan, urusan kebudayaan, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan kepemudaan dan olahraga, dan urusan agama.

Misi-4: Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, social dan wilayah pemukiman.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 4 antara lain: urusan lingkungan hidup, urusan energi sumberdaya mineral, urusan kehutanan.

Misi-5: Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pematapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.

Juga upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain : urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan pertanahan, urusan perencanaan pembangunan, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada tabel keterkaitan dari setiap misi pembangunan, yaitu :

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah (LPE= rata-rata 6,5% s/d 7,5% hingga tahun 2019 ; Gini Rasio = 0,23; Indeks Williamson= 0,21) .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung (hingga tahun 2019 rata-rata tumbuh sebesar 4,5% dan kontribusi rata-rata sebesar 40%); 2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari; 3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung (hingga tahun 2019 rata-rata tumbuh sebesar 5% dan kontribusi sebesar 13% s/d 15%); 4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung (hingga tahun 2019 rata-rata kontribusi perdagangan besar dan eceran sebesar 15% per tahun dan kontribusi ekspor sebesar 45% s/d 60% per tahun); 5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah; 6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah (hingga tahun 2019 rata-rata kontribusi sebesar 17% per tahun); 7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah. 8. Mengembangkan Penganekaragaman, keamanan pangan, Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan

MISI	TUJUAN	SASARAN
		serta Distribusi Pangan.
Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang; 2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang; 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah); 5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72 % menjadi 78% di akhir tahun 2019;
Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan Iptek dan Inovasi, kesehatan, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran	Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka buta aksara dari 95% menjadi 98% di akhir tahun 2019 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 12 tahun ; 3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM SMA/ sederajat menjadi 78% dan APK Perguruan Tinggi menjadi 30%
	Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6.1000 KH tahun 2019
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
	Terwujudnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan sosial dan

MISI	TUJUAN	SASARAN
	kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat	penanggulangan korban
	Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
	Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender dari 63,5 tahun 2012 menjadi 68,5 tahun 2019; 2. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga; 3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
	Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA; 2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 3. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.
	Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah;
	Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
	Mempercepat pengembangan dan penerapan inovasi teknologi	1. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;
	Menguatkan kelembagaan pelaku bisnis, keirausahaan, iklim investasi yang kondusif, skema pembiayaan bisnis berbasis inovasi teknologi	1. Meningkatkan produktivitas litbang daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi; 2. Meningkatkan pendayagunaan iptek daerah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

Selaras dengan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) dan untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, yaitu :

- 1) Pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang terutama difokuskan pada wilayah perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.
- 2) Pengembangan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan promosi peluang investasi.
- 3) Reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang prima dan sinergi pembangunan dengan Kabupaten/Kota.
- 4) Mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan infrastruktur pertanian, serta

pengembangan agribisnis pada kawasan sentra komoditi unggulan pertanian.

- 5) Meningkatkan kualitas, kemudahan, dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama keluarga miskin.
- 6) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta melestarikan dan mengintegrasikan budaya Lampung dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sejalan dengan RKP Tahun 2016 yang mengarahkan prioritas pembangunan nasional pada program kedaulatan pangan, maritim, industri, pemerataan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur ; Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 yang bertema : **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan, yaitu:

- Pertama** Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
- Kedua** Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
- Ketiga** Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
- Keempat** Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- Kelima** Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;

- Keenam** Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- Ketujuh** Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;
- Kedelapan** Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

Program Prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

A. Bidang Infrastruktur

- Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.
- Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.
- Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.
- Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa.
- Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.

- Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.
- Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.
- Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik.

Target kondisi di atas sejalan dengan target sasaran prioritas yang ingin dicapai pada Tahun 2016 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 4.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2016

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD
		Indikator	Target		
			2015	2016	
Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;	a.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	a.1.1 Pembangunan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	30	30	Dinas Bina Marga
		a.1.2 Pembangunan Jalan Non Link di UPTD I Provinsi Lampung (km)	10	10	Dinas Bina Marga
		a.1.3 Pembangunan Jalan Non Link di UPTD II Provinsi Lampung (km)	12	12	Dinas Bina Marga
		a.1.4 Pembangunan Jalan Non Link di UPTD III Provinsi Lampung (km)	8	8	Dinas Bina Marga
		a.1.5 Panjang jalan provinsi dan jalan strategis yang ditingkatkan kondisinya serta penggantian jembatan pada ruas jalan provinsi dan jalan strategis	101 km	102 km	Dinas Bina Marga

		a.1.6	Ketersediaan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di provinsi Lampung tiap tahun	100%	100%	Dinas Bina Marga
	a.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a.2.1	Persentase kemandapan jalan provinsi	65,00%	70,00%	Dinas Bina Marga
		a.2.2	Panjang Jalan dan Jembatan pada ruas jalan provinsi dan jalan strategis yang dipelihara (km)	105	110	Dinas Bina Marga
		a.2.3	Persentase penurunan panjang jalan yang rusak	9,00%	8,50%	Dinas Bina Marga
		a.2.4	Persentase penurunan panjang jalan yang kritis	9,00%	8,50%	Dinas Bina Marga
	a.3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	a.3.1	Panjang saluran drainase yang dibangun (Km)	15	15	Dinas Bina Marga
		a.3.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 tahun.	50,00%	55,00%	Dinas Bina Marga
	a.4 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	a.4.1	Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan setiap tahun	100%	100%	Dinas Bina Marga
		a.4.2	Ketersediaan data Ruang Milik jalan (Rumija), dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan	100%	100%	Dinas Bina Marga

		informasi basis data jalan dan jembatan			
a.5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	a.5.1 Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	100%	100%	Dinas Bina Marga
a.6	Program Tanggap Darurat Infrastruktur	a.6.1 Persentase infrastruktur yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	80%	80%	Dinas Bina Marga
a.1	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan	a.1.1 Tahapan perencanaan dan pembangunan sarana pendukung Bandara Udara Radin Inten II (ha)	125,4	204,0	Dinas Perhubungan
		a.1.2 Land clearing dan pematangan lahan sarana pendukung Bandara Pekon Serai(m2)	15%	20%	Dinas Perhubungan
		a.1.3 Tahapan perencanaan dan pembangunan sarana pendukung Bandara Gatot Subroto	15%	20%	Dinas Perhubungan
		a.1.4 Tahapan pengembangan pembangunan Pelabuhan Sebalang	23%	26%	Dinas Perhubungan
		a.1.5 Perencanaan Tahapan pembangunan dermaga ASD di Provinsi Lampung	2	2	Dinas Perhubungan
		a.1.6 Ketersediaan perencanaan teknis pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	4 dokumen	4 dokumen	Dinas Perhubungan
		a.1.7 Tahapan pembangunan feeder KA 3 jalur	2	3	Dinas Perhubungan

		a.1.8	Tahapan pembangunan jalur short cut Rejosari-Tarahan (km)	100%	100%	Dinas Perhubungan
		a.1.9	Tahapan Pembangunan Pelabuhan Laut Batu Balai Kota Agung, Pelabuhan Laut Pulau Tabuan (5 lokasi)	1	2	Dinas Perhubungan
a.2	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLA)	a.2.1	Ketersediaan fasilitas perlengkapan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLA)	100%	100%	Dinas Perhubungan
a.3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a.3.1	Pelaksanaan pelatihan awak kendaraan umum se Lampung setiap tahun	30 orang	30 orang	Dinas Perhubungan
		a.3.2	Peningkatan sosialisasi dan koordinasi pelayanan angkutan umum di Lampung setiap tahun	70 orang	70 orang	Dinas Perhubungan
		a.3.3	Jumlah buku pedoman mekanisme dan prosedur perijinan dan pengawasan angkutan umum di Lampung yang disusun setiap tahun	30 buku	30 buku	Dinas Perhubungan
a.4	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	a.4.1	Jumlah petugas penguji kendaraan bermotor	20 petugas	20 petugas	Dinas Perhubungan
		a.4.2	Jumlah petugas terminal dan penguji, dan pengusaha karoseri kab/kota	31 org	32 org	Dinas Perhubungan

		a.4.3	Tahapan pembangunan depo KRD	100%	100%	Dinas Perhubungan	
		a.4.4	Jumlah krew angkutan umum, kapal motor dan tenaga pemeriksa roda ranmor	70 org	70 org	Dinas Perhubungan	
		a.4.5	Jumlah fasilitas perlintasan KA rawan kecelakaan	2 lokasi	2 lokasi	Dinas Perhubungan	
		a.4.6	Jumlah rambu-rambu fasilitas keselamatan jalan provinsi	500 buah	500 buah	Dinas Perhubungan	
	a.5	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi serta Meteorologi dan Geofisika	a.5.1	Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor terkait lainnya	1 paket	1 paket	Dinas Perhubungan
	a.6	Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan <i>Rescue</i>	a.6.1	Tersedianya peralatan SAR Daerah untuk penanganan bencana	3 paket		Dinas Perhubungan
				Tersedianya peralatan pendukung penanganan kecelakaan KA	1 paket		Dinas Perhubungan
	a.1	Program Perencanaan Ruang	a.1.1	Ketersediaan pembinaan teknis penataan ruang daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kabupaten/Kota	Bappeda
			a.1.2	Ketersediaan penataan ruang kawasan strategis	Data GIS	Data GIS	Bappeda
			a.1.3	Ketersediaan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	Bappeda
	a.2	Program Pemanfaatan Ruang	a.2.1	Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan pemanfaatan ruang	Sedang	Sedang	Bappeda

	a.3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a.3.1	Tingkat ketersediaan peraturan pendukung pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	Bappeda
	a.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	a.1.1	Rehabilitasi/p emeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap	65%	70%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1000-3000 Ha	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Waduk/Sungai	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.4	Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan irigasi	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.5	Peningkatan Sistem Informasi Sumber Daya Air	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.6	Pengelolaan Pos Hidrologi	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.7	Manajemen Sistem Jaringan Irigasi	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.8	Rehabilitasi/p emeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi)	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
					a.1.9	Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan	100%
			a.1.1 0	Pengawasan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.1 1	Perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Pengairan	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
			a.1.1 2	Sinkronisasi Program Bidang Operasi dan	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan

		Pemeliharaan				
a.2	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	a.2.1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	12%	14%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	a.3.1	Terselenggaranya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	100%	100%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.4	Program Pengendalian Banjir	a.4.1	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul Sungai	15%	12%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.1	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a.1.1	Jumlah pembangunan rumah baru per tahun	12%	14%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.3	Program Lingkungan Permukiman Sehat	a.3.1	Jumlah kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan yang terfasilitasi untuk diperbaiki per tahun	12%	14%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	a.4.1	Ketersediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	35%	36%	Dinas Pengairan dan Perumahan
a.1	Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral Panas Bumi dan Geologi	a.1.1	Jumlah Perusahaan atau perseorangan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan	34	34	Distamben
		a.1.2	Jumlah potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung	1	1	Distamben
		a.1.3	Jumlah data dan informasi potensi panas bumi	1	1	Distamben

		a.1.4	Jumlah data teknis potensi air tanah dan sarana prasarana air bersih untuk masyarakat	1	1	Distamben	
		a.1.5	Jumlah WKP Panas Bumi	1	1	Distamben	
	a.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	a.2.1	Ratio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	72%	73%	Distamben
			a.2.2	Jumlah potensi ketenagalistrikan untuk dikembangkan serta PLTMH yang terpasang	2	2	Distamben
			a.2.3	Jumlah badan usaha pengguna ketenagalistrikan	20	20	Distamben
			a.2.4	Jumlah badan usaha penyedia ketenagalistrikan	20	20	Distamben

B. Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)

- Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mengikis kriminalitas.
- Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan perekonomian Lampung.
- Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.4
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG INVESTASI TAHUN 2016

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD
		Indikator	Target		
			2015	2016	
Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif	1 Program Peningkatan Iklim Investasi	1 Peningkatan jumlah proyek penanaman modal (PMA dan PMDN) yang terealisasi	10%	12%	BKPPMD
		2 Laju Pertumbuhan Investasi (%) (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku	9,50%	10,50%	BKPPMD
		3 Prosentase kepastian & ketepatan biaya pelayanan perizinan	90%	90%	BKPPMD
	2 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk)	14 event	15 event	BKPPMD
	1 Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral Panas Bumi dan Geologi	1 Jumlah Perusahaan atau perseorangan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan	34	34	Distamben
		2 Jumlah potensi sumber daya mineral di Provinsi Lampung	1	1	Distamben
		3 Jumlah data dan informasi potensi panas bumi	1	1	Distamben
		4 Jumlah data teknis potensi air tanah dan sarana prasarana air bersih untuk	1	1	Distamben

		masyarakat			
		5 Jumlah WKP Panas Bumi	1	1	Distamben
Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan	1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Tingkat pengangguran terbuka	5,18%	4,56%	Seluruh SKPD
		2 Kemiskinan	12,86%	11,86%	Seluruh SKPD

C. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan, Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)

- Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan mempermudah birokrasi.
- Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip *good governance* menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan berkualitas.
- Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien.
- Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
- Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum daerah Lampung.
- Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial budaya.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.5
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG REFORMASI BIROKRASI

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD
		Indikator	Target		
			2015	2016	
Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur	1 Program pencegahan peredaran narkoba dan trafficking	1 Teratasinya masaijah-masalah kriminal, narkoba, perdangan wanita.	50%	60%	Dinas Sosial
	1 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan	900	846	Satpol PP
	1 Program Pemantapan Kelembagaan Hukum Masyarakat	1 Jumlah konflik sosial: (konflik antar masyarakat dan konflik pemerintah dan masyarakat)	70%	61%	Satpol PP
	1 Program Penguatan Legislasi Daerah	1 Konflik antar lembaga pemerintahan	60%	55%	Sekretariat Daerah
	1 Program Pemantapan Produk Hukum Daerah	1 Terbentuknya produk hukum yang mendorong masyarakat dan dunia usaha berinvestasi	1	1	Sekretariat Daerah
		2 Jumlah keabsahan kepemilikan tanah masyarakat	50%	60%	Sekretariat Daerah
	1 Program Pemantapan Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat	1 Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat	50%	60%	Sekretariat Daerah
	1 Program Penguatan Fungsi Penegakan Hukum	1 Meningkatnya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas	50%	60%	Sekretariat Daerah, Satpol PP

1	Program Penguatan Kemitraan Dengan Masyarakat	1 Meningkatnya sinerisitas dalam pelaksanaan pembangunan	50%	60%	Sekretariat Daerah, Satpol PP
1	Program Penguatan Aksesibilitas Penegakan Hukum	1 Menguatnya penegakan hukum	50%	60%	Sekretariat Daerah, Satpol PP
1	Program reformasi birokrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (skala 1-5)	2	3	Sekretariat Daerah
1	Program Fungsi kelembagaan pemerintahan yang antisipatif	1 Kesesuaian perencanaan dengan isu dan permasalahan pembangunan	50%		Sekretariat Daerah
1	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Kinerja Aparatur	1 Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	65%	75%	Sekretariat Daerah
		2 Jumlah OPD	49	49	Sekretariat Daerah
		3 Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO	20%	30%	Sekretariat Daerah
		4 Proporsi SPM pada urusan pemerintahan	15	15	Sekretariat Daerah
		5 Proporsi SOP pada SKPD	20%		Sekretariat Daerah
		6 Jumlah regulasi penegasan batas daerah	4	12	Sekretariat Daerah
		7 Indeks Pelayanan Birokrasi (skala 1-5)	2,5	3,0	Sekretariat Daerah
1	Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah	1 Capaian kinerja keuangan yang akuntabel	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1 Capaian Kinerja Keuangan	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
1	Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan masyarakat	1 Jumlah anggota TRC yang dilatih	150	200	BPBD

1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100%	100%	Inspektorat
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Jumlah auditor yang memenuhi kompetensi	100%	100%	Inspektorat
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Jumlah PERDA yang disetujui	65%	100%	Sekretariat DPRD
1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD):	50%	55%	Dispenda
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1 Tingkat produktivitas aparatur	80%	80%	BKD
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tingkat keterampilan aparatur	65%	80%	Bandiklat
1	Program Pemantapan Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1 Kinerja birokrasi	50%	70%	Sekretariat Daerah
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	1 Tingkat produktifitas dan Kinerja aparatur birokrasi	50%	70%	Bandiklat
1	Program Peningkatan Kapasita Aparatur Birokrasi	1 Tingkat produktifitas dan Kinerja aparatur birokrasi	50%	70%	Bandiklat
1	Program Pembinaan, Koordinasi, Dan Monitoring Pemerintahan Umum	1 Tingkat Kontribusi DPD, dan DPR RI Dapil Lampung terhadap pembangunan Lampung	50%	70%	Sekretariat Daerah
1	Program Peningkatan dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	85%	70%	Semua (lintas) SKPD

1	Program Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Pemerintahan Umum	1 Jumlah kunker anggota DPD dan DPR RI ke Provinsi Lampung	15 kali	15 kali	Sekretariat Daerah
1	Program Peningkatan Pengawasan Internal, Eksternal Dan Fungsional	1 Indeks Persepsi Korupsi	50%	70%	Inspektorat
1	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah Yang Akuntabel, Profesional, Dan Efektif	1 Governance Index	50%	70%	Sekretariat Daerah
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Desa	1 Kinerja pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang baik, dan terbebas dari tindak korupsi	50%	70%	BPMPDesa
1	Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	84%	85%	Semua (lintas) SKPD
1	Program Gerakan Aksi Pencegahan paraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1 Menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi dan KKN	60%	50%	Inspektorat
1	Program Pengadaan, Penataan Dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	1 Jumlah aset tanah yang teridentifikasi dan tersertifikasi	50%	60%	Sekretariat Daerah
1	Program Penyelesaian kasus konflik tanah	1 Jumlah kasus tanah yang ditangani	15 kasus	14 kasus	Sekretariat Daerah
1	Program pembinaan tertib dan administrasi pertanahan	1 Terkelolanya Sistem Informasi Pertanahan yang terintegrasi dengan BPN	50%	60%	Sekretariat Daerah

1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Persentase penyelenggara jastip se-Provinsi Lampung	80%	80%	Diskominfo
1	Program Peningkatan Kualitas Penyiaran, Komunikasi dan Informasi	1 Jumlah pengkajian isi lembaga penyiaran	3	5	KPID
1	Program Pengembangan Dan Penguatan Informasi, Komunikasi Dan Kajian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1 Kualitas pelayanan, dan kepuasan publik	50%	70%	Diskominfo
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1 Ketersediaan dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA SKPD, RRPD, RENJA SKPD)	60%	70%	Bappeda
1	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	1 Tingkat Koordinasi kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan, Sub Regional, Regional dan Internasional	100%	100%	Bappeda
1	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Jumlah Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Yang Mandiri Melalui WISMP, PISP	100%	100%	Bappeda
1	Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen analisis variable penentu IPM	100%	100%	Bappeda
1	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	1 Ketersediaan dokumen indikator makro ekonomi	100%	100%	Bappeda
1	Program Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Energi	1 Jumlah koordinasi Pemprov Lampung dengan Kab/Kota se-Prov. Lampung	100%	100%	Bappeda
1	Program Pengembangan dan Penelitian	1 Jumlah penelitian yang dilaksanakan	55	66	Bappeda

1	Program Operasionalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	1 Menurunnya angka kemiskinan Lampung	100,00%	100,00%	Bappeda
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1 Ketersediaan dokumen perencanaan	50%	60%	Bappeda
1	Program Inventarisasi Nama Dan Unsur Rupa Bumi Pada 15 Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Dan Pemeliharaan Pulau	1 Data pembakuan nama rupa bumi wilayah administrasi, unsur alam, dan unsur buatan pada 15 kab/kota	10 kab/kota	12 kab/kota	Sekretariat Daerah
1	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	1 Terbentuknya kerjasama pembangunan dengan pemerintah pusat/provinsi lain	50%	70%	Sekretariat Daerah, Bappeda
1	Program Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1 Capaian kinerja keuangan yang akuntabel	50%	70%	Semua (lintas) SKPD
1	Program Pengembangan Dan Penguatan Data, Informasi, Dan Data Statistik Daerah	1 Terkelolanya basis data daerah yang terpadu dan valid bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	75%	100%	Bappeda
1	Program Pengembangan Kearsipan	1 Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan	65%	70%	BPAD
1	Program Pengembangan Dan Penguatan Kearsipan Dan Dokumen Bagi Pembangunan	1 Pendokumentasian, dan pengarsipan yang baik dan benar, dan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	50%	70%	BP2AD
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Koordinasi dan monev penyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan	70%	80%	Sekretariat Daerah

1	Program pengembangan sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Capil	1 Akses informasi kependudukan	40%	80%	Sekretariat Daerah
1	Program Informasi Dan Administrasi Kependudukan Dan Capil	1 Kualitas pelayanan, dan kepuasan publik	50%	80%	Sekretariat Daerah
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	200	200	BPMPD
1	Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	1 Jumlah aparapemerintahan desa/kelurahan yg dilatih	650	735	BPMPD
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan	4494	5393	BPMPD
1	Program penguatan nilai-nilai demokrasi	1 Meningkatnya Indek demokrasi	50%	55%	Bakesbangpol
		2 Persaingan politik yang jujur dan bebas dari politik uang	50%	55%	
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 Integrasi bangsa/daerah semakin kuat	100%	100%	Bakesbangpol
1	Program Pemetaan konflik sosial	1 Konflik-sosial-politik rendah	100%	100%	Bakesbangpol
		2 Jumlah konflik antar kelompok	1		Bakesbangpol
1	Program Penguatan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	1 Tingkat Partisipasi Pemilu	72%	75%	Bakesbangpol
1	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Lokal	1 Indeks Demokrasi	64%	70%	Bakesbangpol
1	Program Penguatan Peran Partai Politik Dalam Mendorong Demokrasi Lokal	1 Indeks Demokrasi	64%	70%	Bakesbangpol

	1	Program Pengembangan Pembinaan Kepada Masyarakat Dan Kelompok Sosial	1 Indeks Demokrasi	64%	70%	Bakesbangpol
	1	Program Penguatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Politik	1 Indeks Demokrasi	64%	70%	Bakesbangpol
	1	Program Peningkatan Keterlibatan Perguruan Tinggi Dalam Proses Demokrasi Daerah	1 Indeks Demokrasi	64%	70%	Bakesbangpol

D. Bidang Pertanian

- Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah.
- Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
- Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.
- Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro industri/agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional.
- Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha.
- Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa.

- Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian dan peternakan.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.6
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PERTANIAN

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD	
		Indikator	Target			
			2015	2016		
Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	a.1.1	Kontirbusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB Prov. Lampung	18,59%	18,94%	DPTPH
		a.1.2	Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)			DPTPH
		1)	Padi sawah	3.162.270	3.173.721	DPTPH
		2)	Padi ladang	194.506	197.034	DPTPH
		3)	Jagung	1.928.703	1.953.776	DPTPH
		4)	Kedelai	11.057	11.201	DPTPH
		5)	Kacang tanah	13.561	14.054	DPTPH
		6)	Kacang ijo	3.558	3.687	DPTPH
		7)	Ubi kayu	9.238.619	9.573.971	DPTPH
		8)	Ubi jalar	51.691	53.567	DPTPH
		a.1.3	Jumlah Produksi tanaman hortikultura (Ton)			DPTPH
		1)	Cabe merah	45.620	49.041	DPTPH
		2)	Bawang merah	447	481	DPTPH
		3)	Tomat	17.053	17.309	DPTPH
		4)	Manggis	7.201		DPTPH
		5)	Nanas	586.194	586.780	DPTPH
		6)	Pisang	829.870	842.318	DPTPH

	7)	Durian	45.643	45.688	DPTPH	
	8)	Alpukat	11.904	12.782	DPTPH	
	9)	Pepaya	111.062	119.391	DPTPH	
	10)	Salak	6.735	7.240	DPTPH	
	a.1. 4	Luas lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura baru yang tercetak (Ha)	10.000	10.000	DPTPH	
a.2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	a.2. 1	Kontirbusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Prov. Lampung	9,61%	10,21%	Dinas Perkebunan
			Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton)			Dinas Perkebunan
	1)	Kelapa Dalam	112.015	112.094	Dinas Perkebunan	
	2)	Kelapa Hibrida	1.323	1.317	Dinas Perkebunan	
	3)	Karet	76.882	77.651	Dinas Perkebunan	
	4)	Kelapa Sawit	443.806	444.694	Dinas Perkebunan	
	5)	Kapuk	206	207	Dinas Perkebunan	
	6)	Tebu	785.406	791.689	Dinas Perkebunan	
	7)	Tembakau	1.277	1.341	Dinas Perkebunan	
	8)	Lada	24.455	24.480	Dinas Perkebunan	
	9)	Kayu Manis	609	612	Dinas Perkebunan	
	10)	Cengkeh	805	808	Dinas Perkebunan	
	11)	Vanili	73	74	Dinas Perkebunan	
	12)	Kopi Robusta	135.509	135.915	Dinas Perkebunan	
	13)	Kopi Arabika	15	16	Dinas Perkebunan	
	14)	Kakao	33.243	33.908	Dinas Perkebunan	
	a.2. 2	Pertambahan luas areal perkebunan baru (ha)			Dinas Perkebunan	
	1)	Kelapa Dalam	124.026	124.112	Dinas Perkebunan	
	2)	Kelapa Hibrida	2.544	2.531	Dinas Perkebunan	
	3)	Karet	159.921	161.520	Dinas Perkebunan	
	4)	Kelapa Sawit	211.383	211.806	Dinas Perkebunan	
	5)	Kapuk	1.346	1.354	Dinas Perkebunan	

	6)	Tebu	117.088	118.024	Dinas Perkebunan
	7)	Tembakau	1.037	1.089	Dinas Perkebunan
	8)	Lada	62.428	62.490	Dinas Perkebunan
	9)	Kayu Manis	1.358	1.365	Dinas Perkebunan
	10)	Cengkeh	7.533	7.563	Dinas Perkebunan
	11)	Vanili	497	507	Dinas Perkebunan
	12)	Kopi Robusta	161.529	162.013	Dinas Perkebunan
	13)	Kopi Arabika	105	109	Dinas Perkebunan
	14)	Kakao	61.606	62.839	Dinas Perkebunan
a.3		Program Peningkatan Produksi Peternakan			
a.3.	1	Kontirbusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Prov. Lampung	5,69%	6,77%	Dinas Peternakan
	1)	Sapi Potong	757.020	777.283	Dinas Peternakan
	2)	Sapi Perah	282	284	Dinas Peternakan
	3)	Kambing	1.346.380	1.398.536	Dinas Peternakan
	4)	Ayam Pedaging	32.771.775	33.071.979	Dinas Peternakan
	5)	Ayam Petelur	6.085.893	6.902.291	Dinas Peternakan
a.3.	2	Jumlah Produksi Daging Sapi (kg)	15.364.141	15.517.698	Dinas Peternakan
a.3.	3	Jumlah Produksi Telur (kg)	74.489.431	80.990.730	Dinas Peternakan
a.3.	4	Jumlah Produksi Susu (kg)	219.149	222.372	Dinas Peternakan
a.4		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, serta Peternakan			
a.4.	1	Penerapan teknologi spesifik lokasi (ha)	1.649,02	1.875,27	DPTPH, Disbun, Disnak
a.5		Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian			
a.5.	1	Jumlah SDM penyuluh pertanian dan peternakan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	2.328	2.328	Bakorluh
a.6		Program Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani dan Peternak			
a.6.	1	Jumlah kelompok tani yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	27.081	27.352	Bakorluh

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	a.6. 2	Penguatan Dukungan Teknis Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	20%	30%	Dinas Peternakan
	a.6. 3	Prosentase Penurunan Kasus Rabies pada Hewan per tahun	30% (18 kasus)	50% (9 kasus)	Dinas Peternakan
	a.6. 4	Mempertahankan Bebas Kasus <i>Brucellosis</i>	0% (0 kasus)	0% (0 kasus)	Dinas Peternakan
	a.6. 5	Prosentase Penurunan Kasus Hog Cholera per tahun	30%	50%	Dinas Peternakan
	a.6. 6	Prosentase Penurunan Kasus Avian Influeza pertahun	25%	40%	Dinas Peternakan
	a.6. 7	Prosentase Penurunan Kasus Jembrana/ Ramadewa per tahun	30%	40%	Dinas Peternakan
		a.6. 8	Prosentase Penurunan Kasus Septicemia Epizootika per tahun	40%	50%
a.7 Program Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	a.7. 1	Meningkatnya Koordinasi Kesmavet dan Pasca Panen	35%	40%	Dinas Peternakan
	a.7. 2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Tersusunnya Data Penyakit Zoonosis	35%	40%	Dinas Peternakan
	a.7. 3	Meningkatnya Jumlah Sapi/Kerbau Betina Produktif Yang Terselamatkan	35%	40%	Dinas Peternakan
	a.7. 4	Tersedianya Kios Daging sesuai Standar	10%	25%	Dinas Peternakan
	a.7. 5	Tersedianya RPH/RPU sesuai Standar	35%	40%	Dinas Peternakan
	a.7. 6	Tersedianya Alat Transportasi Daging	10%	25%	Dinas Peternakan
a.8 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan,	a.8. 1	Jumlah Sub Terminal Agribisnis yang dibangun	3	3	Dispertanhorti, Disbun, Disnak
	a.8. 2	Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan	100%	100%	DKP

	Perikanan, serta Kehutanan					
a.1	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	a.1.1	Peningkatan produksi hasil perikanan budidaya	189.999,98	225.000,00	DKP
			Budidaya Air Payau	80.075,93	90.386,67	DKP
			Budidaya Air Laut	8.239,31	9.033,01	DKP
			Budidaya Air Tawar	101.684,74	125.580,32	DKP
			Produksi Benih (Juta ekor)	11.125,00	12.020,00	DKP
		a.1.2	Sarana dan Prasarana Budidaya (BBIS)	1	1	DKP
		a.1.3	Kawasan Minapolitan (Kab)	7	7	DKP
		a.1.4	Rumah Tangga Perikanan (RTP)	58.993,00	63.433,00	DKP
a.2	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	a.2.1	Peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	172.744,00	176.127,00	DKP
			Laut	138.195,20	140.901,60	DKP
		2)	Perairan Umum	34.548,80	35.225,40	DKP
				2.117.162,00	2.158.675,00	DKP
		a.2.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,72	113,86	DKP
		a.2.3	Sarana dan Prasarana PPP (unit)	3	4	DKP
a.3	Program Peningkatan daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	a.3.1	PDRB Perikanan (% thn)	7,74	8,13	DKP
		a.3.2	Nilai Ekspor (Juta US \$)	379,11	479,11	DKP
		a.3.3	Nilai Produk Olahan Non Konsumsi (Rp. Milyar)	6,65	7,54	DKP
		a.3.4	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ribu ton)	122,06	125,12	DKP
		a.3.5	Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)	30,23	33,50	DKP
a.4	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut,	a.4.1	Jumlah Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi (Buah)	2	2	DKP

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a.4.2	Jumlah pengembangan kawasan ekonomi berbasis gugus pulau kecil	1	2	DKP
	a.4.3	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)	3	3	DKP
	a.4.4	Pemberdayaan masyarakat pesisir (kab)	7	7	DKP
a.5 Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a.5.1	Pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (lokasi)	5	7	DKP
	a.5.2	Ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan yang berlaku (lokasi)	5	7	DKP
a.6 Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	a.6.1	Jumlah sertifikat Jaminan Mutu/Health Certificate (lembar)	1.800	1.850	DKP
	a.6.2	Jumlah Unit Pengolah Ikan yang bersertifikat HACCP (unit)	10	11	DKP
	a.6.3	Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu (unit)	1	1	DKP
	a.6.4	Jumlah Pasar Tradisional & Modern yang termonitor mutu dan keamanan produknya (lokasi)	15	20	DKP
	a.6.5	Peningkatan SDM Pengawas Mutu (org)	25	25	DKP
a.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	a.1.1	Meningkatnya Pola Pangan Harapan melalui peningkatan diversifikasi pangan	87,50	89,50	BKPD
	a.1.2	Menurunya konsumsi beras 1,5% per Tahun	109,80	106,00	BKPD
	a.1.3	Menurunya daerah rawan pangan	0,01	0,01	BKPD
	a.1.4	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah	200,00	240,00	BKPD

	a.1.5	Ketersediaan energi per kapita	2,200,00	2.200,00	BKPD
	a.1.6	Ketersediaan protein per kapita	57,00	57,00	BKPD
	a.1.7	Meningkatnya akses pangan masyarakat	3 Kab	3 Kab	BKPD
	a.1.8	Berkembangnya jaringan distribusi pangan	3 Kab	3 Kab	BKPD
	a.1.8	Menurunnya penggunaan bahan berbahaya pada pangan segar dan olahan primer	0,15	0,20	BKPD
	a.1.9	Meningkatnya jenis pangan yang aman dikonsumsi/ bersertifikat	125 unit	150 unit	BKPD
a.1	Program Pengembangan Agro Industri	Kontribusi sub sektor industri pengolahan hasil pertanian terhadap PDRB Prov. Lampung	16,44%	17,33%	Diskop UMKM Perindag
b.1	Program Penataan Struktur Dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase tingkat koordinasi dan konsolidasi industri	80%	82%	Diskop UMKM Perindag
	b.1.2	Jumlah tenaga terampil SDM IKM logam, keramik dan bahan - bahan bangunan (orang)	200	200	Diskop UMKM Perindag
a.1	Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	16,65	17,48	Diskop UMKM Perindag
	a.1.2	Meningkatkan kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting	85%	90%	Diskop UMKM Perindag
	a.1.3	Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat	100%	100%	Diskop UMKM Perindag
	a.1.4	Meningkatkan kemitraan antara usaha besardan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta	100%	100%	Diskop UMKM Perindag

		a.1.5	Persentase tingkat penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri	80%	80%	Diskop UMKM Perindag
		a.1.6	Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan	70%	70%	Diskop UMKM Perindag
	b.1	b.1.1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Volume ekspor lampung pertahun (ton)	7.720.562	8.422.432	Diskop UMKM Perindag
		b.1.2	Nilai impor lampung pertahun (000) US\$	3.440.448	3.440.448	Diskop UMKM Perindag
		b.1.3	Laju pertumbuhan ekspor non migas	6,00%	6,25%	Diskop UMKM Perindag
		b.1.4	Laju pertumbuhan impor lampung	52,50%	52,50%	Diskop UMKM Perindag
	c.1	c.1.1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tingkat Pemahaman dan perlindungan konsumen pertahun	6 kali	7 kali	Diskop UMKM Perindag
		c.1.2	Jumlah penggunaan SNI wajib pertahun	25%	25%	Diskop UMKM Perindag
		c.1.3	Tingkat pengawasan Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan per tahun	30%	35%	Diskop UMKM Perindag
Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;	a.1	a.1.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Jumlah koperasi aktif	65%	70%	Diskop UMKM Perindag
		a.1.2	Jumlah penyerapan tenaga kerja (org)	6.674	6.840	Diskop UMKM Perindag
		a.1.3	Jumlah UMKM	375.425	384.810	Diskop UMKM Perindag
		a.1.4	Kualitas kelembagaan KUMKM per tahun (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi)	100%	100%	Diskop UMKM Perindag
		a.1.5	Tingkat kapasitas SDM KUMKM pertahun	100%	100%	Diskop UMKM Perindag
		a.1.6	Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM pertahun	100%	100%	Diskop UMKM Perindag
		a.1.7	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi	100%	100%	Diskop UMKM Perindag

		KUMKM pertahun				
a.2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	a.2.1	Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro pertahun	75%	80%	Diskop UMKM Perindag
		a.2.2	Akses terhadap teknologi tepat guna pertahun	60%	70%	Diskop UMKM Perindag
		a.2.3	Promosi produk KUMKM pertahun melalui jaringan dan pameran KUMKM	70%	80%	Diskop UMKM Perindag
a.3	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	a.3.1	Kontribusi keberadaan BLUD terhadap PAD per tahun	600 jt	700 jt	Diskop UMKM Perindag
		a.3.2	Meningkatnya jumlah kredit disalurkan BLUD	4M	5M	Diskop UMKM Perindag
a.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	a.1.1	Jumlah Wisatawan Nusantara	2.134.380	2.347.817	Disparbud
		a.1.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	27.127	29.840	Disparbud
		a.1.3	Persentase Peningkatan Mutu dan Pelayanan	75%	75%	Disparbud
		a.1.4	Persentase Penyediaan informasi pariwisata	30%	35%	Disparbud
		a.1.5	Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja	15%	20%	Disparbud
a.2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	a.2.1	Jumlah kegiatan pemasaran kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	Disparbud
		a.2.2	Jumlah SDM budang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan	60 Org	70 Org	Disparbud
		a.2.3	Tersedianya informasi Kebudayaan dan Pariwisata	400 buku	450 buku	Disparbud

E. Bidang Kesehatan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.
- Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
- Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi *overload* pasien di rumah sakit daerah.
- Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas, dan rumah sakit di kabupaten/kota.
- Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga miskin.

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB, secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG KESEHATAN

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD
		Indikator	Target		
			2015	2016	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 Program Upaya kesehatan	1 Penurunan Angka Kematian Ibu	7,00/1000 KH	6,9/1000 KH	Dinas Kesehatan
		2 Penurunan Angka Kematian Bayi	112/100 rib KH	111/100 rib KH	Dinas Kesehatan
		3 Penurunan Angka Kematian Balita	150	145	Dinas Kesehatan
		4 Penurunan Kasus kematian Neonatal	720	715	Dinas Kesehatan

		5	Persentase cakupan kunjungan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas	15	15	Dinas Kesehatan
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65%	67%	Dinas Kesehatan
2	Program Gizi Masyarakat	1	Prevalensi gizi buruk	345	340	Dinas Kesehatan
1	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	1	Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center of Excellent/Rujukan	12%	14%	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	1	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	3,80	3,82	Dinas Kesehatan
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Anggaran obat perkapita pertahun di sarana kesehatan (Rp)	9.500	10.500	Dinas Kesehatan
1	Program Akeselerasi Pengembangan dan Pengadaan Sumber Daya Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Gizi, dan Apoteker)	1	Rasio ahli gizi per 100 rb satuan penduduk	15	17	Dinas Kesehatan
		2	Rasio ahli kesmas per 100 rb satuan penduduk	15	17	Dinas Kesehatan
		3	Rasio ahli sanitasi per100 rb satuan penduduk	15	17	Dinas Kesehatan
		4	Rasio bidan per 100 rb satuan penduduk	43	45	Dinas Kesehatan
		5	Rasio dokter gigi per 100 rb satuan penduduk	5	6	Dinas Kesehatan
		6	Rasio dokter per 100 rb satuan penduduk	13	14	Dinas Kesehatan
		7	Rasio dokter spesialis per 100 rb satuan penduduk	6	7	Dinas Kesehatan
		8	Rasio perawat per 100 rb satuan penduduk	65	66	Dinas Kesehatan
		9	Rasio opeteker per 100 rb satuan penduduk	5	6	Dinas Kesehatan

1	Program perkuatan kerjasama RSAM dan Fakultas Kedokteran Unila dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis	1 MoU RSUAM dan FK Unila	1	1	Dinas Kesehatan
1	Program Peningkatan Pembiayaan Kesehatan	1 Penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan (juta org)	3,90	4,00	Dinas Kesehatan
1	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 Persentase desa mencapai <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100%	100%	Dinas Kesehatan

F. Bidang Pendidikan

- Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung.
- Melaksanakan amanat Undang-undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru.
- Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar, menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren.
- Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.
- Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung.
- Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan kepramukaan.
- Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui pembangunan pusat-pusat kebudayaan

dan penyelenggaraan *event-event* budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kondisi ini sejalan dengan target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 khususnya sasaran prioritas pada Tahun kedua pelaksanaan RPJMD Bidang Kesehatan yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB, secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.8
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PENDIDIKAN

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Kinerja			SKPD
		Indikator	Target		
			2015	2016	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 Program Pendidikan Non Formal	1 Angka Melek Huruf	96%	96,50%	Dinas Pendidikan
	2 Program Pendidikan Luar Biasa	1 Setiap kab/kota memiliki minimal 1 SLB	11	12	Dinas Pendidikan
	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1 APK SD/SMP	108	110	Dinas Pendidikan
	1 Program Pendidikan Menengah	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	70%	72%	Dinas Pendidikan
	1 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	70%	72%	Dinas Pendidikan
	1 Program Pendidikan Tinggi Vokasi	1 Peningkatan APK perguruan tinggi;	20%	23%	Dinas Pendidikan

	1	Program Peningkatan Tata Kelola Sekolah dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Tersedia naskah UASBN dan fasilitas pendukung UASBN	40%	50%	Dinas Pendidikan
	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Nilai rata-rata UAS	7,6	7,7	Dinas Pendidikan
	1	Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	1	Persentase guru SMA/MA, SMP/MTs mampu mengoperasikan TIK	18%	20%	Dinas Pendidikan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran (Ruang Kelas Baru, Renovasi Ruang Kelas, Laboratorium, dll.)	1	Persentase sekolah dalam kondisi baik	81%	82%	Dinas Pendidikan
	1	Program pendidikan berkarakter, partisipatif, dan berbasis budaya	1	Sekolah disiplin, bebas napza, dan tanpa tawuran			Dinas Pendidikan
	2	Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Agama dan Budi Pekerti	1	Persentase guru menerapkan pendidikan budi pekerti secara integrasi dengan mata pelajaran lainnya	74%	78%	Dinas Pendidikan
			2	Pengadaan sarana dan prasarana ibadah di sekolah	56%	58%	Dinas Pendidikan
	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	Pemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakala-an dan museum bagi pengembangan budaya daerah	100%	100%	Disparbud

	2 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1 Semakin dikenalnya keragaman budaya Lampung 100%	100%	100%	Disparbud
--	---	--	------	------	-----------

Sasaran lain yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah target *Millennium Development Goals* (MDGs), yaitu komitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini merupakan kesepakatan mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

- Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
- Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
- Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
- Menurunkan Angka Kematian Anak,
- Meningkatkan Kesehatan Ibu,
- Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
- Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
- Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan

dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman. Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Tabel 4.9
Korelasi Prioritas Provinsi Lampung
dalam Merespon Program MDGs

No	Tujuan Pembangunan MDGs	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Program Pendidikan Non Formal
		Program Pendidikan Luar Biasa
		Program Pendidikan Menengah
		Program Pendidikan Menengah Kejuruan
		Program Pendidikan Luar Biasa
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Program Pendidikan Tinggi Vokasi
		Program Penguatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Politik
4	Menurunkan angka kematian	Program Upaya kesehatan

	anak	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
5	Meningkatkan kesehatan ibu	Program Upaya kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Akeselerasi Pengembangan dan Pengadaan Sumber Daya Kesehatan (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Ahli Gizi, dan Apoteker)
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan	Program pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen). Adapun nilai strategis tersebut yaitu :

Pertama, bagi pemerintah daerah, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;

Kedua, bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Terkait dengan hal tersebut terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh pihak Provinsi sebagai berikut :

Tabel 4.10
Korelasi Prioritas Provinsi Lampung dalam Mendukung SPM

No	Standar Pelayanan Minimum	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung
1.	Bidang Sosial	Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
2.	Bidang Lingkungan Hidup	Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.
3.	Bidang Perumahan Rakyat	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
4.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5.	Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
6.	Bidang Ketahanan Pangan	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional

7.	Bidang Kesenian	Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
8.	Bidang Perhubungan	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
9.	Bidang Penanaman Modal	Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;

4.4 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2016 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Provinsi Lampung terdapat dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan, yaitu :

1. Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi Dasar pertimbangan penetapan kawasan tersebut adalah kawasan tersebut merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tersambungannya

Kawasan yang berpotensi strategis dalam skala Provinsi Lampung dan perlu dikembangkan terbagi menjadi :

A. Aspek Ekonomi

1. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung

Dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan diarahkan sedemikian sehingga suatu pusat kegiatan dapat mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial ekonominya. Dengan pengembangan Kawasan Metropolitan maka berbagai persoalan pembangunan dapat dieleminir melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu, pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan karena terciptanya ruang-ruang terbuka hijau lebih banyak, sementara di sisi lain berbagai aspek positif konsep metropolitan seperti: menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada umumnya kawasan perkotaan serta ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang lebih efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan, pemasaran dan prasarana ekonomi lainnya yang lebih baik dibandingkan kawasan perkotaan.

Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

- **Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung**

Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi.

- **Kawasan Bakauheni** memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa. Selain itu kawasan ini harus dipersiapkan terkait perkembangan wilayah akibat tersambungannya Sumatera dengan Jawa melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda, melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

2. Kawasan Agropolitan

Di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang. Provinsi Lampung merupakan pemasok utama tanaman padi dan palawija di Indonesia, bahkan merupakan produsen terbesar gula untuk Indonesia, yaitu sekitar 30% dari kebutuhan gula di Indonesia.

3. Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Berada Kabupaten Mesuji. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan mampu mendistribusikan pusat-pusat

perekonomian, sehingga tidak terkonsentrasi di ibukota daerah. Kawasan niaga terpadu di Lampung Tengah diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Lampung bagian tengah, sedangkan KTM diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Provinsi Lampung bagian utara.

4. Kawasan Berikat tambak udang

Berada di Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Mesuji. Di kawasan ini ada beberapa perusahaan besar dan tambak rakyat, merupakan salah satu kawasan tambak terbesar di Indonesia.

5. Kawasan Agro Minapolitan

Berada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Timur.

6. Pusat Kegiatan Lokal yang akan dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah/PKWp.

Sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan ke depan, sehingga kawasan ini dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Adapun PKWp yang dimaksud adalah:

- Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
- Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
- Pringsewu di Kabupaten Pringsewu;
- Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran ;
- Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
- Terbanggi Besar-Bandar Jaya dan Gunung Sugih .(TERBAGUS) di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mesuji di Kabupaten Mesuji;
- Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Aspek Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis untuk kepentingan lingkungan hidup ini mencakup:

- 1. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas**, merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan asset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- 2. Kebun Raya Liwa**, di Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Kawasan Batutegi**, di Kabupaten Tanggamus.

C. Aspek Sosial Budaya

Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya ini mencakup:

- 1. Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kemiling (Kota Bandar Lampung)**

Dilengkapi dengan sarana prasarana berstandar nasional. Pengembangan Kawasan Olah Raga Terpadu di Kemiling saat ini didasarkan pada upaya PEMDA Provinsi Lampung untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun menciptakan event-event olahraga sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Saat ini telah terdapat GOR Saburai di Enggal ke Kecamatan Kemiling, yang dapat

dijadikan cikal bakal Kawasan Olah Raga Terpadu dimaksudkan untuk mendistribusikan beban spasial pusat kota ke wilayah pinggiran yang masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Pembangunan ini juga dimaksudkan untuk membudayakan hidup sehat bagi masyarakat.

2. Pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal

Dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Dengan adanya pendidikan yang terpadu ini diharapkan akan dihasilkan sumberdaya manusia terampil yang mampu menghasilkan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Lampung yang melimpah.

3. Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan Strategis untuk kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ini mencakup **Kawasan Industri Lampung** di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Program Prioritas Berdasarkan Urusan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Program Pada Setiap SKPD

Terdapat 7 (tujuh) program yang dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bentuk dukungan operasional di masing-masing SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

B. Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika.

Berikut disajikan program yang dilaksanakan daerah dalam melaksanakan urusan wajib :

Tabel 5. 1
Urusan Wajib Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani

URUSAN WAJIB	
PENDIDIKAN	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
Program pendidikan dasar	Disdik
Program penguatan kelembagaan BPKB	Disdik
Program pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Disdik
Program pendidikan tinggi	Disdik
Program daya saing regional	Disdik

URUSAN WAJIB

Program Pendidikan Menengah	Disdik
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Disdik
Program Pendidikan Luar Biasa	Disdik
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Disdik
Program pengembangan budaya baca	Badan Perpustakaan dan Arsip, Bandiklat
URUSAN KESEHATAN	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Diskes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Diskes, RSJ
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Diskes
Program Alkes dan makanan minuman	Diskes
Program Kosmetika dan.....	Diskes
Program upaya pelayanan kesehatan perorangan	Diskes, RSJ
Program Pengendalian Penyakit (P2) Menular (nun HIV-AIDs)	Diskes
Program Pengendalian Penyakit Tidak menular	Diskes
Program penyehatan lingkungan	Diskes
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Diskes
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Diskes
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya	Diskes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Diskes, Binsos
Program peningkatan mutu pelayanan BLUD	RSUD, RSJ
Program pengadaan, peningkatan dan sarana dan prasarana RS	RSUD
Program Sumber daya kesehatan	RSJ
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSJ
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSJ
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	RSJ
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	RSUD, RSJ
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (PKMPK)	RSJ
Program pembinaan upaya kesehatan	RSJ
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Binsos
URUSAN INFRASTRUKTUR	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
Program Pembangunan saluran drainase/V-3gorong-gorong-gorong	Bina Marga
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Jembatan	Bina Marga
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Bina Marga
Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan	Bina Marga
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Bina Marga
Program Pemeliharaan jalan dan jembatan	Bina Marga

URUSAN WAJIB	
Program Pembinaan jasa Konstruksi	Bina Marga
Program sinkronisasi Bidang kebinamargaan lintas lembaga lintas sektoral	Bina Marga
Program tanggap darurat infra struktur	Bina Marga, Pengairan & Pemukiman
Program Prasarana dan sarana bangunan gedung dan lingkungan	Pengairan & Pemukiman
Program Pengembangan data dan Informasi	Pengairan & Pemukiman
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pengairan & Pemukiman
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pengairan & Pemukiman
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengairan & Pemukiman
Program pengendalian banjir	Pengairan & Pemukiman
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengairan & Pemukiman
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pengairan & Pemukiman
PERUMAHAN	
Program Pengembangan Perumahan	Pengairan & Pemukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengairan & Pemukiman
PENCANAAN BERWILAYAH	
Program Perencanaan Tata Ruang	Pengairan & Pemukiman, Bappeda
Program Pengelolaan Sumberdaya laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DKP
Program Penataan Kawasan Peternakan Provinsi Lampung (RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota)	DISKESWAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda
Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	Bappeda
Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Bappeda
Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Bappeda
PERHUBUNGAN	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA]	Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan

URUSAN WAJIB	
Program pengembangan Pos dan Telekomunikasi serta Meteorologi dan Geofisika	Perhubungan
Program antisipasi dan pengendalian keadaan Rescue	Perhubungan
Program pendidikan V-5 non formal perhubungan	Perhubungan
LINGKUNGAN HIDUP	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BPLHD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BPLHD
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BPLHD
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	BPLHD
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BPLHD
Program pengembangan sumber-sumber alternative pendanaan lingkungan	BPLHD
Program pengembangan inovasi bidang lingkungan hidup	BPLHD
PERTANAHAN	
Program penyelesaian tanah untuk kepentingan umum	Tapum
Program pengembangan wilayah perbatasan	Tapum
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tapum
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
Program penataan Adm Kependudukan dan catatan sipil	Tapum
Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan	BPP&PA
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	BPP&PA
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BPP&PA
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	BPP&PA
KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
Program Pelayanan kesehatan ibu dan anak	DISKES
Program Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	DISKES
SOSIAL	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial
Program pembinaan anak terlantar	Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial
Program keluarga Harapan	Sosial
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Binsos
Program peningkatan kualitas dan kelembagaan bidang pelayanan kesejahteraan sosial	Binsos
Program peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Binsos
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta pencegahan dan penanganan trafficking, KDRT, dan Korban Pelecehan Sexual	BPP&PA

URUSAN WAJIB	
Program Pelayanan Masyarakat diluar Daerah	Badan Perwakilan
URUSAN KEKAWAHLAN	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnakertrans
Program Pengembangan Kewirausahaan	Disnakertrans
Program Pengembangan Hubungan Industrial	Disnakertrans
Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Disnakertrans
Program Pembinaan dan Pengujian K3	Disnakertrans
Program Pengembangan data dan Informasi Tenaga Kerja	Disnakertrans
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Disnakertrans
Program Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Disnakertrans
Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Binsos
URUSAN PEREKONOMIAN DAN USAHA KEKAWAHLAN	
Program peningkatan pelayanan BLUD UPTD perkuatan modal KUMKM	Koperasi
Program peningkatan dan pengembangan SDM koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Koperasi
Program peningkatan dan pengembangan kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi
URUSAN PEREKONOMIAN DAN USAHA KEKAWAHLAN	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMPT
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMPT
Program peningkatan mutu pelayanan terpadu	BPMPT
Program pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah	Biro ekonomi daerah
URUSAN PEREKONOMIAN DAN USAHA KEKAWAHLAN	
Program pengelolaan keragaman budaya	Badan Perwakilan
Program pengelolaan kekayaan budaya	Badan Perwakilan
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Dinas Parekraf
Program pengembangan nilai budaya	Disdik
Program seni budaya lampung	Disdik
Program Peningkatan apresiasi terhadap kesenian dan budaya daerah	Bina Mental
URUSAN PEREKONOMIAN DAN USAHA KEKAWAHLAN	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dispora
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Dispora
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Dispora
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Dispora, Bandiklat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dispora

URUSAN WAJIB	
Program pelayanan manajemen keolahragaan dan kepemudaan	Dispora
Program kepemudaan, keolahragaan dan keperamukaan	Bina Mental
URUSAN POKOK	
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Biro Otda, Setwan
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setwan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Badan Perwakilan, Biro Humas, Biro Umum, Biro Tapum
Program peningkatan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat	Tapum
Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Penguasaan serta Pemanfaatan Iptek	Balitbangda
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol
Program Penanganan Konflik	Kesbangpol
Program Pengendalian Stabilitas Daerah	Kesbangpol
Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Kesbangpol
Program Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan	Kesbangpol
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Biro Umum
Program peningkatan V-7V-7kerjasama perdagangan internasional	Badan Perwakilan
Program peningkatan pelayanan BLUD di unit kerja Bagian Umum	Badan Perwakilan
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Badan Perwakilan
Program pengembangan V-7V-7kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Badan Perwakilan
Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Badan Perwakilan
Program peningkatan Akuntabilitas Pertanggungjawaban keuangan daerah	Biro Keuangan
Program peningkatan pengelolaan investasi dan penyertaan modal serta PPK-BLUD	Biro Keuangan
Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	Biro Keuangan
Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Biro Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Biro Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Biro Keuangan
Program ketatalaksanaan	Biro Organisasi
Program Pendayagunaan Aparatur	Biro Organisasi
Program sosialisasi, pengembangan dan kelembagaan korpri	Korpri
Program pembekalan kelembagaan, kesejahteraan V-7 sosial keagamaan	Korpri
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan seni budaya daerah lampung	Korpri

URUSAN WAJIB	
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Biro Otda
Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Biro Otda
Program kerjasama pembangunan	Biro Umum
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Biro Otda
Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Biro Otda, Setwan, Biro Humas, Biro Umum, DISPENDA, SANDI
Program pengembangan data/informasi	Biro Otda, Biro Umum
Program kerjasama informasi dan media masa	Biro Humas
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social keagamaan	Bina Mental
Program peningkatan koordinasi sumber daya pendidikan	Bina Mental
Program koordinasi pembangunan ekonomi dan kemitraan	Biro ekonomi
Peningkatan Pengembangan	Adbang
Program pemanfaatan tehknologi informasi	Adbang
Program Koordinasi pembangunan ekonomi dan kemitraan	Adbang
Program menejemen pelayanan pendidikan	Adbang
Program penataan dan peningkatan administrasi pembangunan	Adbang
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Biro hukum
Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan	Biro Hukum
Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	DISPENDA
Program peningkatan Pelayanan pajak	DISPENDA
Program peningkatan Pelayanan Non pajak	DISPENDA
Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan daerah	DISPENDA
Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	DISPENDA
Program pengembangan pelayanan UPTD	DISPENDA
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Perwakilan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
Program Kedaruratan dan Logistik	BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	BPBD
Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP
Program Perlindungan Masyarakat (limas)	Satpol PP
Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP
Program Peningkatan Layanan Pengadaan	ULP
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	ULP
KEPEGAWAIAN	

URUSAN WAJIB	
Program Pendidikan Kedinasan	BKD, Bandiklat
Program peningkatan kualitas aparatur	BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas	BKD
Program Monitoring dan Pembinaan Kediklatan	Bandiklat
Program Perencanaan Kediklatan	Bandiklat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	BPMPD
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	BPMPD
Program pengembangan, penerapan dan pembangunan TTG, SDA, dan LH	BPMPD
Program pemantapan koordinasi program khusus lintas sektoral	BPMPD
Program pembinaan, pengembangan dan perkuatan desa, administrasi dan kelembagaan desa	BPMPD
Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa induk dan desa terlinggal	Binsos
STATISTIK	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Bappeda
KEARSIPAN	
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Badan Perpustakaan dan Arsip
Program penyelenggaraan kearsipan nasional	Badan Perpustakaan dan Arsip
Program pengembangan keperpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip
Program pembinaan perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Badan Perpustakaan dan Arsip
PERKEMBANGAN KEMUNDIRAAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMERDEKAAN BERKAWALAN	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	KPID, Kominfo
Program pengkajian dan penerapan teknologi	Kominfo
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	KPID, Kominfo
Program kerjasama informasi dan media massa	Kominfo
Program Pembinaan dan pemberdayaan lembaga komunikasi	Kominfo
Program peningkatan kapasitas Updating situs resmi mitra Praja Utama (MPU)	Kominfo

URUSAN WAJIB

Program Ketatalaksanaan	KPID
Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (baru)	KPID
Program kerjasama antar lembaga (BARU)	KPID

C. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Berikut disajikan program yang dilaksanakan daerah dalam melaksanakan urusan pilihan :

**Tabel 5. 2
Urusan Pilihan Dan Program Prioritas Serta SKPD yang Menangani**

PERTANIAN	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DISBUN, Biro Perekonomian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/peternak	DISNAKESWAN
Program peningkatan konsumsi pangan hewani yg aman, sehat, utuh dan halal	DISNAKESWAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian(PENGEMBANGAN AGRIBISNIS)	DPTPH
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (Pengembangan Agribisnis)	DPTPH, DISBUN
Program pengolahan dan pemasaran hasil produksi peternakan	DISNAKESWAN
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	DPTPH, DISBUN
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPTPH, DISBUN
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DISNAKESWAN
Program peningkatan produksi hasil peternakan	DISNAKESWAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	DISNAKESWAN
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	DISNAKESWAN
Program peningkatan pelayanan mutu (baru)	DPTPH
Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	BAKORLUH
Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan Petani	BAKORLUH
Program pengembangan Jejaring Kerjasama agribisnis dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan	BAKORLUH
Program Penataan, penguatan dan pengembangan kelembagaan	BAKORLUH
Program peningkatan dan pengembangan sistem penyelenggaraan penyuluhan	BAKORLUH

Program peningkatan SDM pendidikan	BAKORLUH
Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPD
KEHUTANAN	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	DISHUT
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	DISHUT
Program Tata Hutan dan Pengelolaan Wilayah Tahura, KPHL dan KPHP	DISHUT
Program Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kehutanan	DISHUT
PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
Program pembinaan dan pengembangan bidang pertambangan dan kelistrikan	Biro Ekonomi
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DISTAMBEN
Program pengembangan data dan informasi bidang pertambangan dan energi	DISTAMBEN
Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan Geologi	DISTAMBEN
Program Pendidikan Masyarakat	DISTAMBEN
Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari hasil Pertambangan dan Energi	DISTAMBEN
PARIWISATA	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Parekraf
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Parekraf
Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Parekraf
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek	Dinas Parekraf
Program Pengembangan Kreatifitas SDM	Dinas Parekraf
KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	DKP
Program pengembangan budidaya perikanan	DKP
Program pengembangan perikanan tangkap	DKP
Program pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan	DKP
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DKP
Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan dan Perikanan	DKP
PERDAGANGAN	
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
PERINDUSTRIAN	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinas Perindustrian

Program Penataan Struktur Industri	Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Kualitas Produk Kemasan pada Rumah Kemasan	Dinas Perindustrian
Program peningkatan kewirausahaan	Disnakertrans
Program pengembangan masyarakat melalui transmigrasi	Disnakertrans
Program pengembangan KTM	Disnakertrans
Program pengembangan musium transmigrasi	Disnakertrans
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnakertrans
Program pengembangan masyarakat dan Kawasan transmigrasi	Disnakertrans

Tabel 5. 3
Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Nama SKPD	PAGU INDIKATIF BERDASARKAN JENJANG REKONSTRUKSI (Rp)	REKONSTRUKSI (Rp)
1	Biro Tata Pemerintahan Umum	2.100.000.000	-
2	Biro Otonomi Daerah	2.100.000.000	-
3	Biro Hukum	2.250.000.000	-
4	Biro Perekonomian	2.810.000.000	-
5	Biro Administrasi Pembangunan	3.505.000.000	-
6	Biro Bina Sosial	10.417.000.000	-
7	Biro Bina Mental	48.541.000.000	-
8	Biro Umum	66.864.600.000	-
9	Biro Humas & Protokol	8.053.000.000	-
10	Biro Keuangan	12.000.000.000	-
11	Biro Perlengkapan dan Aset	18.440.000.000	-
12	Biro Organisasi	3.958.000.000	-
13	Sekretariat DPRD	89.068.341.680	-
14	Inpektorat Provinsi	10.135.004.200	-
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.300.000.000	-
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah		
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	22.519.936.000	-
18	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	8.062.500.000	6.400.000.000
19	Badan Ketahanan Pangan Daerah	7.845.899.800	9.150.000.000
20	Badan Penanaman Modal Daerah dan	6.079.000.000	-

	Pelayanan Perizinan Terpadu		
21	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	6.000.000.000	5.500.000.000
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	15.002.750.000	-
23	Badan Kepegawaian Daerah	7.764.000.000	-
24	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	15.446.790.000	-
25	Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Daerah	9.868.635.000	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	20.945.209.000	-
27	Rumah Sakit Umum Daerah	209.824.866.332	20.000.000.000
28	Rumah Sakit Jiwa	14.300.000.000	-
29	Kantor Sandi Daerah	700.000.000	-
DINAS PROVINSI			
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	303.891.938.938	81.200.000.000
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.393.760.000	-
32	Dinas Kesehatan		
33	Dinas Sosial	12.249.960.620	23.216.802.400
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.000.000.000	48.087.953.860
35	Dinas Perhubungan	84.261.350.000	1.923.560.657.000
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.067.000.000	-
37	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.799.500.000	20.250.000.000
38	Dinas Bina Marga	1.289.473.220.000	-
39	Dinas Pengairan dan Pemukiman	109.584.545.000	-
40	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	9.575.000.000	5.097.038.000
41	Dinas Perindustrian	4.410.000.000	16.248.000.000
42	Dinas Perdagangan	7.470.000.000	5.152.075.000
43	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	33.134.000.000	302.770.440.778
44	Dinas Perkebunan	17.373.000.000	147.153.217.500
45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.425.054.000	16.625.500.000
46	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.387.999.800	-
47	Dinas Kehutanan	8.025.000.000	4.906.200.000
48	Dinas Pertambangan dan Energi	12.424.612.000	-
49	Dinas Pendapatan Daerah	28.243.800.000	-
50	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	26.333.757.500	-
51	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.825.000.000	-
52	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Pegawai Negeri Sipil	2.407.500.000	
53	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi	10.500.000.000	-

	Lampung di Jakarta		
54	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3.333.454.150	-
55	Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa		
JUMLAH		2.715.490.984.020	2.638.317.881.588

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun berdasarkan pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tahapan dan sistematika penyajian juga telah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan alur pikir yang melatarbelakangi proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016. Beberapa substansi penting dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Analisis didasarkan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, serta RKPD Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2015.
2. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah Provinsi Lampung sesuai hasil analisis pada Bab II dan III, sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
3. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas beserta pagu indikatifnya.
4. Selanjutnya dilakukan forum konsultasi publik dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya.
5. Hasil dari tahapan proses ini adalah berupa rancangan awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016. Rancangan awal menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016.

6. Rancangan akhir yang telah dilegalkan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. KUA dan PPAS tersebut harus disepakati oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
7. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas Pemerintah Pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Provinsi Lampung untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO